Citra Kabupaten Banyumas dalam Arsip

ANRI

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Citra Kabupaten Banyumas dalam Arsip

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Citra Kabupaten Banyumas dalam Arsip

Pengarah
Drs. Imam Gunarto, M.Hum
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Penanggung Jawab Program
Dra. Multi Siswati, MM
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis
Mira Puspita Rini, S.Sos., M.Hum
Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

Narasumber
Drs. Achmad Supartono, M.Si
Jatmiko Wicaksono, M.Sn

Koordinator
Eviani Yusnita, S.IP

Penulis
Jatmiko Wicaksono, M.Sn
Eviani Yusnita, S.IP

Editor
Sapta Sunjaya, S.Kom, M.MSi

Penelusur Arsip
Beny Oktavianto, S.Kom
Dian Eka Fitriani, S.S
Hanif Aulia Rahman, A.Md
Anggi Suryaningtias, A.Md

Penerjemah
Rini Rusyeni, S.IP, M.A

Desain Grafis & Layout
Hanif Aulia Rahman, A.Md

ISBN 978-602-6503-30-5
9 786026 503305

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

Hak Cipta © 2022
Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

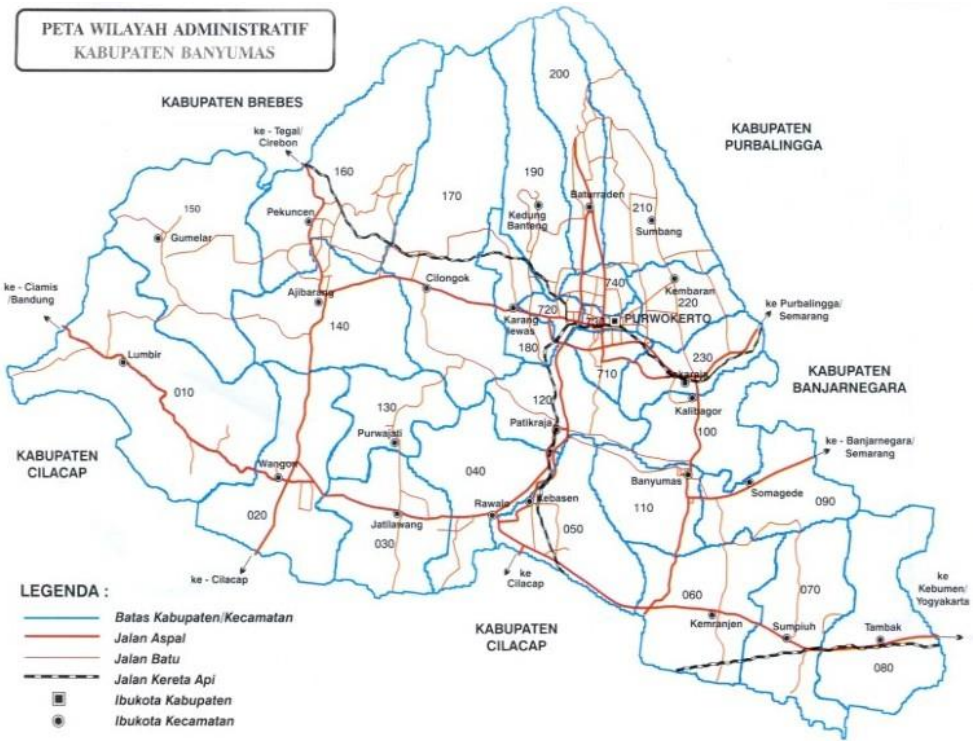

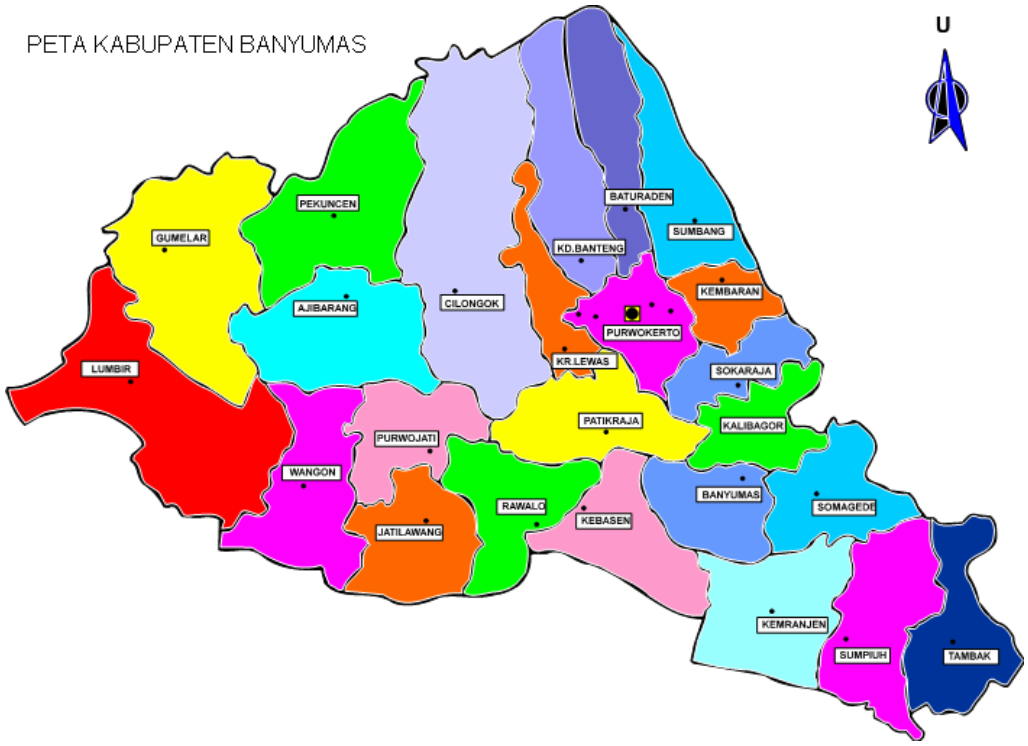

PETA WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Sumber: Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. Achmad Husein

Bupati Banyumas

Periode 2018 – 2023

Drs. H. Sadewo Tri Lastiono

Wakil Bupati Banyumas

Periode 2018 – 2023

Ir. Wahyu Budi Saptono, M.SI

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

dr. BUDHI SETIAWAN

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS DARI MASA KE MASA

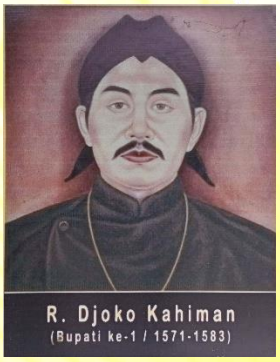

R. JOKO KAHIMAN, ADIPATI WARGA UTAMA II
1571 - 1583

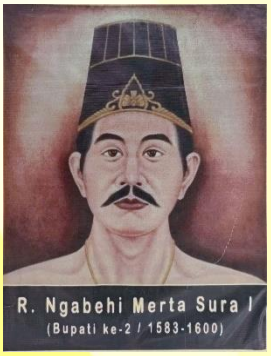

R. NGABEI MERTA SURA
1583 – 1600

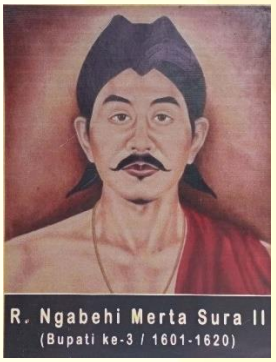

R. NGABEI MERTA SURA II
(NGABEI KALI DETHUK)
1601 – 1620

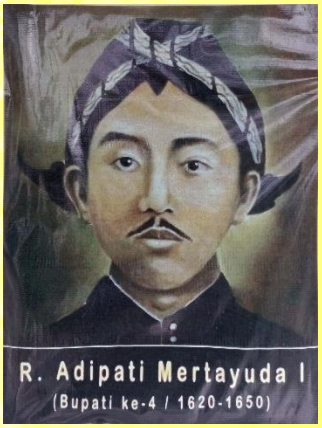

R. ADIPATI MERTAYUDA I
(NGABEI BAWANG)
1620 – 1650

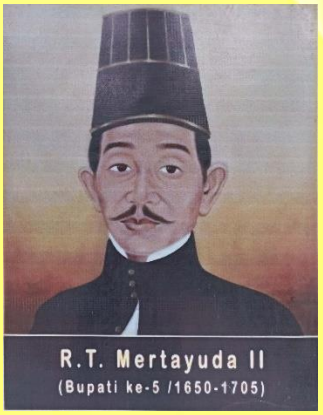

R. TUMENGGUNG MARTAYUDA II (R.T. SEDA MASJID/R.T. YUDANEGARA I
1650 – 1705

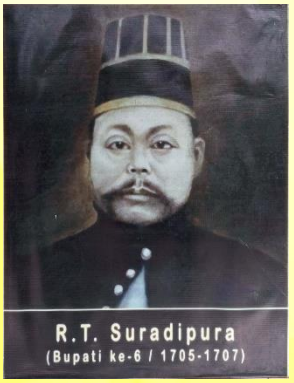

R. TUMENGGUNG SURA DIPURA
1705 – 1707

R. TUMENGGUNG YUDANEGARA II (R.T. SEDA PANDAPA)
1707 – 1745

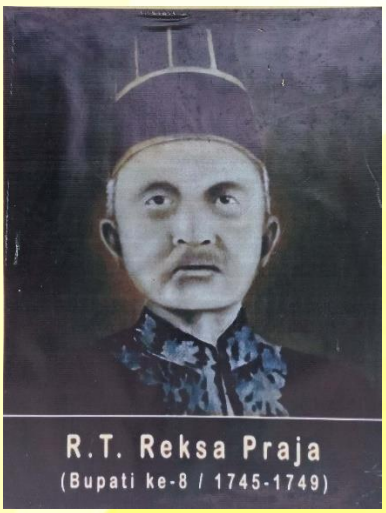

R. TUMENGGUNG REKSAPRAJA
1745 – 1749

R. TUMENGGUNG YUDANEGARA III
1749 – 1755

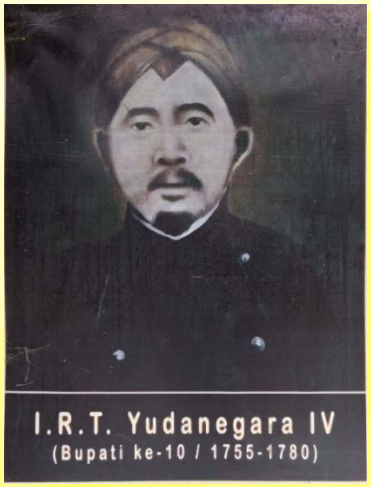

R. TUMENGGUNG YUDANEGARA IV
1755 – 1780

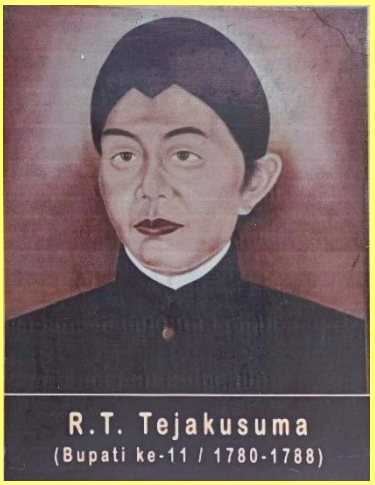

R.T. TEJAKUSUMA, TUMENGGUNG KEMONG
1780 – 1788

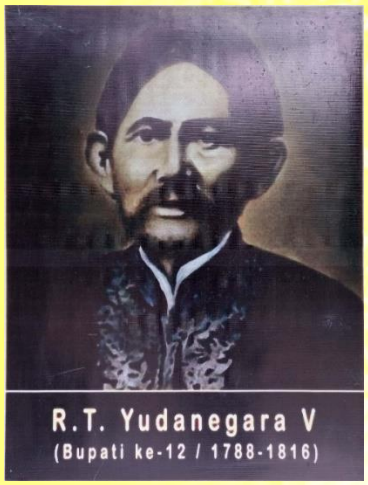

R. TUMENGGUNG YUDANEGARA V
1788 – 1816

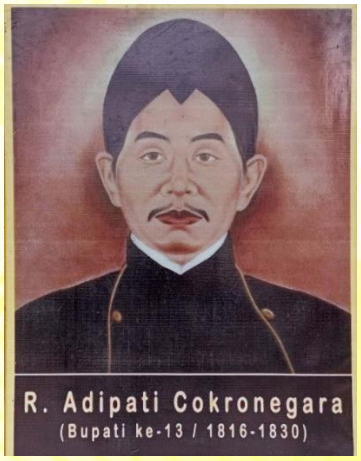

KESEPUHAN : R. ADIPATI COKRONEGORO
1816 – 1830

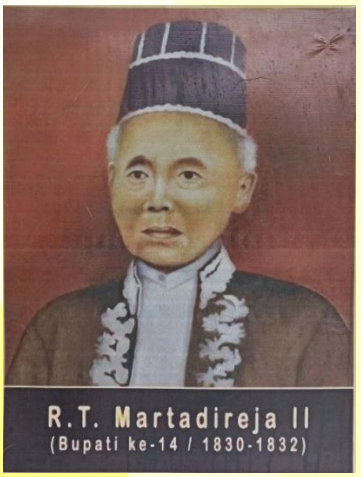

R.T. MARTADIREJA II
1832 – 1882

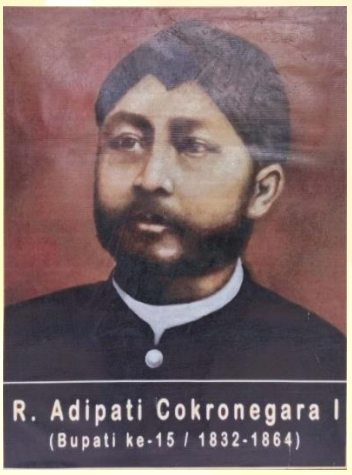

R. ADIPATI COKRONEGARA I
1832 – 1864

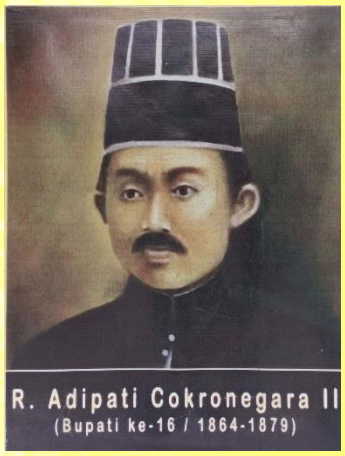

R. ADIPATI COKRONEGARA II
1864 – 1879

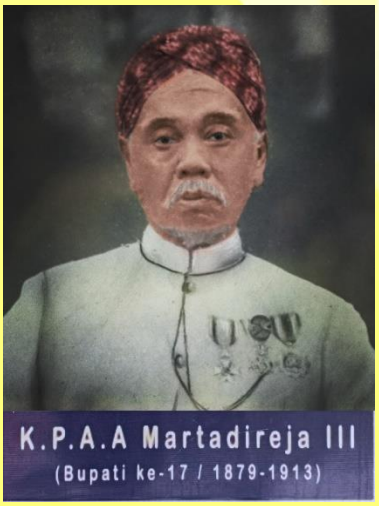

KANJENG PANGERAN ARYA MARTADIREJA III
1879 – 1913

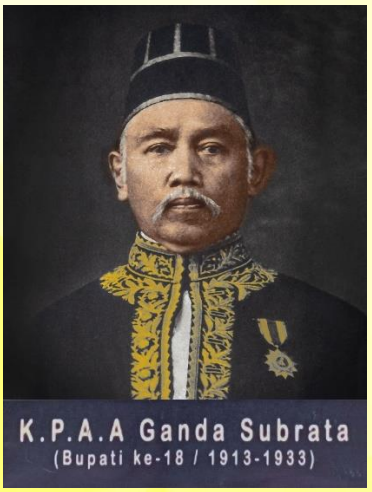

KANJENG PANGERAN ADIPATI ARYA GANDA SUBRATA
1913 – 1933

R. A.A.SUJIMAN GANDA SUBRATA
1933 – 1950

R. MOH. KABUL PURWODIREJA
1950 – 1953

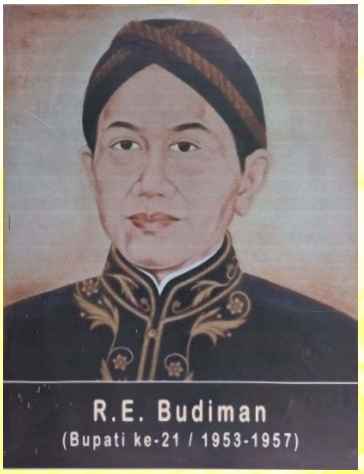

R. BUDIMAN
1953 – 1957

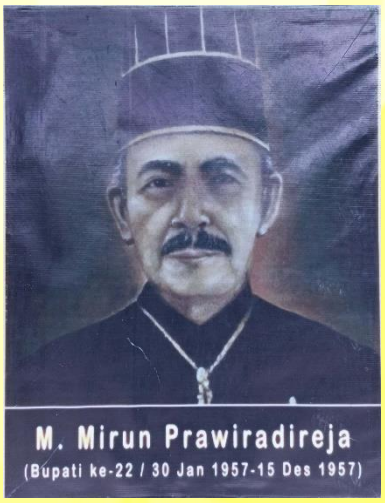

M. MIRUN PRAWIRADIREJA
30 Januari 1957 –
15 Desember 1957

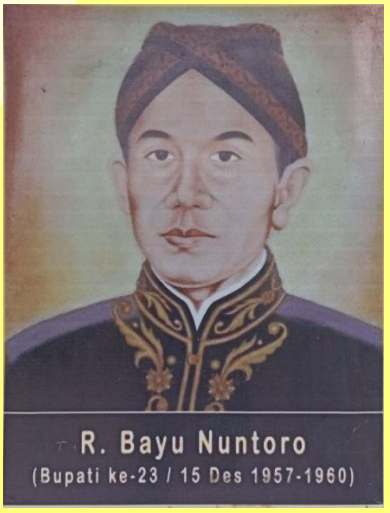

R. BAYU NUNTORO
15 Desember 1957 – 1960

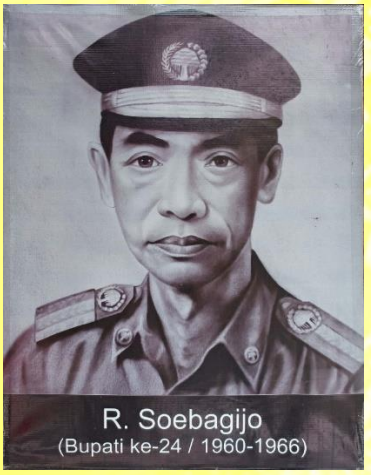

R. SUBAGYO
1960 – 1966

LETKOL. INF. SUKARNO AGUNG
1966 – 1971

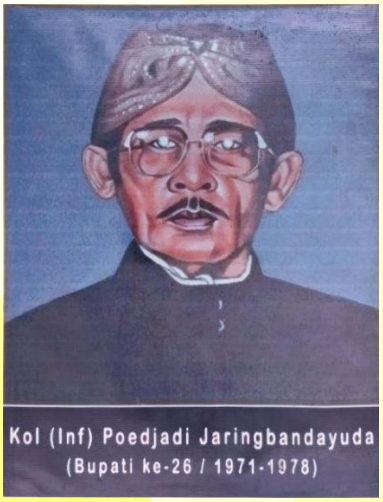

KOL. INF. PUDJADI JARING BANDAYUDA
1971 – 1978

KOL. INF. R.G. RUJITO
1978 – 1988

KOL. INF. H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos
1988 – 1998

KOL. ARTELERI H.M. ARIS SETIONO SH, SIP
1998 – 2008

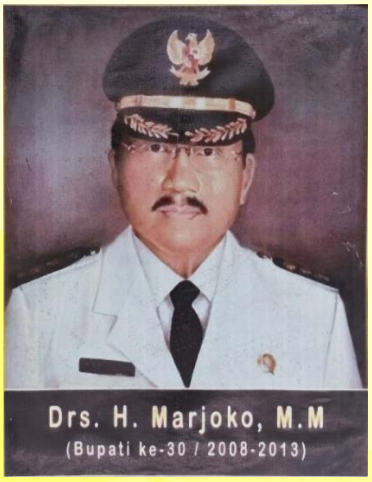

Drs. H. MARDJOKO, MM
2008 – 2013

Ir. H. ACHMAD HUSEIN
2013- SEKARANG

SAMBUTAN

BUPATI BANYUMAS

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUANYA,

MERDEKA!!

ALHAMDULILLAH, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA MASIH DIBERI KESEHATAN, KEKUATAN, DAN KESEMPATAN UNTUK MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, SERTA PENGABDIAN KITA KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

PERLU DIKETAHUI BAHWA KABUPATEN BANYUMAS SECARA GEOGRAFIS TERLETAK DIANTARA 108 °39'17" - 109°27'15" BT DAN 7 °15'05" - 7 °37'10"LS, TERDAPAT 27 KECAMATAN DAN MEMPUNYAI LUAS WILAYAH 132.759 HA. WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS YANG SANGAT LUAS INI TERDAPAT BERAGAM KONDISI BAIK ASPEK GEOGRAFIS, ASPEK POLITIK DAN PEMERINTAHAN, ASPEK KEAGAMAAN, ASPEK SOSIAL BUDAYA, ASPEK PENDIDIKAN, ASPEK KESEHATAN, ASPEK PEREKONOMIAN, ASPEK INFRASTRUKTUR, ASPEK TRANSPORTASI, DAN BENCANA ALAM.

KESELURUHAN ASPEK TERSEBUT MERUPAKAN SUATU KESATUAN YANG MENJADI MEMORI KOLEKTIF BANGSA YANG HARUS DIJAGA DAN DILESTARIKAN KEBERADAANNYA DEMI MENJAGA KEUTUHAN KABUPATEN BANYUMAS PADA KHUSUSNYA, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA UMUMNYA. MEMORI KOLEKTIF BANGSA DAPAT DIWUJUDKAN DALAM SUATU CITRA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

CITRA DAERAH BERFUNGSI UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN YANG NYATA KEPADA MASYARAKAT MENGENAI KEBERAGAMAN KONDISI DARI BERBAGAI ASPEK, SEHINGGA MASYARAKAT SADAR AKAN PENTINGNYA SOLIDARITAS DAN TENGGANG RASA DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN. MATERI YANG TERDAPAT DALAM CITRA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ADALAH BERSUMBER DARI ARSIP-ARSIP YANG TERSIMPAN DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, SEJARAWAN BANYUMAS DAN TOKOH MASYARAKAT YANG BERASAL DARI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS. DIHARAPKAN DENGAN ADANYA CITRA DAERAH INI AKAN MEMBUKA JENDELA PENGETAHUAN KITA SEMUA, BAIK MENGENAI SEJARAH MASA LALU DAN HARAPAN TERBAIK BAGI KABUPATEN BANYUMAS DI MASA YANG AKAN DATANG.

CITRA DAERAH MEREFLEKSIKAN BAGAIMANA SUATU DAERAH IKUT BERPERAN MEMBERI WARNA DAN CORAK DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA DARI MASA KE MASA. KHAZANAH ARSIP TERSEBUT MEMBERIKAN INFORMASI YANG AKURAT DAN OBYEKTIF MENGENAI PERJALANAN SEBUAH DAERAH DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), YANG TEREKAM DALAM ARSIP BAIK DALAM BENTUK TEKSTUAL, PETA MAUPUN FOTO MENGENAI SEBUAH DAERAH. CITRA DAERAH MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG KEARIFAN LOKAL YANG DIMILIKI SEBUAH DAERAH.

SALAH SATU SEJARAH YANG MENONJOL DI KABUPATEN BANYUMAS ADALAH MASJID SAKA TUNGGAL YANG TERLETAK DI DESA CIKAKAK KECAMATAN WANGON, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH ATAU SEKITAR 30 KILOMETER ARAH BARAT DAYA PURWOKERTO. SEJAK TAHUN 1989 KAWASAN MASJID SAKA TUNGGAL SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA, DIMANA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH. MASJID INI MERUPAKAN MASJID TERTUA DI INDONESIA, BAHKAN MASJID INI BERDIRI SEBELUM ADANYA WALI SANGA. MASJID SAKA TUNGGAL DIBANGUN PADA TAHUN 1288 H (1871 M) SEPERTI YANG TERTULIS PADA SAKA GURU (TIANG UTAMA) MASJID INI.

TAHUN PEMBUATAN MASJID INI LEBIH JELAS TERTULIS PADA KITAB-KITAB YANG DITINGGALKAN PENDIRI MASJID INI, YAITU KYAI MUSTOLIH. NAMUN, KITAB-KITAB TERSEBUT TELAH HILANG BERTAHUN-TAHUN YANG LALU.

PEMAHAMAN AKAN PENTINGNYA SEJARAH MASA LALU SANGATLAH PENTING KARENA MERUPAKAN UPAYA MEMPERTAHANKAN NILAI- NILAI LELUHUR BANGSA. SEJARAH MASA LALU SALAH SATUNYA BISA DIDAPATKAN DARI ARSIP. ARSIP SANGATLAH PENTING BAGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP SESEORANG, KELOMPOK, MAUPUN ORGANISASI. HAL INI DIKARENAKAN ARSIP DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SUATU BUKTI ATAU PERTANGGUNG JAWABAN YANG AUTENTIK (TERPERCAYA) DALAM PELAKSANAAN SUATU KEGIATAN. CITRA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DIHARAPKAN DAPAT MEMUPUK RASA CINTA TANAH AIR BERBANGSA DAN BERNEGARA TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) BAGI MASYARAKAT BANYUMAS PADA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT INDONESIA PADA UMUMNYA.

SEGALA SUMBER SEJARAH TIDAK DAPAT DITURUNKAN DARI SATU GENERASI KE GENERASI BERIKUTNYA, JIKA TIDAK ADA KESADARAN PENGELOLAAN SUMBER (ARSIP) YANG BAIK DAN BENAR MENURUT KAIDAH YANG BERLAKU. DI MASA MENDATANG SISTEM PENGELOLAAN ARSIP HARUS DILAKUKAN SECARA MODERN MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. ZAMAN SEMAKIN MAJU, KARENA ITU KITA HARUS MENGUASAI DAN DAPAT MEMANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI UNTUK MELENGKAPI INGATAN LISAN DAN TULISAN YANG ADA SEPANJANG WAKTU.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA PENERBITAN CITRA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. SEMOGA BERMANFAAT BAGI PARA PEMBACA, UTAMANYA MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS YANG INGIN MENGETAHUI LEBIH DALAM MENGENAI KABUPATEN BANYUMAS.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

PURWOKERTO, 12 SEPTEMBER 2022

BUPATI BANYUMAS

SAMBUTAN

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah.. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahma dan karunia-Nya Program Citra Daerah sebagai salah satu upaya memberdayakan daera melalui arsip telah selesai dilaksanakan oleh ANRI bekerja sama dengan Dinas Arsip Da Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas yang diwujudkan dalam buku "Citra Kabupate Banyumas Dalam Arsip".

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas mengucapkan banyak terim kasih kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajaranya yang tela memilih Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten yang menjadi obye penyusunan buku Citra Daerah dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti identitas da jati diri bangsa serta sebagai memori dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerimaan Citra Daerah ini merupakan sebua penghargaan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjaga da melestarikannya. Semoga Program Citra Daerah dapat kami tindak lanjuti dengan dukunga data yang terkandung dalam arsip periode berikutnya sehingga informasi-informasi pentin tentang perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupate Banyumas dalam berbagai bidang dapat terus terhimpun untuk kepentingan pelayanan akse serta penyebarluasan kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Penyebarluasa ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untu terus mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraa kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perjalanan pemerintaha Kabupaten Banyumas hanya akan menjadi cerita masa lalu bagi generasi sekarang jika tida didukung data yang terekam dalam arsip sebagai bukti yang akurat dan autentik. Oleh karen itu, Lembaga Kearsipan Daerah perlu terus melakukan upaya penelusuran untu menghimpun arsip-arsip sejarah tersebut, mengelola dan melestarikannya agar dapa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik.

Purwokerto, 26 April 2022

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Banyumas

Drs. ACHMAD SUPARTONO, M.Si.

SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya (Presiden Joko Widodo, Juli 2021).

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Banyumas banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Keindahan dan Kekayaan alam menjadi anugerah yang amat berharga bagi daerah ini yang terekam pada pemandangan Sungai Bodri yang banyak memberikan manfaat bagi sumber kehidupan masyarakat setempat dalam bidang pertanian dan perikanan. Ciri khas religious dan semangat mempertahankan adat istiadat budaya melekat pada masyarakat. Pembangunan infrastruktur sangat berkembang tercermin dengan di bangunnya perumahan, sekolah, kesehatan, jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi.

Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari arsip yang berasal dari koleksi Khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas, dan Koleksi Pribadi.

Citra Daerah Kabupaten Banyumas ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas khususnya di bidang kearsipan

Jakarta, September 2022

Kepala,

Drs. Imam Gunarto, M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Peta Wilayah Kabupaten Banyumas iv

Lambang Pemerintah Kabupaten Banyumas v

Bupati Banyumas vi

Wakil Bupati Banyumas vii

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas viii

Bupati Kabupaten Banyumas dari Masa ke Masa ix

Sambutan Bupati Banyumas xii

Sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Banyumas xvi

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI xviii

Daftar Isi xx

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 2
B. Sejarah Masa Kolonial 3
C. Sejarah Masa Pendudukan Jepang 7
D. Sejarah Masa Kemerdekaan 8
E. Sejarah Pembentukan Kabupaten Banyumas 10

CITRA KABUPATEN BANYUMAS 13

A. Geografis 14
B. Politik dan Pemerintahan 25
C. Perekonomian 53
D. Pendidikan 60
E. Transportasi 70
F. Perikanan 77
G. Sosial dan Budaya 80
H. Infrastruktur 89
I. Pertanian 97
J. Perkebunan 102
K. Keagamaan 118

Daftar Pustaka 128

PENDAHULUAN

A. Banyumas Masa Kerajaan

Sejarah Kabupaten Banyumas selalu berkaitan dengan keberadaan kadipaten Wirasaba Yang sudah dimulai pada masa pemerintahan *Girindrawardhana Dyah Ranawijaya* atau *Brawijaya V* yang bertahta di akhir keuasaan kerajaan Majapahit. Perang saudara memperebutkan tahta Majapahit berakhir dengan perpecahan persaudaraan. Banyak kerabat dari *Brawijaya V* yang merasa terancam jika harus tinggal di sekitar kerajaan yang berpusat di Daha (Kediri) akhirnya harus mengungsi ke daerah Barat. Sehingga daerah yang kelak menjadi Mataram Islam merupakan daerah pelarian para keluarga *Brawijaya IV*

Masa Majapahit

Dikisahkan pada babad Banyumas bahwa Wirasaba merupakan wilayah kekuasaan di wilayah lembah sungai Serayu yang tertua yang pernah tercatat. Dimana para penguasa masih merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Adipati pertama kadipaten Wirasaba adalah R. Ad. Wirahudaya yang berasal dari Paguwan (timur sungai Banjaran barat grumbul Purwakerta). Bupati selanjutnya adalah turun-temurun trah Wirasaba R. Kaduhu yang masih berdarah Majapahit dan Pakuan Prahyangan yang bergelar R. Ad. Wirautama I.

Berikut adalah urutan Adipati Wirasaba sebelum era Pajang :

R. Ad. Wirautama I yang bernama kecil R. Kaduhu

R. Ad. Wirautama II yang bernama kecil R. Joko Hurang

R. Ad. Wirautama III yang bernama kecil R. Surawin

R. Ad. Surahutama yang bernama kecil R. Kambangan

Masa Pajang

Pada masa Pajang yang diperintah oleh sultan Hadiwijaya wilayah Wirasaba masuk wilayah Pajang. Ada kejadian besar yang tercatat oleh ingatan masyarakat Banyumas raya dimana Adipati Wirasaba ke enam yaitu Raden Adipati Wargahutama I telah diminta oleh sultan Hadiwijaya untuk menyerahkan pelara-lara (gadis remaja untuk dijadikan selir sultan). Adipati menyerahkan putrinya yang sebenarnya sudah menikah dengan putra demang Toyareka namun karena tidak suka mereka telah berpisah sejak lama. Demang Toyareka yang mendengar bekas menantunya dibawa menjadi pelara-lara, merasa sakit hati dan menyusul untuk memprotes tindakan adipati Wirasaba kepada sang Sultan.

Sementara sang adipati telah kembali melalui jalan selatan, Sultan Hadiwijaya mendengarkan keberatan demang Toyareka, sehingga dengan tergesa-gesa menyuruh beberapa orang prajurit Gandek untuk membunuh Adipati Wargahutama I. Sementara putri sang adipati juga telah memberikan penjelasan meskipun telah menikah namun sang putri

masih perawan karena belum pernah bergaul dengan suaminya. Prajurit yang diberi perintah telah bisa menyusul adipati di desa Bener dan langsung membunuhnya.

Kejadian ini membuat Sultan Hadiwijaya menyesal telah tergesa-gesa mengambil keputusan untuk memberikan perintah membunuh Adipati Wargahutama I. Dalam suasana duka, Sultan kemudian memerintahkan kepada keturunan Adipati untuk menghadap di Pajang, karena suasana yang tidak menentu terkait informasi undangan itu. Maka berangkatlah putra menantu sang adipati yang bernama Jaka Khaiman menghadap mewakili keluarga adipati.

Adipati Wargahutama II

Karena keberaniannya Jaka Khaiman dan rasa penyesalannya yang dirasakan Sultan Pajang atas terbunuhnya Adipati Wargahutama. Sultan langsung mengangkat Jaka Khaiman menjadi bupati bergelar Adipati Wargahutama II, namun sebagai anak menantu beliau ingin juga berbagi dengan saudara tirinya yang merupakan putra pewaris Wirasaba dengan cara membagi Wirasaba menjadi empat. Jaka Khaiman mendapat bagiannya yang kemudian menjadi cikal bakal kabupaten Banyumas yang berpusat di Kejawar. Adipati juga dikenal sebagai Adipati Mrapat karena beliaulah tokoh dibalik terbaginya Wirasaba menjadi empat bagian.

Masa pemerintahan Kyai Raden Ngabei Mertasura

Penggantinya adalah putra keduanya yang bernama R. Ng. Janah dengan gelar Kyai Raden Ngabei Mertasura atau Adipati Janah. Pada masa pemerintahan adipati daerah Banyumas telah menjadi kekuasaan Mataram Islam karena Pajang telah hancur. Wilayah kadipaten Banyumas menjadi lebih kecil Panjer, Wirasaba, Pasir, Merden dan Dayohluhur, daerah Kuningan yang tadinya masuk wilayah Banyumas kemudian berdiri sendiri dibawah Mataram.

Selanjutnya bupati adalah turun temurun ke anak anak dari Adipati Janah;

Kj. Ng. Mertasura II yang sebelumnya merupakan Ngabei di Kaligetuk

Kj. Ng. Mertayuda yang sebelumnya merupakan Ngabei di Bawang

Masa pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara I

Menggantikan ayahnya menjadi Bupati bergelar Raden Ngabei Maertayuda II namun karena pada awal menjabat juga merupakan masa dimana awal dari pemerintahan Susuhunan Amangkurat I yang bertahta di kraton Plered.

Pada masa itu kadipaten-kadipaten pecahan Wirasaba tidak dapat berkembang dengan baik maka wilayahnya kemudian disatukan dengan wilayah Banyumas seperti Banjar, Merden dan Wirasaba. Daerah Banyumas diperluas lagi yaitu Pasir, Ngayah, Merden, Dayohluhur, Galuh, Krawang, Kuningan, Pemalang, Sukapura, Manonjaya, Banjar, Panjer dan Kalapanunggal. Oleh karena itu adipati mendapat gelar Kyai Raden Adipati Yudanegara

I dari Amangkurat I yang meninggal di desa Wanayasa Banyumas. Sebagai Wadono Bupati kemudian dinikahkan juga dengan putrinya yang ke ke 14 dari Amangkurat I dari istri Kanjeng Putri Ratu Kencana bernama Raden Ayu Bendara dan berhak menggunakan Songsong Jene ketika menghadap raja pada Grebeg Besar dan Maulud

Setelah Amangkurat I meninggal kemudian putranya menggantikan ayahnya bergelar Amangkurat II pada tahun 1677, dan tahun 1680 memindahkan kraton Ke Kartasura. Pada tahun yang sama terjadi perang antara Kartasura (Amangkurat II) dengan kraton Plered yang dikuasai oleh pangeran Puger adiknya sendiri.

Sepeninggal ayahnya Amangkurat III berkuasa selama dua tahun, pada waktu grebeg pertama Susuhunan menjabat para adipati datang untuk menyerahkan hulubekti dan silaturahmi. Namun pada saat itulah istri yang merupakan putri Amangkurat I atau bibi dari Amangkurat III mengadukan ketidak adilan Yudanegara I karena merasa tidak diperhatikan. Sehingga Amangkurat III memberikan hukuman penggal di Masjid kraton Surakarta, sehingga sang adipati juga disebut sebagai Tumenggung Seda Masjid atau Tumenggung Kokum (terhukum) setelahnya.

Selanjutnya bupati yang menjabat adalah bupati yang ditempatkan oleh Amangkurat III yang berasal dari Kartasura R. Tm. Surodipuro yang hanya menjabat selama 3 tahun karena tidak setia terhadap Pangeran Puger (Pakubuwono I) yang merupakan paman Amangkurat III.

Masa pemerintahan Raden Adipati Yudanegara II

Pada masa kecil bernama Raden Bagus Mali Gandakusuma dan ketia diangkat menjadi bupati bergelar Kyai Raden Adipati Yudanegara II yang sejak remaja telah mengabdi pada Amangkurat II. Pada masa pemerintahannya pusat kabupaten dipindahkan ke Geger Duren dekat dengan desa Menganti. Ditempat yang baru dibangun pendopo untuk bertemu dengan masyarakatnya dan juga sebuah ruangan paringgitan untuk menempatkan dan memainkan gamelan.

Sebelah selatan kota Banyumas yang merupakan lembah sungai Serayu terdapat sebuah rawa bernama Rawa Tembelang yang lumayan luas dan pada tahun pertama menjabat bupati telah memerintahkan untuk membangun sebuah sungai buatan “Gawe” untuk mengeringkan dan dijadikan area persawahan.

Pada masa jabatannya telah terjadi pergantian susuhunan dari Pakubuwana I ke Amangkurat IV dan juga ke Pakubuwana II. Pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II ini lah terjadi peristiwa besar *Geger Pacinan.* Pakubuwana II juga merupakan Susuhunan Mataram terakhir yang kemudian menjadi Susuhunan Surakarta pertama setelah membangun kraton yang baru bernama Surakarta.

Adipati meninggal di pendopo setelah kepulangannya dari Kartosura, beliau telah melarikan diri dari peperangan besar Geger Pacinan yang didukung oleh Pakubuwana II.

Kepergiannya kemudian menyebabkan Banyumas dijabat oleh seorang bupati dari Kartosuro yang juga merupakan menantunya. Namun Raden Tumenggung Reksoprojo hanya menjabat selama 6 tahun, kemudian diberhentikan oleh Pakubuwana III yang berpihak pada VOC, karena Bupati tidak bisa menjamin logistik untuk tentara VOC yang tinggal di Banyumas.

Masa pemerintahan Raden Adipati Yudanegara III

Setelah RT Reksoprojo diberhentikan maka beberapa pangeran dari Surakarta mengusulkan untuk mengembalikan jabatan bupati di Banyumas ke trah Banyumas. Sebenarnya Yudanegara II telah mempersipkan Raden Bagus Konting Mertawijaya yang juga pernah menjadi Mantri Anom di Kartosura dan bersama dengan Mangkubumi (adik Pakubuwana II) memerangi pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said (sisa-sisa pemberontakan Geger pacinan) yang kelak menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.

Raden Bagus Konting Mertawijaya dan Pangeran Mangkubumi yang kecewa karena Pakubuwana II mengawali pemberontakan yang disebut perang Mangkubumen yang berlangsung selam 9 tahun dari tahun 1746 hingga 1755, dari Pakubuwana II hingga Pakubuwana III. Namun pada tahun 1749 Raden Bagus Konting Mertawijaya telah diangkat oleh Pakubuwana II menjadi Bupati dengan gelar Raden Adipati Yudanegara III.

Masa pemerintahannya sangat singkat hanya 6 tahun dan perjanjian Giyanti mengakhiri perang Mangkubumen. Perjanjian mengisyaratkan Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwana I sebagai sultan Mataram. Perjanjian ini mengakibatkan wilayah Banyumas masuk ke wilayah Surakarta dan sedangkan Raden Adipati Yudanegara III kemudian diangkat oleh Sultan Hamengkubuwana I sebagai patih Yogyakarta bergelar Patih Danureja I.

Masa pemerintahan Raden Adipati Yudanegara IV

Pengganti Yudanegara III adalah putra sulung dari ibu Nyai Mas Ajeng Kamasan yaitu Raden Bagus Nganten Gandakusuma bergelar Raden Adipati Yudanegara IV. Pengangkatan adipati diaksanakan setahun setelah perjanjian Giyanti. Dimana Perjanjian ini juga mulai mengatur pengangkatan adipati di seluruh wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Untuk pertama kalinya pengangkatan bupati di Banyumas membutuhkan surat penetapan (Besluit) dari Gubernur Jendral VOC Jacob Mossel di Batavia.

Dua tahun setalah perjanjian Giyanti ternyata pihak Pangeran Mas Said merasa dihianati oleh Hamengkubuwana I sehingga harus mengadakan perjanjian Salatiga yang mengisyaratkan berdirinya Kadipaten Mangkunegara dan menjadikannya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I sebagai Adipati pertamanya.

Bupati selanjutnya adalah Raden Tumenggung Toyakusuma atau Tumenggung Kemong dari lingkungan Mangkunegaran yang menjabat selama 8 tahun dan diberhentikan oleh Susuhunan Pakubuwana IV.

Masa pemerintahan Raden Adipati Yudanegara V

Waktu kecil bernama Raden Bagus Gondokusuma adalah bupati yang menjabat pada masa pemerintahan Inggris di Jawa dengan gubernur Jenderal *Sir Stamford Raffles* (1811 - 1816). Sebuah peristiwa menyebabkan Raden Adipati dipanggil ke Surakarta dan tidak diperkenankan kembali lagi ke Banyumas sebagai Bupati.

Peristiwa ini berawal mula ketika Raffles melakukan perjalanan ke Banyumas, Raden Adipati dengan sadar telah mengajukan permintaan kepadanya agar wilayah Banyumas bisa lepas dan berdiri sendiri dari Kasunanan Surakarta. Raffles berjanji untuk menyampaikan dan mempertimbangkannya dengan Susuhunan.

Dengan diberhentikannya Yudanegara V maka di Banyumas terjadi kekosongan bupati, dan ternyata Susuhunan tidak mengijinkan keturunan Raden Adipati untuk menjabat sebagai Bupati utama di Banyumas.

Susuhunan memecah Banyumas menjadi dua kepemimpinan yaitu Banyumas Kasepuhan dan Banyumas Kanoman yang masing-masing dipimpin oleh Wedana Bupati. Wedana Bupati Kesepuhan diangkatlah R. Ngabei Tjakrawedana dengan gelar Raden Tumenggung Tjakrawedana dan kemudian hari begelar Raden Adipati Tjakrawedana, yang tidak lain adalah menantu dari Yudanegara IV (ipar R. Ad. Yudanegara V) dan merupakan putra patih Kasunanan Surakarta R. Ad. Tjakranegara. Sedangkan Wedana Bupati Kanoman dijabat oleh Raden Adipati Bratadiningrat bergelar R Adipati Mertadiredja I yang merupakan cucu dari R. Tmg. Yudanegara III (Knj. Ad. Danuredjo I). Para Wedana Adipati ini membawahi beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang Tumenggung Kliwon.

Raden Adipati Tjakrawedana

Wilayah kekuasaan Wedana Kesepuhan adalah :

- Adiredja yang dipimpin oleh RT Dipayuda IV yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Anom di Purbalingga.
- Adipala yang dijabat oleh R. Ng. Kertapradja.
- Purwokerto yang dijabat oleh R. Ng. Tjokrodiredjo
- Sebagian kabupaten Panjer (Kebumen) dengan Tumenggung Kliwon R. Ng. Reksapradja
- Sebagian kabupaten Banjarnegara dengan Tumenggung Kliwon R. Ng Ranudiredjo

Raden Adipati Bratadiningrat

Wilayah kekuasaan Wedana kanoman adalah:

- Purbalingga dengan Tumenggung Kliwon RT Dipokusumo
- Sokaraja dengan Tumenggung Kliwon R Ng Kertadiredja

- Sebagian dengan Tumenggung Kliwon kabupaten Panjer (Kebumen)
- Sebagian dengan Tumenggung Kliwon kabupaten Banjarnegara

A. Banyumas di Masa Kolonial

Berakhirnya perang Jawa (*Java Oorlog*) dalam memerangi pangeran Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1930 ini membawa bencana bagi wilayah Banyumasan. Wilayah Banyumas menjadi wilayah yang tergadaikan karena kerugian pihak Belanda atas perang terhadap Pangeran Diponegoro dibebankan kepada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Wilayah Banyumas dan wilayah Kedu yang merupakan wilayah mananegari kilen (mancanegara barat) merupakan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta, diserahkan kepada pihak Belanda.

Maka sejak 1831 wilayah Banyumasan dijadikan karesidenan dengan ibukota di kota Banyumas, yang membawahi 5 kabupaten (Regentschaap) yaitu kabupaten Banyumas, kabupaten Ajibarang, kabupaten Dayohluhur, kabupaten Purbalingga dan kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banyumas berdiri sendiri dengan wilayah beberapa Kawedanan (distrik) diantaranya adalah Banyumas, Adireja dan Purwareja (Klampok). Sedangkan Wilayah kabupaten Ajibarang terdiri dari kawedanan Purwokerto, Ajibarang dan Jambu Jatilawang. Kabupaten Purbalingga membawahi kawedanan Purbalingga, Sokaraja, Kertanegara dan Cahyana (Bukateja). Kabupaten Banjarnegara membawahi kawedanan Banjar, Singamerta, Leksana, Karangkobar dan Batur. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Dayohluhur yang terdiri dari kawedanan Majenang, Dayohluhur, Pegadingan dan Jeruklegi.

Kabupaten Banyumas dengan bupati Raden Adipati Cakrawedana (dahulunya merupakan Wedana Adipati Kasepuhan banyumas) dan di dampingi Residen De Sturler sedangkan kabupaten Ajibarang bupati yang diangkat adalah Wedana Adipati Kanoman Banyumas Raden Adipati Bratadiningrat bergelar Raden Adipati Mertadiredja I dengan didampingi Asisten Residen Werkevisser. Kedua kabupaten inilah yang kelak akan bergabung menjadi satu menjadi kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas

Kepemimpinan Raden Adipati Cakrawedana hanya berlangsung sebentar karena pihak Kasunanan tidak berapa lama langsung memberhetikannya dan menggantikannya dengan Raden Ngabei Tjakradiredja dengan gelar Raden Adipati Cakranegara I atau *Kanjeng Rider* yang menjabat sejak tahun 1831 hingga tahun 1864. Pada masa jabatannya pabrik gula Kalibagor dibangun pada tahun 1839 dan bupati ikut mengalami blabur Banyumas pada tahun 1861. Pada tahun 1834 juga terjadi beberapa pergeseran wilayah dan penambahan wilayah di kabupaten Banyumas, distrik Adirejo sebagian sebelah barat masuk ke Kabupaten Dayohluhur dan sebagian sebelah timur menjadi distrik baru bernama distrik Kaliredja

(Sumpyuh). Sokaraja yang pada awalnya masuk ke kabupaten Banyumas masuk ke wilayah kabupaten Banyumas.

Bupati selanjutnya adalah Raden Adipati Cakranegara II yang menjabat dari tahun 1864 hingga mengundurkan diri pada tahun 1879 karena berbeda pendapat dengan residen Banyumas yang waktu itu dijabat oleh C de Klerk Moolenburg. Kesempatan ini digunakan oleh residen de Klerk untuk mengembalikan trah Banyumas ke kabupaten Banyumas atau mengembalikan kabupaten Banyumas kepada pemiliknya. Mertadiredja III yang sedang menjabat di kabupaten Purwokerto kemudian ditempatkan di Kabupaten Banyumas.

Pangeran Adipati Mertadiredja III menjabat di kabupaten Banyumas dari tahun 1879 hingga tahun 1913. Pada masa jabatannya Mertadiredja banyak sekali melakukan pembangunan dan banyak menyelesaikan masalah besar di wilayah kekuasaannya.\

- 10 April 1883 mendapatkan tanda kehormatan dari gubernur yaitu medali bintang Jene
- 4 November 1890 mendapatkan tanda kehormatan dari gubernur songsong jene
- 28 Agustus 1900 mendapatakan tanda kehormatan dari ratu Belanda yaitu Ridder Oranje Nassau
- 12 November 1900 mendapatkan gelar kehormatan dari gubernur yaitu gelar Aria sehingga menjadi Pangeran Adipati Aria Mertadiredja III
- 29 Agustur 1901 mendapatkan tanda kehormatan dari Ratu belanda menggantikan Ridder Oranje Nassau menjadi Officier Oranje Nassau. Penghargaan ini diberikan kepada bupati yang telah berjasa pada kontribusi wilayah internasional.
- 27 Agustus 1904 mendapatkan tanda kehormatan dari Ratu Belanda Ridder Nederlandsche Leeuw. Penghargaan ini diberikan oleh Ratu belanda karena jasanya yang sangat istimewa bagi masyarakat.
- 26 Agustus 1910 mendapatkan tanda kehormatan dari gubernur yaitu Pengeran Ngagem Songsong Gilap

Pada masanya juga telah dibangun sebuah jalur kereta api milik Staats Spoorwagon yang menghubungkan antara Yogyakarta (Tugu) dan Pelabuhan Cilacap yang melewati distrik Kalireja (Kalirejo) pada tahun 1886. Juga dibangun sebuah pabrik gula yang sangat modern di grumbul Klampok distrik Purwareja dengan nama *Suikerfabriek Klampok*. Sebuah pabrik gula yang dibangun pada tahun 1888 yang sangat membanggakan karena dijadikan sebuah pabrik percontohan dengan tenaga listrik dan peralatan yang moden dan efisien. Juga dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan kota Banyumas dan kota Sokaraja dan sebuah proyek besar transportasi modern Serajoedal Stoomtram Maatschapij (Kereta Uap Lembah Serayu) yang menghubungkan Maos - Purwokerto hingga Banjarnegara yang melewati distrik Purwareja pada tahun 1896.

Bupati selanjutnya adalah Raden Ngabei Gandasubrata bergelar Raden Adipati Gandasubrata yang merupakan putra dari Pangeran Adipati Aria Mertadiredja III. Bupati

Gandasubrata menjabat dari tahun 1913 hingga tahun 1933. Pada masa jabatannya bupati banyak melakukan perubahan sosial karena pada masa itulah politik etis sedang gencar-gencarnya di lakukan. Beberapa sekolah telah dibangun pada masanya yaitu sekolah angka 2 dan Holland Inlands School yang diperuntukan untuk kaum pribumi. Juga membangun sebuah perpustakaan untuk pribumi di depan pendopo kabupaten. Pada tahun 1933 terjadi sebuah krisis ekonomi dunia yang juga melanda wilayah kabupaten Banyumas dan Purwokerto. Krisis ini menyebabkan masa pageblug berkepanjangan namun justru bupati telah digantikan oleh Raden Adipati Aria Sudjiman Mertadireja Gandasubrata.

Pada awal pemerintahannya bupati Sudjiman sudah di uji dengan masalah pemulihan masa pageblug yang dianggap telah berhasil dengan beberapa program pelatihan keterampilan seperti pembuatan payung kertas di kalibagor, menenun di desa Kediri, Candinegara da Kalisari, prduksi genteng ada di Pancasan dan Mergasana. Produksi kerajinan bambu di desa Banjarsari dan perhiasan dari perak dan tembaga ada di Pasir.

Trasmigrasi yang pada masa Hindia Belanda disebut sebagai kolonisasi juga dilakukan oleh kabupaten Banyumas dengan mengirim banyak keluarga merantau ke Sumatra khususnya di profinsi lampung. Dan yang tidak kalah mencolok adalah kota Purwokerto telah memiliki jaringan listrik *Electriciteit Maatschappij Banjoemas* (EMB) yang berpusat di Ketenger.

Tahun 1936 dengan alasan untuk menghemat keuangan negara kabupaten Banyumas dan Purwokerto digabung menjadi satu dengan nama Kabupaten Banyumas dan beribukota di Purwokerto. Purwokerto merupakan pilihan yang tepat karena selama 40 tahun terakhir Purwokerto telah menjadi pusat ekonomi baru di wilayah karesidenan Banyumas dan memiliki potensi yang lebih baik lagi pada masa depannya.

Atas usul dari ayahnya Pendopo Sipanji yang menjadi simbol trah Banyumas harus dipindahkan menggantikan pendopo di kota Purwokerto yang kebetulan juga sudah mengalami banyak kerusakan. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 1936 telah dimulai pembongkaran dengan menggunakan jasa pemborong dan menggunakan dua truk yang disewa dari persewaan kendaraan Banyumas pada tanggal 6 November 1936 melalui jembatan Serayu dan Sokaraja.

Setelah pendopo Sipanji berhasil diboyong ke Purwokerto, masih banyak sekali perbaikan dan persiapan perpindahan bupati dari Banyumas. Sehingga perpindahan yang yang baru bisa dilaksanakan pada awal Maret 1937 yang juga bertepatan dengan pernikahan putri mahkota kerajaan Belanda Putri Juliana dan pangeran Bernhard.

Pada tahun yang sama pabrik gula Kalibagor sudah mulai beroperasi kembali setelah beberapa tahun selama masa Maleise tidak beroperasi. Setelah tahun sebelumnya pabrik gula Kalibagor telah mengusahakan menanam kembali tebu di lahan lama dan lahan milik pg Purwokerto, pg Bojong dan pg Klampok yang karena kerugiannya harus gulung tikar.

Kabupaten Purwokerto

Kabupaten Ajibarang hanya berumur satu tahun kemudian atas persetujuan asisten residen pusat pemerintahan dipindah ke sebuah grumbul Paguwan di barat desa Purwakerta dimana terdapat santri mengaji dan diatas sebuah telaga. Raden Adipati Raden Adipati Bratadiningrat yang bergelar Raden Adipati Mertadiredja I meninggal pada tahun 1831. kemudian Raden Adipati Bratadiredja dengan gelar Raden Adipati Martadiredja II menjadi bupati pertama kabupaten Purwokerto yang menjabat hingga meninggal pada tahun 1853. Harusnya akan digantikan oleh putranya yaitu Dikarena Pangeran Mertadiredja III masih berumur 12 tahun kemudian akhirnya digantikan oleh menantunya yaitu Raden Tumenggung Djajadiredja. Namun tidak berjalan lama Raden Tumenggung Djajadiredja mengalami depresi dan kemudian diasingkan ke Padang, hingga selama beberapa tahun kabupaten Purwokerto tidak tidak memiliki Bupati. Kangdjeng Pangeran Aria (PA) Mertadiredja III menjadi bupati Purwokerto yang ke tiga yang menjabat dari tahun 1860 hingga 1879. Tahun 1879 adalah masa yang sama dengan kekosongan bupati di kabupaten Banyumas sehingga Mertadiredja III dipindahkan ke kabupaten Banyumas.

Yang menjabat bupati selanjutnya adalah adik dari Raden Adipati Cakranegara II yaitu Raden Tumenggung Cakrasaputra yang menjabat dari tahun 1879 hingga 1882. Stelah terjadi kekosongan bupati selama dua tahun, kemudian pada tahun 1885 menjabatlah Raden Mas Tumenggung Cakrakusuma yang menjabat hingga tahun 1905. Pada masa inilah kabupaten Purwokerto terjadi banyak sekali pembangunan fisik diantaranya adalah Pembangunan pabrik gula Purwokerto dan pembangunan jalur kereta api SDS yang berpusat di kota Purwokerto. Pada masa jabatannya juga kota Purwokerto banyak membangun jalan raya berupa pelebaran dan pembangunan jembatan.

Pada tahun 1905 hingga tahun 1920 bupati Purwokerto yang menjabat adalah Raden Mas Cakranegara III yang merupakan adik dari RT Cakasaputra dan RAd Cakranegara II. Pada masa kepemimpinannya Purwokerto yang sudah memiliki sebuah stasiun SDS kemudian dibangun sebuah stasiun lagi milik SS yang dibangun pada tahun 1916. Setelah itu kabupaten Purwokerto kembali tidak memiliki bupati selama 4 tahun. Hingga tahun 1924 ditempatkanlah Raden Tumenggung Cokrosuroyo yang berasal dari Panorogo yang sama sekali tidak ada trah Banyumas.

Setelah itu kabupaten Purwokerto dan kabupaten Banyumas bergabung menjadi satu dengan nama kabupaten Banyumas dengan wilayah gabungan kabupaten Banyumas dan kabupaten Purwokerto pada tahun 1936. Distrik Purwareja kemudian dilepaskan dan digabungkan dengan kabupaten Banjarnegara hingga sekarang.

B. Banyumas di Masa Pendudukan Jepang

Peristiwa penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour merupakan titik penting dimana kemudian pemerintah Belanda kemudian melalui Gubernur Jenderal *Tjarda van Starckenborgh Stachouwer* mengumumkan perang terhadap Jepang. Setelah Pearl harbour kemudian Jepang juga menenggelamkan *"Princh of Wales"* kapal induk milik Inggris di laut Cina Selatan dan menguasai semenanjung Malaya dalam sehari. Sungguh peristiwa itu membuat pemerintah Belanda, masyarakat Eropa dan masyarakat Indonesia menjadi sangat khawatir, karena tinggal selangkah lagi Jepang masuk ke Hindia Belanda.

Bala bantuan sekutu mulai datang dari Australia di Cilacap, karena disana satu-satunya kota yang memiliki pelabuhan di selatan pulau Jawa. Pasukan Australia yang mendarat di Cilacap ditempatkan di Purwokerto. Dan arsip-arsip penting milik pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan dagang ditempatkan di beberapa gedung di Cilacap, Purwokerto, Sokaraja dan Purbalingga. Orang-orang Eropa dari segala penjuru kota-kota besar datang ke Purwokerto yang dekat dengan Cilacap untuk mengungsi. Sepanjang jalan kota Purwokerto penuh dengan mobil-mobil milik orang-orang Eropa yang sebagian besar merupakan orang-orang Belanda.

Residen J.W.A. Boots yang menjabat waktu itu juga mengungsikan keluarganya di sebuah rumah dokter Zending dengan tujuan untuk berlindung dibawah Palang Merah. Kekhawatiran residen Boots ini dipicu oleh sebuah kabar yang menginformasikan kekacauan di Tegal dan Pekalongan akibat munculnya desas desus terlihatnya kapan-kapal tentara Jepang di pantai utara pulau Jawa.

5 Maret 1942 terjadi kekacauan di kota Purwokerto setelah militer berusaha untuk mengamankan sebuah gudang beras di dekat stasiun Bantarsoka dan persediaan bahan bakar dan minyak tanah di gedung bekas pabrik gula Purwokerto dan pabrik gula Kalibagor. Namun karena kepanikan akhirnya masyarakat yang kelaparan kemudian menjarahnya. Di sisi lain pengungsi dari daerah Semarang, Magelang, Solo dan Jogja juga datang ke Purwokerto, mereka meninggalkan mobil-mobil mereka di jalan-jalan besar untuk pergi ke Cilacap atau ke Bandung dengan cepat.

Dua hari kemudian Purwokerto kembali kacau karena ternyata kota dan pelabuhan Cilacap telah diserang habis-habisan oleh jepang. Masyarakat sipil dan orang-orang Eropa datang kembali ke Purwokerto. Mereka menganggap bahwa kota Purwokerto masih relatif lebih aman dari Cilacap, meskipun sebenarnya beberapa gudang terlihat terbakar.

8 Maret 1942 pagi sebuah pesawat Jepang telah berputar-putar diatas kota Purwokerto sambil menyebarkan selebaran-selebaran propaganda yang mengatakan bahwa bangsa Jepang akan datang untuk menolong bangsa Indonesia. Masyarakat pun mulai bingung dengan yang terjadi akan berpihak pada Belanda yang selama ini memerintah mereka atau berpihak kepada Jepang yang kelak akan menolong mereka dari penjajahan. Kaum intelektual dan pegawai kabupaten telah berkumpul untuk mendengarkan siaran Radio yang

pada masa itu merupakan barang mahal dan satu-satunya media mengenai informasi berita perkembangan di pemerintahan pusat Batavia (Jakarta).

Pada hari yang sama juga melalui siaran radio pidato oleh letnan Ter Poorten bahwa pemerintah dan tentara pertahanan Hindia Belanda telah menyatakan menyerah tanpa syarat apapun kepada pihak Jepang dengan diakhiri dengan pemutaran lagu kebangsaaan Belanda Wilhelmus. Disisi lain tentara Jepang hari itu melalui telepon dari kabupaten Purbalingga bahwa Jepang telah menguasai Purbalingga dan dari arah Sumpyuh pasukan Jepang yang lain telah masuk ke Banyumas melewati Buntu.

Sesuai dengan resolusi Genewa, Bupati Sudjiman Mertadiredja Gandasoebrata kemudian membentuk panitia kecil untuk menyambut tentra Jepang yang diketuai oleh patih R. Kabul Prawiradirja, sekertaris Muhammad Mulyo, mantri kabupaten M. Sudarmadi dan beberapa pegawai praja. Tentara Jepang datang pada pukul 10 malam ke pendopo kabupaten dengan disambut oleh ketua panitia, bupati dan residen. Hotel SDS (sekarang kantor DAOP V) adalah saksi bisu serah terima daerah Banyumas kepada Jepang, dimana pihak daerah Karesidenan Banyumas dan Pekalongan dibawah pemerintahan Kolonel Sato dengan dibantu oleh komandan militer Mayor Yosi dan kepala Polisi tentara adalah Letenant kelas 1 Kato.

Pasukan Belanda yang melakukan bumi hangus dan perusakan jembatan-jembatan sepanjang sungai Serayu akhirnya menyerah dan di mobilisasi oleh Jepang ke Cilacap, sedangkan tentara Australia yang baru didatangkan ke Purwokerto segera di internir di gedung MULO (SMA 2 Purwokerto). Baru akhir bulan Maret 1942 orang-orang Belanda dan Indo di internir di Broederschool (Bruderan) termasuk diantaranya adalah residen Boots dan asisten residen Purwokerto de Klerk.

Berturut-turut kemudian datang petinggi Jepang bernama Leutenant Kolonel Horie mengumpulkan seluruh pegawai Negeri hingga asisten Wedana seluruh karesidenan Banyumas didatangkan untuk mendapatkan penjelasan bahwa pemerintah Jepang secepatnya akan membuat pemerintahan sipil dengan pusat di kota Bandung. Selanjutnya terbit juga undang-undang Balatentara Jepang yang disebut sebagai *Osamu Seirei* yang mengawali berjalannya kembali fungsi pemerintahan seperti sebelumnya. Istilah-istilah pemerintahan yang berlaku di masa Hindia Belanda diganti dengan istilah Jepang. Karesidenan menjadi *Syu* yang dipimpin oleh *Syutyo*, kabupaten diganti menjadi *Ken* dan bupati memakai istilah *Kentyo, Regenstschapraad* di ganti sebuah kantor yang dipimpin oleh *Syutyokan* yang bekerja langsung dibawah *Saikosikikan. Kawedanan menjadi Gun, Onder Distrik* atau kecamatan menjadi *Son* dan *Ku* menggantikan Desa atau kelurahan. Pemerintah Jepang juga memperkenalkan *Tonarigumi* dan *Azzazyokai* yang pada awalnya digunakan untuk melakukan kontrol pada lingkungan masyarakat paling bawah, yang sekarang kita kenal dengan Istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Tujuan utama Jepang menguasai Indonesia hanya untuk memanfaatkan keuntungan terhadap sumber daya alam dan manusia terlihat dari apa yang diberlakukan. Tujuan utamanya dalah menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan perang terhadap Sekutu. Pemuda berumur 18 hingga 25 tahun akan dilatih kemiliteran *Seinendan* dan pemuda berumur 25 hingga 36 dilatih *keibondan*. Gerakan ini merupakan langkah awal mempersiapkan pemuda Indonesia untuk dijadikan prajurit cadangan dalam perang Jepang nantinya.

Jepang juga mewajibkan semua masyarakat bisa berbudaya Jepang dan berbahasa Jepang. Guru-guru laki-laki dan perempuan pribumi di kirim ke Jakarta (sebelumnya Batavia) untuk berlatih bahasa Nipon, Olahraga, Budi pekerti, adat istiadat dan lain sebagainya yang nantinya akan diajarkan kepada pelajar seluruh Indonesia. Sehingga dalam waktu 6 bulan saja masyarakat telah bangsa Indonesia telah berganti sikap dan sifat.

Disaat perang pasifik berkecamuk, tentara Jepang banyak membutuhkan sokongan bahan makanan dan bahan logam untuk mendukung perang mereka. Pertanian-pertanian menggunakan cara Jepang untuk melipat gandakan hasil pertanian. Agar padi selalu tersedia untuk tentara yang sedang berperang. Kejadian ini mengakibatkan masyarakat Banyumas justru menderita kelaparan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah kelaparan pada masa *Maleise* antara tahun 1933 - 1936 di Kabupaten Banyumas.

Untuk mendukung pengairan pada sawah-sawah yang sedang di maksimalkan produksinya, Jepang membangun selokan Banjaran dari desa Pegalongan ke desa Sokawera dan pembuatan irigasi di jatilawang menggunakan sungai Tajum di desa Tipar Kidul. Masyarakat juga diharuskan untuk menanam Jarak dan kapas, meski sebenarnya tanaman kapas tidak cocok ditanam di daerah Banyumas. Pabrik gula Kalibagor yang biasanya menggiling tebu disulap menjadi pabrik minyak jarak yang akan digunakan sebagai bahan bakar pesawat.

Propaganda Jepang dalam kebutuhannya menyediakan tentara perang selalu menggunakan kata-kata pasukan sukarela pembela tanah air, sehingga perekrutan pemuda untuk dijadikan PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) berjalan dengan sukses di Banyumas, banyak guru dan polisi yang bergabung menjadi tentara. Selain itu Jepang juga membuat pasukan cadangan yang disebut sebagai *HEIHO.*

Perang di benua Eropa telah berhasil dihentikan setelah kekalahan Jerman dengan ditandatanganinya instrumen penyerahan diri pada 8 Mei 1945, Sekutu juga telah menawarkan kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat, namun Jepang menolaknya. Sehingga perang Pasifik yang juga menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan tetap berlangsung.

Pada tanggal 26 Juli 1945 melalui Deklarasi Posdam bersama Amerika, Inggris dan RRC namun Jepang tetap mengabaikan ajakan perdamaian tersebut. Sehingga kemudian Sekutu

menjatuhkan bom atom uranium dengan kode *Litlle Boy* menggunakan pesawat *B-29 Enola Gay* di kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian menjatuhkan bom *plutonium* berkode *Fat Man* dijatuhkan di kota Nagasaki. Ini sebuah pukulan hebat bagi Jepang karena dalam waktu lima hari sekitar kurang lebih 250.000 penduduk Jepang kehilangan nyawanya.

Di Jakarta kabar tentang kekalahan Jepang sudah tersiar kamana-mana, namun rupanya tentara-tentara Jepang yang berada di Pedalaman mereka belum mendapatkan kabar dan berniat menarik pasukannya.

C. Banyumas di Era Kemerdekaan

17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan berita mengenai kemerdekaan ini sangat terlambat sekali diterima oleh pemerintahan di kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, mengenai keadaan bangsa maka berangkatlah Iskaq Cokroadisuryo ke Jakarta. Pemerintah jepang di Jakarta juga sedang menunggu kedatangan pasukan Sekutu yang akan menggantikan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Sepulangnya dari Jakarta Iskaq Cokroadisuryo mengadakan rapat dengan bupati terkait dengan masa depan Banyumas. Kemudian mereka datang ke markas tentara Jepang di gedung Karesidenan di Purwokerto dan di sambut oleh *Iwashige (*kepala urusan Pangereh Praja Karesidenan era Jepang). Rupanya informasi mengenai kekalahan Jepang sudah sampai ke telinga petinggi-petinggi Jepang di Banyumas dan kemudian suasana kunjungan mejadi sangat mengharukan. Mereka merasa Jepang tidak kalah namun menghindari kehancuran yang lebih banyak maka Jepang harus menyerah. Dan pengalihan pemerintahan di daerah akan dilakukan secara bertahap sesuai instruksi dari pusat.

Pemimpin Jepang di Banyumas bisa bekerjasama dengan pemerintah pribumi, sehingga penyerahan kekuasaan, senjata dan penarikan tentara Jepang bisa dilakukan dengan aman. Keadaan ini juga didukung oleh para pemuda yang mau bekerjasama dengan Pamong Praja, Polisi dan tentara Peta untuk menciptakan ketenangan dan perdamaian di wilayah Banyumas.

Disisi lain orang-orang Belanda dan Indo mulai dikembalikan dari Interniran ke tempat asalnya. Melihat arak-arakan masyarakat Banyumas yang bersenjata berbaris rapi menuju ke kantor Sutyokan-kantei (kantor residen di Purwokerto). Arak-arakan ini diawali oleh Iskaq Cokroadisuryo dan bupati-bupati sekaresidenan Banyumas. Rupanya pelatihan kedisiplinan dan militer yang telah di ajarkan oleh tentara Jepang bisa berguna pada kemudian hari.

Kantor Residen dikembalikan ke pribumi dan Pemimpin Jepang kembali ke rumah administratur pabrik gula Purwokerto. Tentara Jepang kemudian di kumpulkan menjadi satu di gedung karesidenan dan tangsi PETA (sekarang Asrama Wijayakusuma Banyumas). Dan

karena kekacauan antara orang-orang Belanda yang sudah kembali ke rumahnya maka, orang-orang Belanda kembali di internir oleh pemuda Banyumas yang letaknya berada di gedung Zusters Zursulinen (sekarang SMP Susteran), menempati hotel Van de Beek dan bekas rumah pegawai pabrik gula Purwokerto (sekarang ruko ex Kodim).

Setelah rapat IKADA di Jakarta yang mengisyaratkan akan adanya pengambil-alihan wilayah Indonesia oleh Sekutu yang membentuk AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atau pasukan aliansi untuk Hindia Belanda yang bertugas untuk mengurus serah terima penyerahan Indonesia dari Jepang ke Sekutu dan memulangkan tentara Jepang. Namun juga agenda untuk memberikan keamanan bagi Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Kesempatan ini segeralah dibentuk Tentara Keamanan Rakyat yang rata-rata merupakan bekas tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dengan sukarela telah berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945.

TKR di wilayah Banyumas dibentuklah Divisi V Banyumas yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang membawahi beberapa resimen diantaranya adalah Resimen Pekalongan, Resimen Tegal, Resimen Temanggung, Resimen Purworejo, Resimen Magelang dan Resimen Purwokerto yang di pimpin oleh Letkol Isdiman.

Resimen Purwokerto terbagi menjadi dua yaitu Resimen I Purwokerto sendiri dan Resimen II Cilacap.

1. Resimen 1 Purwokerto dipimpin oleh Letkol Isdiman

a) Bataliyon I Purwokerto dipimpin oleh Mayor Imam Androgi
b) Bataliyon II Purwokerto dipimpin oleh Mayor Suriawan
c) Bataliyon III Purbalingga dipimpin oleh Mayor Suprapto
d) Bataliyon IV Banjarnegara dipimpin oleh Mayor S. Taram

2. Resimen II Cilacap dipimpin oleh Letkol Moch. Bachrun

a) Bataliyon I Cilacap dipimpin oleh Mayor Sugeng Tirtosiswoyo
b) Bataliyon II Sumpyuh dipimpin oleh Mayor Sundjono
c) Bataliyon III Banyumas dipimpin oleh Mayor Wais
d) Bataliyon IV Cilacap dipimpin oleh Mayor Brotosewoyo

Pada Januari 1946 BKR berubah menjadi TRI dan terjadi perubahan dimana Divisi V berubah menjadi Divisi II Sunan Gunung Jati yang meliputi:

1. Resimen 12 Cirebon
2. Resimen 13 Tegal
3. Resimen 15 Cilacap
4. Resimen 16 Purwokerto

Mengingat tentara Sekutu yang datang sebagai ancaman banyak elemen masyarakat kemudian bersatu dan ikut menjadi pasukan militer. Pendidikan baris-berbaris dan disiplin militer yang pernah di terapkan pada masa Jepang telah mengobarkan semangat mereka.

Salah satu yang paling membanggakan dari kota Purwokerto adalah dibentuknya Pasukan Pelajar IMAM (Indonesia Merdeka Atau Mati) pada 20 Desember 1945 oleh para pelajar kelas 3 SMP (ex MULO) bernama Suparto, Suwarsono, Djahidin dan Sugiartono. Pasukan ini mendapat restu dari persatuan guru SMP dan BKR yang berpusat di jl. Yosodomo. Pasukan Pelajar IMAM dipimpin oleh Suparto yang berjumlah anggota 40an siswa bertugas membantu BKR untuk menciptakan keamanan dan melucuti persenjataan Jepang.

Pembentukan pasukan pelajar IMAM dan pasukan pelajar di seluruh negeri kemudian meningkatkan semangat para kaum pelajar di Purwokerto yang kemudian dibentuk Pasukan Pelajar Purwokerto ex BE XVII Tentara Pelajar CIE Purwokerto yang dipimpin oleh Entjoeng Abdoelah Sadjadi.

Pada awal kemerdekaan keadaan serba sulit, karena pemerintahan yang baru belum mengatur pemerintahan secara sempurna meskipun kabinet sudah dibentuk. Undang-undang Jepang sudah sama sekali tidak bisa di terima sedangkan undang-undang yang dibuat oleh Belanda juga sudah tidak bisa dipakai lagi.

Undang-undang yang baru yang pertama kali dibuat oleh Komite Nasional Indonesia hanya mengatur garis-garis besar pemerintahan Republik Indonesia belum mengatur secara detail sampai ke tingkat daerah. Di Banyumas kemudian dibentuklah Komite Nasional Daerah Banyumas tingkat Karesidenan pada bulan Desember 1945 dibentuk oleh Residen Iskaq Cokroadisurya. Sedangkan KND tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh bupati Sujiman Mertadireja Gandasubrata ini nantinya berfungsi sebagai badan Legislatif Kabupaten untuk merancang undang-undang dengan ketua seorang bupati. Hak wanita yang selama ini tidak diperhitungkan pada masa yang sebelumnya, maka pada masa itu mulai dipertimbangkan untuk masuk KND wilayah Karesidenan.

Segala bentuk peraturan berbau peninggalan feodal Belanda sebisa mungkin dirubah dan dihapus. Perubahan dilakukan hingga tingkat desa seperti budaya pemilihan lurah, lumbung dan bank desa, ronda desa, pembagian tanah pekulen, dan dijadikannya tanah-tanah perdikan menjadi desa biasa. Masalah ini kemudian akan dipecahkan oleh Badan Pekerja yang merupakan perwakilan dari KND.

Tidak semua bentuk warisan Hindia Belanda bisa dirubah secara langsung seperti keberadaan Provinsi, Karesidenan, Kabupaten, Kawedanan, Kecamatan, Desa, RW dan RW telah menjadi bentuk permanen bentuk pemerintahan Hindia Belanda dan peninggalan Jepang. KND yang dibentuk Karesidenan dan KND Kabupaten pun menjadi riskan dalam pelaksanaannya, kedua badan tersebut bahkan bersaing dan saling klaim dalam pelaksanaan keputusan.

Keputusan menghilangkan sama sekali produk feodal menjadi pekerjaan yang sangat berat. Terutama dihapuskannya pemilihan kepada desa dengan sistem lama, penghapusan jabatan demang dan beberapa jabatan yang dilakukan secara turun-temurun menyebabkan

banyaknya kepala desa dan jabatan-jabatan penting lainnya di jabat oleh orang yang tidak kompeten. Ini menjadi masalah yang berat kerena bergesernya nilai sosial terhadap kaum priyayi yang pada masa sebelumnya memiliki prioritas dan pada masa kemerdekaan mereka mendapat hambatan.

Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Sekutu mengalami jalan buntu, karena ternyata Sekutu merupakan kepanjangan tangan dari kerajaan Belanda. Sehingga pada masa yang genting pusat pemerintahan di Jakarta kemudian dipindahkan ke Yogyakarta. Kementrian Dalam Negeri dipindahkan ke kota Purwokerto yang menyebabkan kebanyakan hotel, pasanggrahan dan perumahan-perumahan bekas pabrik gula Purwokerto dan Kalibagor dijadikan kantor dan penginapan darurat.

Kembalinya bangsa Belanda dengan fasilitas Sekutu dan perundingan-perundingan yang tidak menghasilkan kata sepakat menjadi isyarat kalau Kerajaan Belanda masih belum merelakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menghadapi kebuntuan-kebuntuan perundingan pihak TRI terus berbenah diri dengan melakukan pelatihan-pelatihan perang, yang juga diikuti oleh latihan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk pasukan Hisbulah, pasukan Sabililah dan Pesindo.

Perundingan Linggarjati pada 15 November 1946 dan disetujui pada 25 Maret 1947 merupakan yang sangat merugikan pihak Indonesia, namun ini dilakukan untuk menghindari perang fisik dengan tentara Belanda. Sementara pasukan BKR pada bulan Juni 1947 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dimana merupakan gabungan juga kesatuan polisi, pasukan KNIL dan pemuda-pemuda yang ingin ikut mempertahankan Republik Indonesia. TRI juga bagian dari POPDA sebuah kepanitiaan untuk mengembalikan bangsa Jepang dan Asing, sebuah pekerjaan berat yang harus dipikul.

Pada 20 Juli 1947 Van Mook telah memulai melanggar hasil perundingan Linggarjati dengan melaksanakan Agresi Militer I (Politionele Acties). Pasukan Belanda masuk ke daerah Banyumas melalui timur gunung Slamet. Kota Bobotsari yang pertama sekali dikuasi oleh pihak Belanda kemudian Purbalingga dan Purwokerto.

Wilayah Banyumas juga pernah masuk ke wilayah Belanda pada perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan yang menghasilkan pembagian wilayah Belanda dan Indonesia, yang dibatasi oleh sebuah garis Van Mook.

Pada bulan April 1951 Tentara Pelajar dan Pasukan Pelajar Imam telah dimobilisasi kembali kedaerah masing masing untuk kebali ke bangku Sekolah. Pasukan yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa dikembalikan ke orang tua mereka dan kembali bersekolah.

R. Ario Sapangat Kartanegara (1948 - 1950)

Setelah berakhirnya masa pemerintahan bupati tiga jaman RAA. Sujiman Gandasubrata (1933 - 1948) diangkatlah bupati pada masa pendudukan Belanda di Purwokerto yang menjabat hanya selama 2 tahun.

Moh. Kabul Purwodireja (1950 - 1953)

Baturraden yang sudah mulai dikenal sejak masa Hindia Belanda menarik banyak orang-orang Belanda untuk tinggal dan melakukan usaha di sekitar Baturraden. Bahkan pembangunan pertama kawasan wisata Baturraden melibatkan sebuah perusahaan multi nasional N.V. Ko Lie milik keluarga letnan Tionghoa Kho Han Tiong dan keluarga yang berkantor di Sokaraja.

Setelah Banyumas telah banyak mengalami masa-masa yang sulit pada tahun 1952 telah memulai babak baru mengenai keadaan di Banyumas. Baturraden yang selama ini menjadi primadona wisata orang-orang Eropa mulai dipikarkan kembali untuk dibangun dan dikembangkan. Bupati Moh. Kabul Purwodireja kemudian menemui beberapa pihak seperti Patih R. Soebagijo, Wedana Purwokerto M Soedjadi, sekertaris kabupaten Soeroso, staf Bupati R. Soeyadi, Martosoewito kepala jawatan Penerangan dan Lie Po Yoe anggota DPR pusat. Pertemuan-pertemuan itu memutuskan untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan obyek wisata Baturraden secara bertahap.

Pada masa pemerintahan bupati Moh. Kabul Purwodireja masih berlaku perjanjian KMB (Konfrensi Meja Bundar) yang sangat merugikan bangsa Indonesia, karena kemajuan dan kesejahteraan bangsa dipertaruhkan sedangkan bangsa-bangsa Imperialis lebih banyak mengambil keuntungan dan memiliki kesempatan untuk menyusun kekuatannya kembali. Sehingga selama berlakunya perjanjian KMB telah banyak bukti-bukti yang mengarah pada ketidakadilan dan jauh dari kata merdeka, berdaulat dan adil. Maka dari itu pada tanggal 1 Mei 1953 terjadi Rapat Raksasa di alun-alun kota Banyumas yang menyerukan tuntutan pembatalan Perjanjian Meja Bundar. Rapat yang berlangsung dari jam 9 hingga 10.30 ini dihadiri oleh sekitar 2500 orang.

RE. Budiman (1954 - 1957)

Masa bupati RE Budiman meneruskan apa yang sudah dilakukan bupati sebelumnya. Pada tahun 1955 diberlakukan pemilu pertama yang diikuti oleh 29 partai dan juga peserta independen (perseorangan). Partai politik yang mengikuti antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, PSI, Partai Katolik dan IPKI. Multi partai yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 mengenai sistem multi partai.

M. Mirun Prawiradireja (30 Januari 1957 - 15 Desember 1957)

Merupakan bupati tersingkat yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyumas dan merupakan bupati terakhir kabupaten Banyumas pada masa Indonesia menganut sistem liberal.

R. Bayu Nuntoro (15 Desember 1957 - 1960)

Atas krisis dan kekacauan yang terjadi di masyarakat Indonesia pada tanggal 21 Februari 1947, Presiden Soekarno melahirkan sistem "Demokrasi Terpimpin" . Sistem ini merupakan sistem tidak tetap yang diberlakukan presiden Sukarno untuk mengatasi krisis di Indonesia sejak masa revolusi.

R. Subagyo (1960 - 1966)

Tahun ketiga masa masa jabatannya presiden Soekarno telah mengijinkan berdirinya sebuah Universitas Negeri di kota Purwokerto. Sebelumnya sebenarnya telah berdiri sebuah Fakultas Pertanian rintisan oleh Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian melalui kepres no 195 tahun 1963 berdirilah Universitas Negeri Purwokerto dengan nama “Universitas Djendral Sudirman”. Ada 3 fakultas yang di buka antara lain adalah Fakultas Pertanian (awalnya milik UNDIP), fakultas Biologi dan fakultas Ekonomi. Keputusan presiden ini ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 23 September 1963.

Pada masa jabatanya, Wisata Alam Baturraden juga telah menjadi penyumbang pendapatan daerh terbesar. Korem 071 Wijayakusuma telah menginisiasi pembangunan sebuah wisma Kartika Nirwana dengan pemandian air panas yang sederhana. Pemandian air panas ini mengambil air panas dengan kandungan Belerang dari Pancuran Telu.

Letkol Inf. Soekarno Agung (1966 - 1971)

Pada era kepemimpinannya pembiayaan daerah telah menggunakan dana APBD. Mengingat wisata alam Baturraden telah banyak menyumbangkan pendapatan daerah, maka pada masa bupati Letkol Inf. Soekarno Agung meneruskan pembangunan dengan serius wisata Baturraden dengan membentuk kepanitiaan penggalangan dana “Panitia Pariwisata Kabupaten Banyumas” yang diketuai oleh Mayor Inf. Darsono. Penggalangan dana yang dilakukan adalah antara lain penyelenggaraan LOTDA (Lotto Daerah) yang menghasilkan modal utama pembangunan wisata alam Baturraden.

Setelah menyelesaikan pembangunan yang pertama dengan sukses pada bulan Mei 1971 wisata alam Baturraden dikembalikan wewenangnya pada Bupati Banyumas. Pembangunan pertama yang dilaksanakan adalah pembangunan kolam renang air dingin, taman bunga,

lapangan tenis, perluasan lahan dan perbaikan jembatan merah yang melintas diatas sungai yang dibangun oleh NV Ko Lie.

Wisata Alam Baturraden pada tahun 1974 telah banyak sekali menyumbang pendapatan daerah dan kemudian untuk membuat lebih menarik pemerintah daerah memberi nama "Lokawisata Baturraden".

Pada tahun 1981 lapangan tenis dibongkar untuk pembangunan terminal II Baturraden dan di gantikan dengan dua lapangan tenis dengan lahan yang lebih besar yang dibangun di desa Kemutug Lor.

Kol. Inf. Poedjadi Jaringbandayuda (1971 - 1978)

Pada masa ini bupati membangun kembali pendopo di kecamatan Banyumas yang merupakan bekas pendopo kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 41 tahun kehilangan pendoponya. Pendopo asli telah dipindahkan ke kota Purwokerto menggantikan pendopo pendopo yang sudah ada pada tahun 1937.

Bupati Kolonel Infantri R.G. Roedjito (1978 - 1988)

Kota Purwokerto yang berkembang pesat pada tahun 1978 diusulkan untuk menjadi kota Administratif oleh bupati tingkat II Banyumas R.G.Roedjito dengan surat No.Pem.B.76/528/1879 yang ditujukan pada DPRD kabupaten dati II Banyumas. Gayung bersambut setahun kemudian melalui surat keputusan DPRD no 3/3/I/DPRD/80 bertanggal 10 Juni 1980 DPRD telah menyetujui peningkatan status kota Purwokerto menjadi kota Administratif.

Pelaksanaannya baru terbit peraturan pemerintah tahun 1982 dan kemudian diresmikan pada tanggal 15 Januari 1983 oleh Menteri Dalam Negeri Let. Jen. Purn. Soedarmono S.H. bersamaan dengan Kota Administratif Cilacap. Walikota Administratif Purwokerto dijabat oleh R. Soediro B.A.

Luasan wilayah Kota Administratif Purwokerto adalah seluas 3.873.482 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 177.475 jiwa dengan kepadatan 2.365 jiwa per km^2. Meski luasan Kota Administratif setara dengan kotamadya yang dipimpin oleh seorang Walikota yang setara dengan jabatan Bupati, pemimpin Kota Administratif dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Meningkatnya status menjadi Kota Administratif juga meningkatkan 27 desa disekitar kota menjadi kelurahan. 20 kelurahan dalam kota (4 kecamatan dalam kota Purwokerto) dan 6 kelurahan lainnya terdiri dari 4 kelurahan masuk kecamatan Baturraden, 2 kelurahan masuk kecamatan Karanglewas dan 1 Kelurahan di kecaatan Kedungbanteng. Peningkatan ini juga mengangkat sebanyak 7 perangkat desa mejadi pegawai negeri sipil dari 27 desa yang ditingkatkan menjadi kelurahan.

Di akhir masa jabatannya bupati R.G. Roedjito telah membentuk tim untuk meneliti hari jadi kabupaten Banyumas. Tim yang terdiri dari anggota DPRD II Kabupaten Banyumas dan ahli dari balai Arkeologi Nasional Drs. M.M. Soekarto K. Atmodjo dan kawan-kawan menyepakati bahwa hari lahir kabupaten Banyumas jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 atau dalam penanggalan hijriah jatuh pada tanggal 12 Robiulawal 990 Hijriah. Penelitian hari jadi kabupaten Banyumas ini menarik kesimpulan bahwa menghadapnya Jaka Kaiman menemui raja Pajang bertepatan pada hari raya grebeg adalah sekaligus penobatan Jaka Kaiman sebagai bupati menggantikan mertuanya.

Kol. Inf. Djoko Sudantoko, S.Sos. (1988 - 1998)

Bupati yang terkenal dengan tekad “Tan keno Ora” merupakan bupati yang tidak mengenal kata tidak. Jasa-jasanya dalam pembangunan kota adalah pelebaran jalan utama kota Purwokerto jl Jendral Sudirman dan pembangunan sarana olahraga Gelora Olah Raga Satria Purwokerto.

Kol. Art. HM. Aris Setiono, SH, S.IP (1998 - 2008)

Bupati HM. Aris Setiono merupakan bupati ke 30 yang mengakhiri masa pengendalian Pamen TNI di kabupaten Banyumas yang sudah berlangsung sejak tahun 1966. Kabupaten Banyumas dianggap secara politis dan geografis sebagai daerah rawan yang perlu untuk dikendalikan oleh militer.

Drs. H. Marjoko, M.M (2008 - 2013)

Bupati H. Marjoko merupakan bupati yang menginginkan banyak investasi masuk ke kabupaten Banyumas. Namun sekaligus sebagai bupati kontroversi yang dalam 3 bulan masa menjabatnya telah membongkar alun-alun kota Purwokerto dan menghilangkan jalan tengah yang telah menjadi cagar budaya dan kebanggaan masyarakat Banyumas. Bupati juga telah membangun sumur ditengah-tengah gedung kecamatan bekas kantor bupati masa Hindia Belanda yang sudah masuk daftar infentaris Cagar Budaya kabupaten Banyumas.

Ir. H. Achmad Husein (2013 - Sekarang)

Bupati Achmad Husein banyak sekali membangun untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Banyumas. Pada tahun 2021 ditengah-tengah masa pandemi bupati mencanangkan kota Banyumas sebagai kota wisata minat khusus.

Sistem Residen

Pembentukan sistem wilayah karesidenan yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dipakai pada masa Jepang dan pada masa setelah kemerdekaan sistem ini tidak

serta-merta dihilangkan. Sistem ini masih berlaku hingga akhirnya dihilangkan karena efisiensi dan kemudahan komunikasi dari Gubernur ke Bupati. Berikut adalah urutan pejabat residen setelah masa kemerdekaan dan jabatan setara residen.

a) Mr. R. Iskaq Tjokrodisoerjo 1945 - 1947
b) R. Soedjiman Gandasoebrata 1949 - 1952
c) R. Soemardjito 1957 - 1963
d) R. Soebagjo (Pembantu/Penghubung. Gubernur) 1965 - 1967
e) R. Soetarmo Atmodiprodjo, SH (Pembantu/Penghubung. Gubernur) 1967 - 1972
f) R. Soebrata Joedabrata (Pembantu/Penghubung. Gubernur) 1972 - 1974
g) R. M. Soehardjo Soerjopranoto (Pembantu Gubernur) 1974 - 1977
h) Drs. R. Karsono Kramadiridja (Pembantu Gubernur) 1977 - 1980
i) Drs. H Iswarto (Pembantu Gubernur) 1980 - 1983
j) Drs. Soejitno (Pembantu Gubernur) 1983 - 1989
k) Soewarno Joardowo SH (Pembantu Gubernur) 1989 - 1992
l) Drs. Soedarno Kartodihardjo (Pembantu Gubernur) 1992 - 1998
m) Drs. H Sri Soebagjo (Pembantu Gubernur) 1998 - 2000
n) Drs. H. R. Soenardi (KA Bakorlin) 2000 - 2002
o) Mahfudh, SH (KA Bakorlin) 2002 - 2003
p) Drs. Tjipto Hartono (KA Bakorlin Wil III) 2004 -2006
q) Ir. Soekarno, MP (KA Bakorlin Wil III) 2007 - 2008
r) Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd (KA Bakorlin Wil III) Februari - 12 Juni 2008 (KA Bakorwil III) 12 Juni 2008 - 31 Maret 2009

CITRA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM ARSIP

Geografis

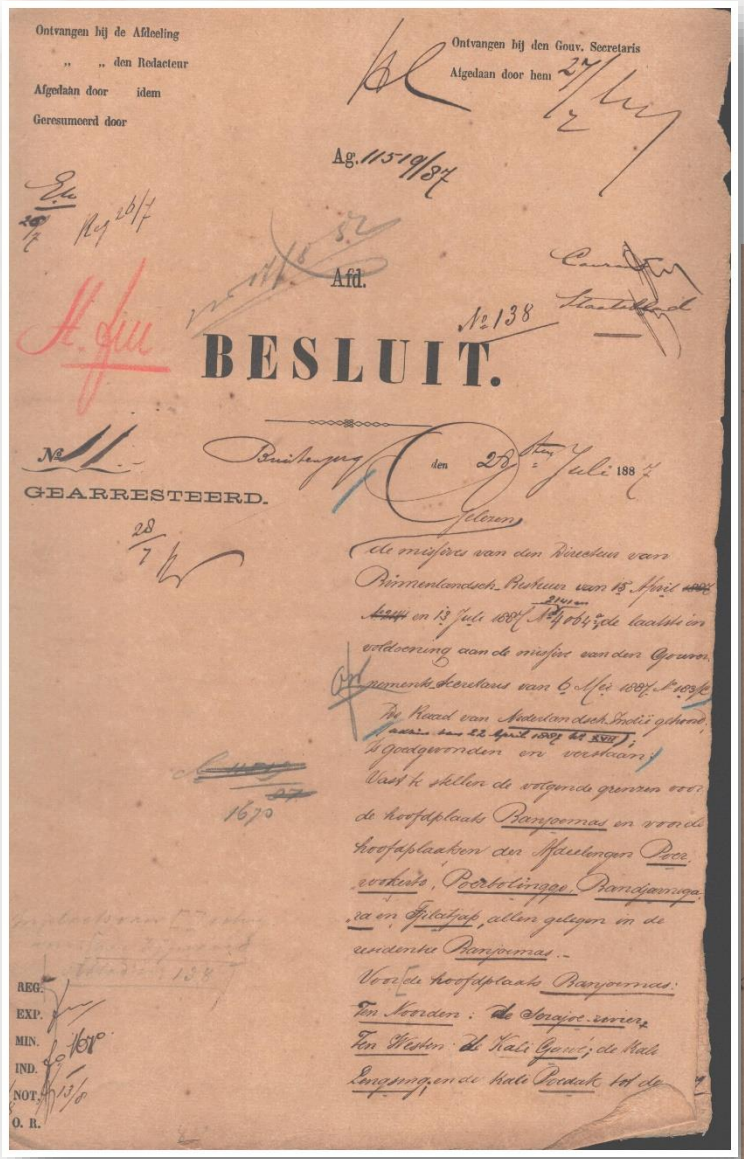

Ontvangen bij de Afdeeling
„ „ den Redacteur
Afgedaan door idem
Geresumeerd door

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
Afgedaan door hem

Ag. 115-19/87

Afd.

Nº 138

BESLUIT.

Buitenzorg den 28 Juli 1887

GEARRESTEERD.

Gelezen
de missive van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 15 April en 13 Juli 1887 Binnen. Nº 1084 de laatste in voldoening aan de missive van den Gouvernementssecretaris van 6 Mei 1887 Nº 103/k.

Het Raad van Administratie van Ned. Indië gehoord, (aan zijne zitting van 22 April 1887 Nº XXII);

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats Banjoemas en voorts hoofdplaatsen der Afdelingen Poerwokerto, Poerbolinggo, Banjoenegara en Ajibarang, allen gelegen in de residentie Banjoemas.

Voor de hoofdplaats Banjoemas:
Ten Noorden: de Serajoe-rivier.
Ten Westen: de Kali Gawé; de Kali Lengmangan en de kali Pedaik tot de

REG.
EXP.
MIN.
IND.
NOT.
O. R.

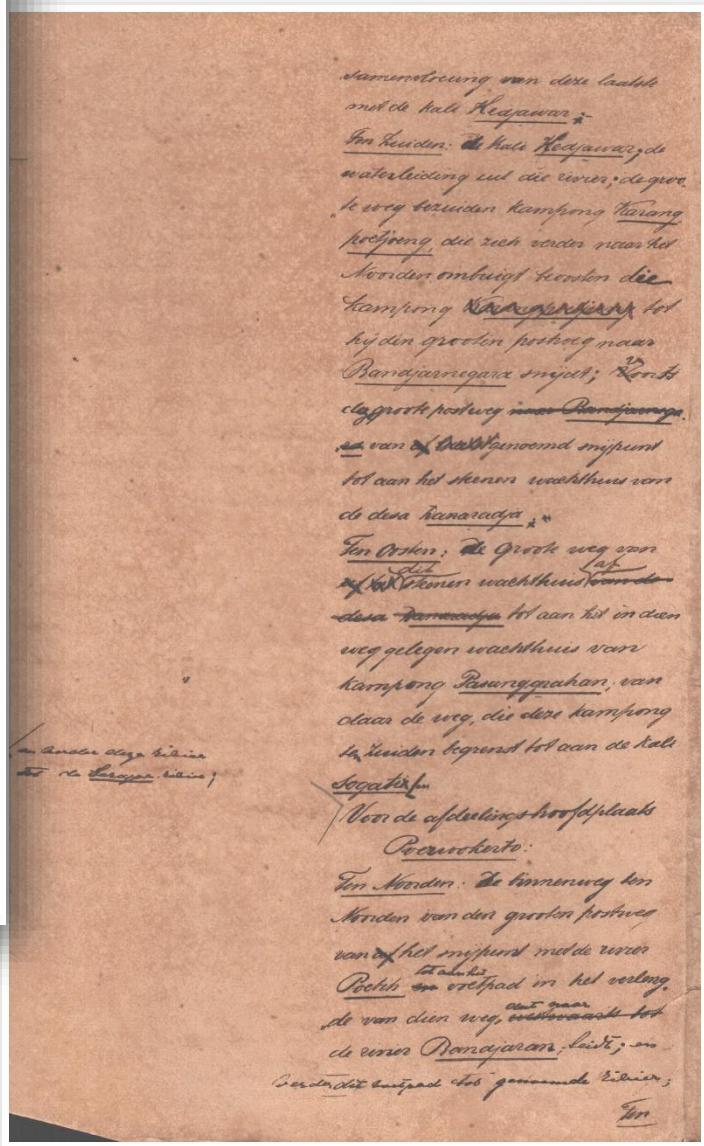

samenloeiing van deze laatste met de kali Kedjawar;
Ten Zuiden: de kali Kedjawar, de waterleiding uit die rivier; de grote weg tusschen kampong Karangkedjeng die zich verder naar het Noorden ombuigt tusschen die kampong ~~Karangkedjeng~~ tot bij den grooten postweg naar Banjoenegara snijdt; ~~Voorts~~ de grooten postweg ~~naar Banjoenegara~~ van ~~Kali~~ genoemd snijpunt tot aan het steenen wachthuis van de desa Kanaradja;
Ten Oosten: de grote weg van ~~Kali~~ steenen wachthuis ~~van de desa Kanaradja~~ af tot aan het in dien weg gelegen wachthuis van kampong Pasanggrahan, van daar de weg, die deze kampong te Zuiden begrenst tot aan de kali Soeraka.

Voor de afdeelingshoofdplaats Poerwokerto:
Ten Noorden: de binnenweg ten Noorden van den grooten postweg van ~~Kali~~ het snijpunt met de rivier Poelis ~~van~~ vandaar ~~vrij~~ pad in het verlengde van dien weg, ~~overvoerende tot~~ dat naar de rivier Banjoeasin leidt; en verder dit pad tot genoemde rivier;
Ten

Batas-batas wilayah Karesidenan Banyumas. 28 Juli 1887

Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Besluit 28 Juli 1887 No. 11

Peta topografi Banjoemas, 1899

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 817

LANDSDRUKKERIJ BATAVIA

24

816

JAVA. Res: Banjoemas.

Hermeten in 1896-1898. Door het Topographisch Bureau uitgegeven in het 1e Semester 1898.

Graadafleeting

a	b	c	d
e	f	g	h
i	k	l	m
n	o	p	q

7°20' Zb.
7°40' Zb.
2°20'
2°40'
Lengte beooosten Batavia.

Schaal 1:25000.

0 1/4 1/2 1 1 1/2 2 cM
0 1/4 1/2 1 1 1/2 2 KM.

Langs den grooten weg Glempang-Sampang-Randegan loopt eene telegraaflijn.
De tram van Glempang naar Garbi heeft stoom tot beweegkracht.

I Afd.
II „
III „

62

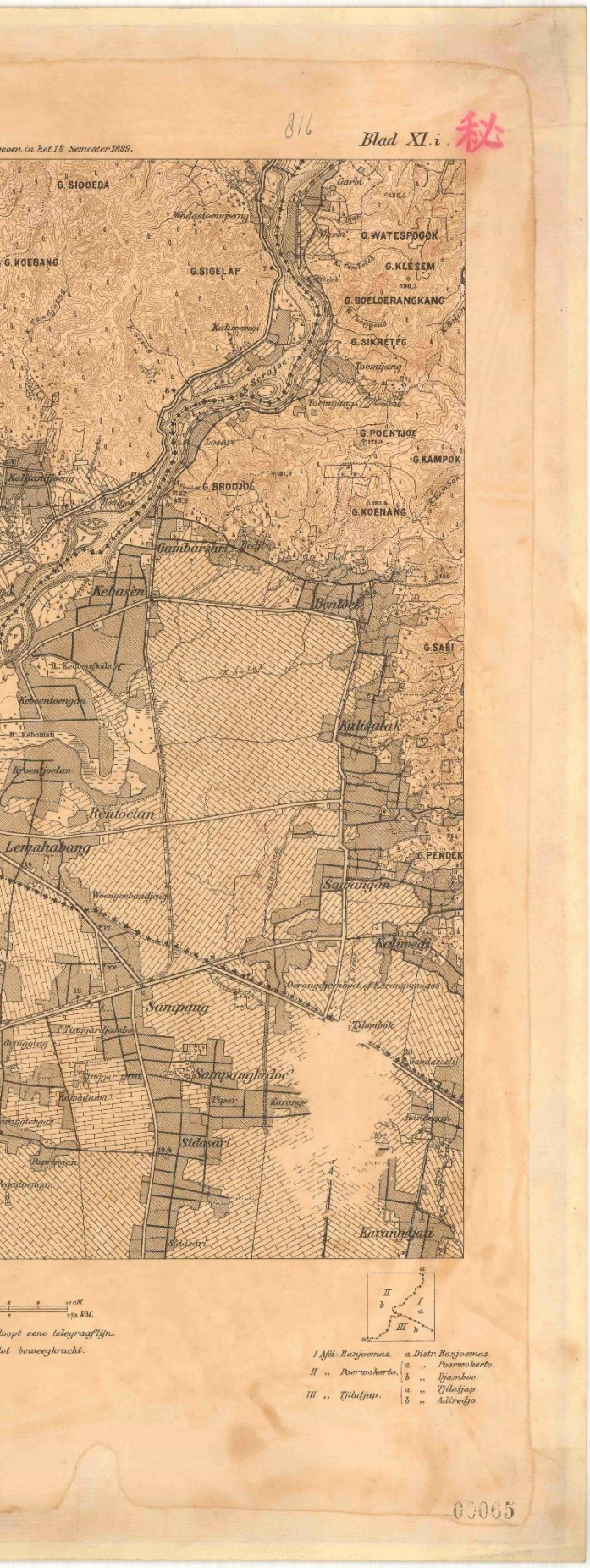

Peta topografi perbatasan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Banyumas tahun 1899 sebelum digabung pada tahun 1936

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 816

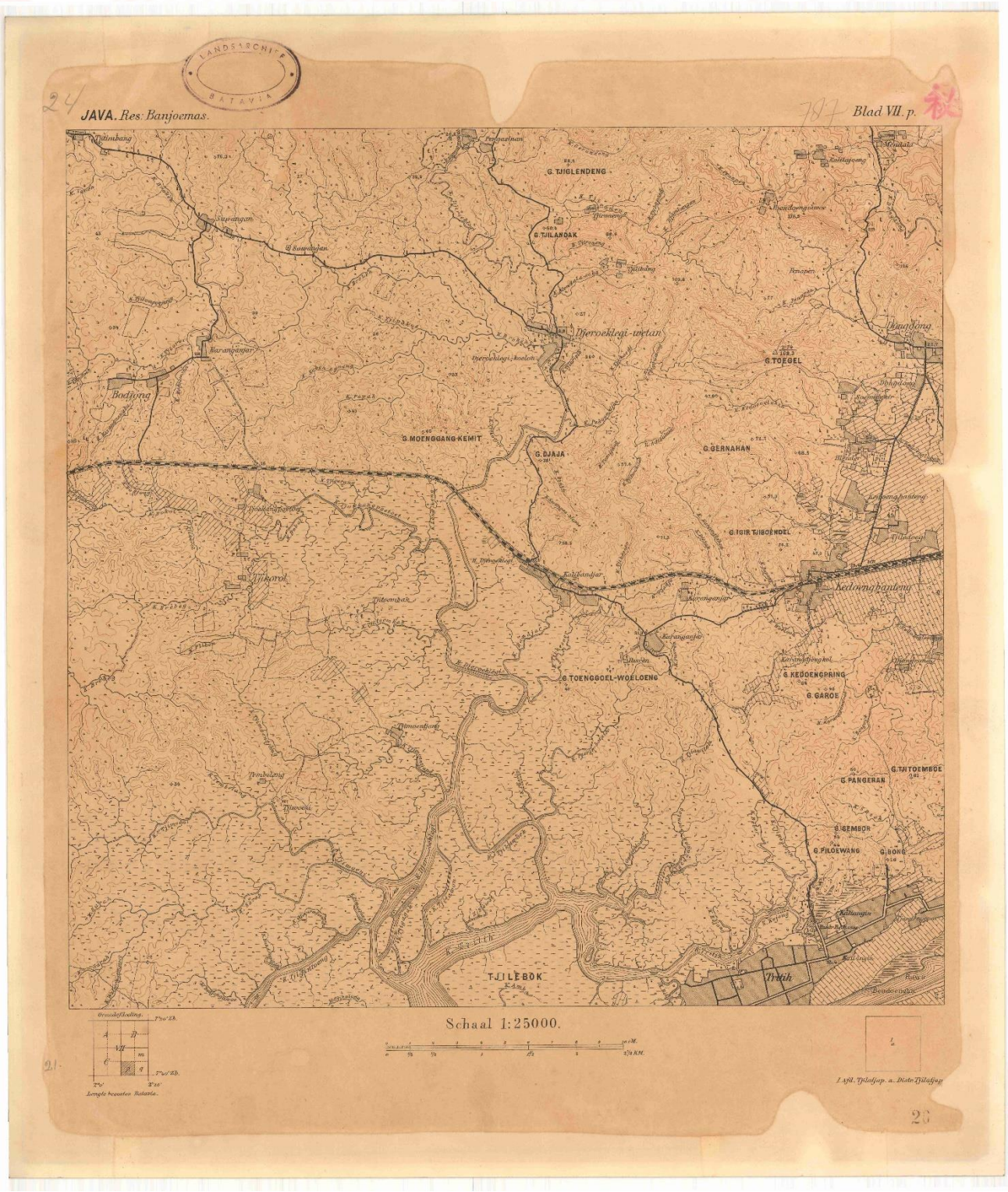

Peta topografi Kedung Banteng. 1899

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 787

B. B. Model No. 116.

Ontvangen bij de Afdeeling 19/7

» » den Redacteur

Afgedaan door idem

Geresumeerd door

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris

Afgedaan door hem 23/7

Ag. 1675/01

(Afd. B)

BESLUIT.

№ 61 Buitenzorg 23 Juli 1901

GEARRESTEERD.

23/7

Gelezen.

I. de omschrijving van den Resident van Banjoemas van 18 December 1900 en 4 Maart en 30 Mei 1901, Nos 7139/6, 1418/6 en 3394/6, de laatste twee gericht aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur;

1670 II. Het rapport van dien Departementschef van 9 Juli 1901, No. 9;

REG.
EXP.
MIN.
IND.
NOT.
O. R.

Typ. Lit. F. B. SMITS, Noordwijk.

Batas-batas wilayah Karesidenan Banyumas. 23 Juli 1901

Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Besluit 23 Juli 1901 No. 61

Hoofplaats Kota Banjoemas lengkap dengan insert peta kantor Residen Banyumas 1920

Sumber : Koleksi bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Banjoemas History Heritage Community

HOOFDPLAATS
BANJOEMAS
Schaal 1:2500.
Legenda.
Schaal 1:25000.
RESIDENT
Kédjawar Koelon
Karangpoetjoeng
Kédjawar Wetan
Pisanggrahan
K. Serajoe
Pisanggrahan
CENTRALE BIBLIOTHEEK
AMSTERDAM

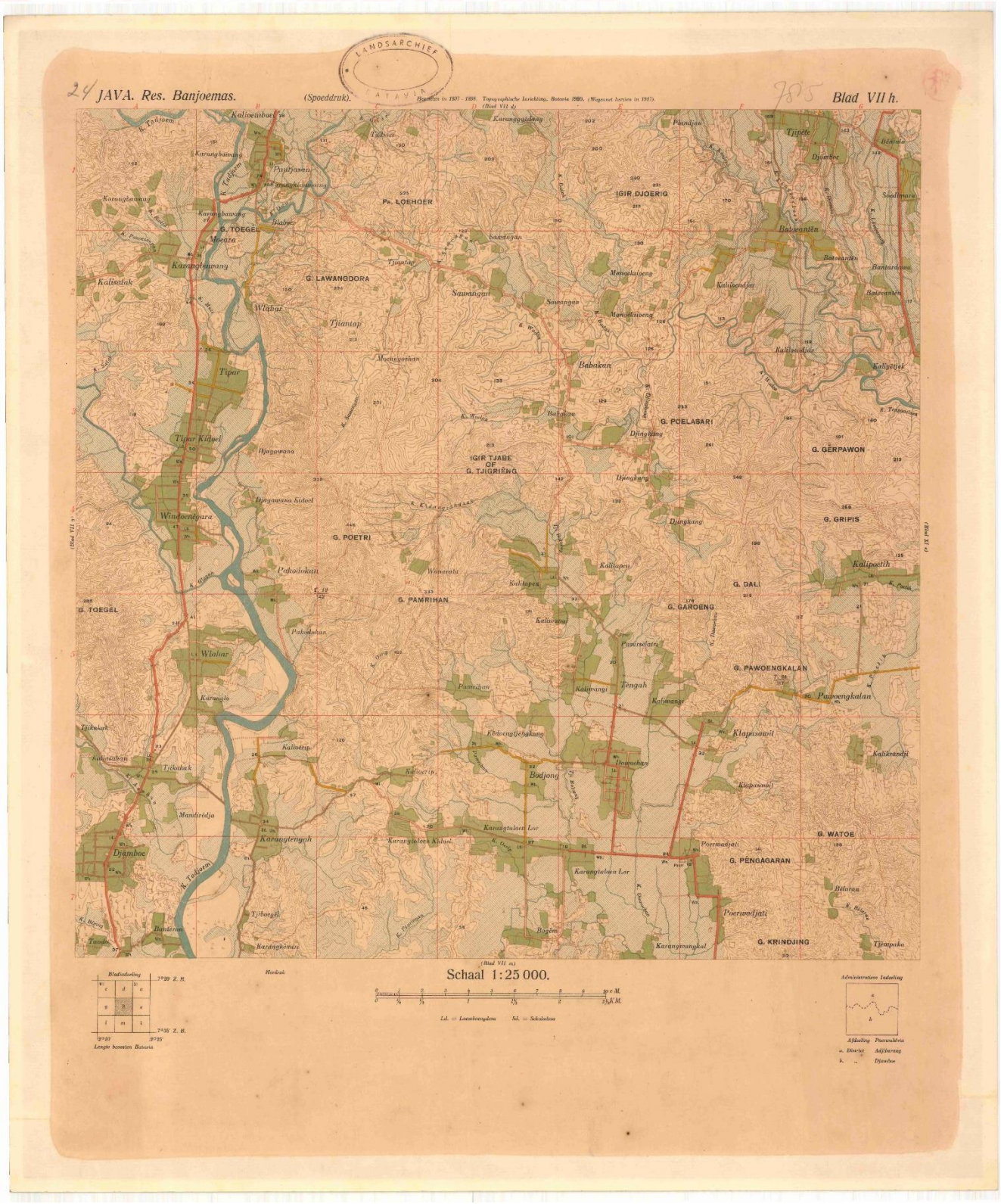
LANDSARCHIEF
24 JAVA. Res. Banjoemas.
(Spoeddruk).
Blad VII h.
785
Kalioembul
Karangbawang
Pajajaran
Pr. LOEHOER
IGIR DJOERIG
G. TOEGEL
Mogara
Kaliadak
G. LAWANGDOORA
Wlahar
Tjiantap
Tipar
Tipar Kidoel
Bjagawana
Bjagawana Kidoel
Windoenegara
G. POETRI
Pakoelokan
G. PAMRIHAN
Pakoelakan
Karangjo
Tjikalak
Djamboe
Mandrédja
Karangtengah
Tjiboegel
Bantenan
Karangkemiri
Karangtengah
Karangtuloen Lor
Karangtuloen Kidoel
Bodjong
Kéloengkekang
Kaliseri
Kaliwangi
Tengah
Kaliwangi
Pamihan
Pasirselatri
Kaliopen
Kaliopen
Kaliwang
Djangkang
Djangkang
Djangkang
Djangkang
IGIR TJABE OF G. TJIGRIÊNG
G. POELASARI
G. GÊRPAWON
G. GRIPIS
G. DALI
G. GAROENG
G. PAWOENGKALAN
Pawoengkalan
Klapasawit
Kaliseandji
G. WATOE
G. PÊNGAGARAN
Poerwodjati
Karangtuloen Lor
Poerwodjati
Belaran
G. KRINDJING
Tjiampaka
Karangwangkal
Bogem
Bantarawan
Babakan
Babakan
Babakan
Mangkaloeng
Mangkaloeng
Kaliloendjar
Kaliloendjar
Kaliwetjek
Batoeantên
Batoeantên
Batoeantên
Bantardawa
Sawangan
Sawangan
Sawangan
Mochayothan
Tjiantap
Tjipete
Djamboe
Bétiala
Soedimara
Pandjau
Karangbawang
Karangbawang
Karangbawang
Karangtengah
Tjikalak
Kaliwetjek
Kaliwetjek
Kaliwetjek

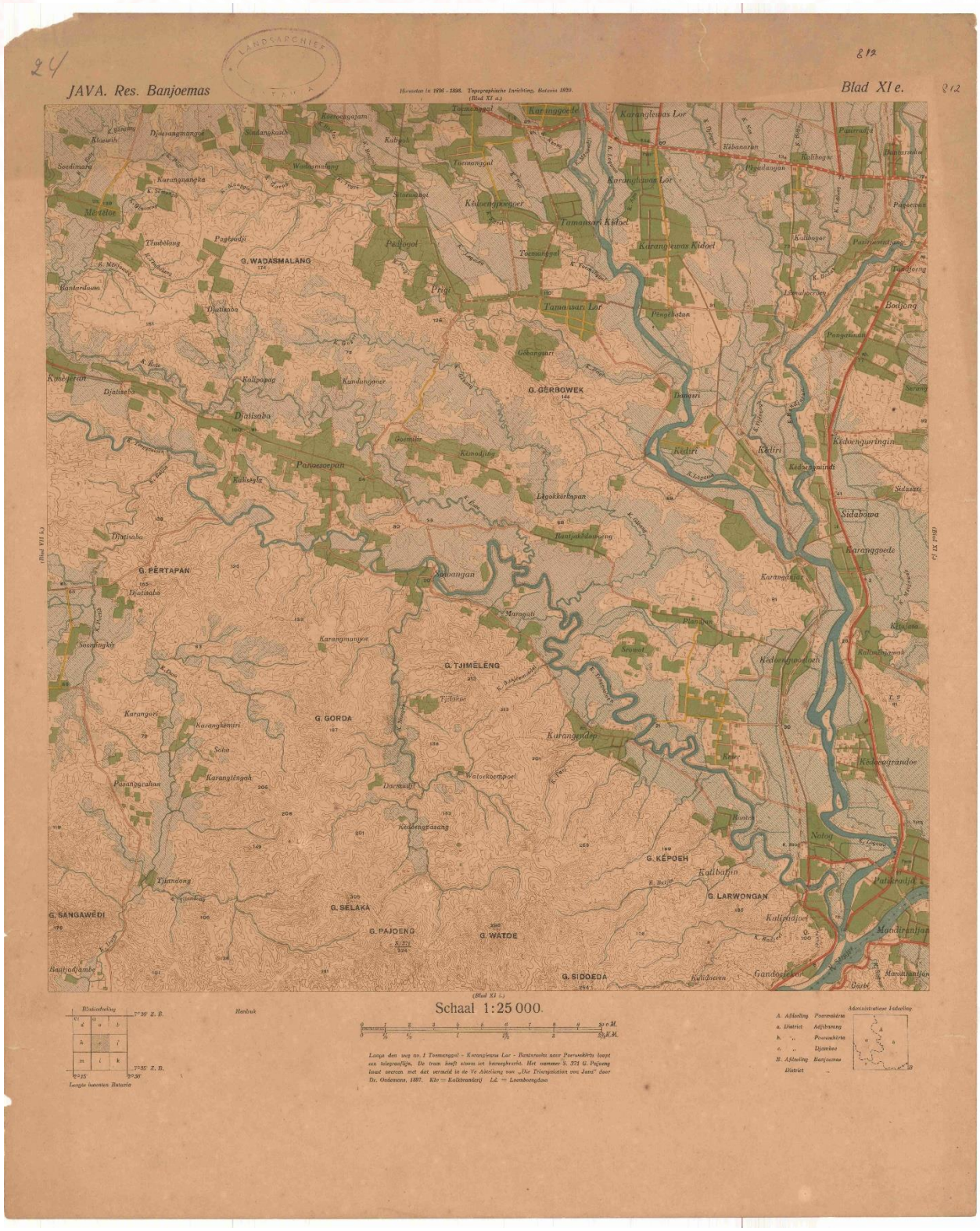

Peta topografi Karanglewas Lor, pada masa ini wilayah Karanglewas Lor masuk Kabupaten Purwokerto. 1920

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 812

Dataran tinggi yang berbentuk tangga dengan latar belakang Gunung Buntu, Banyumas, Jawa Tengah. [1930]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 135/70A

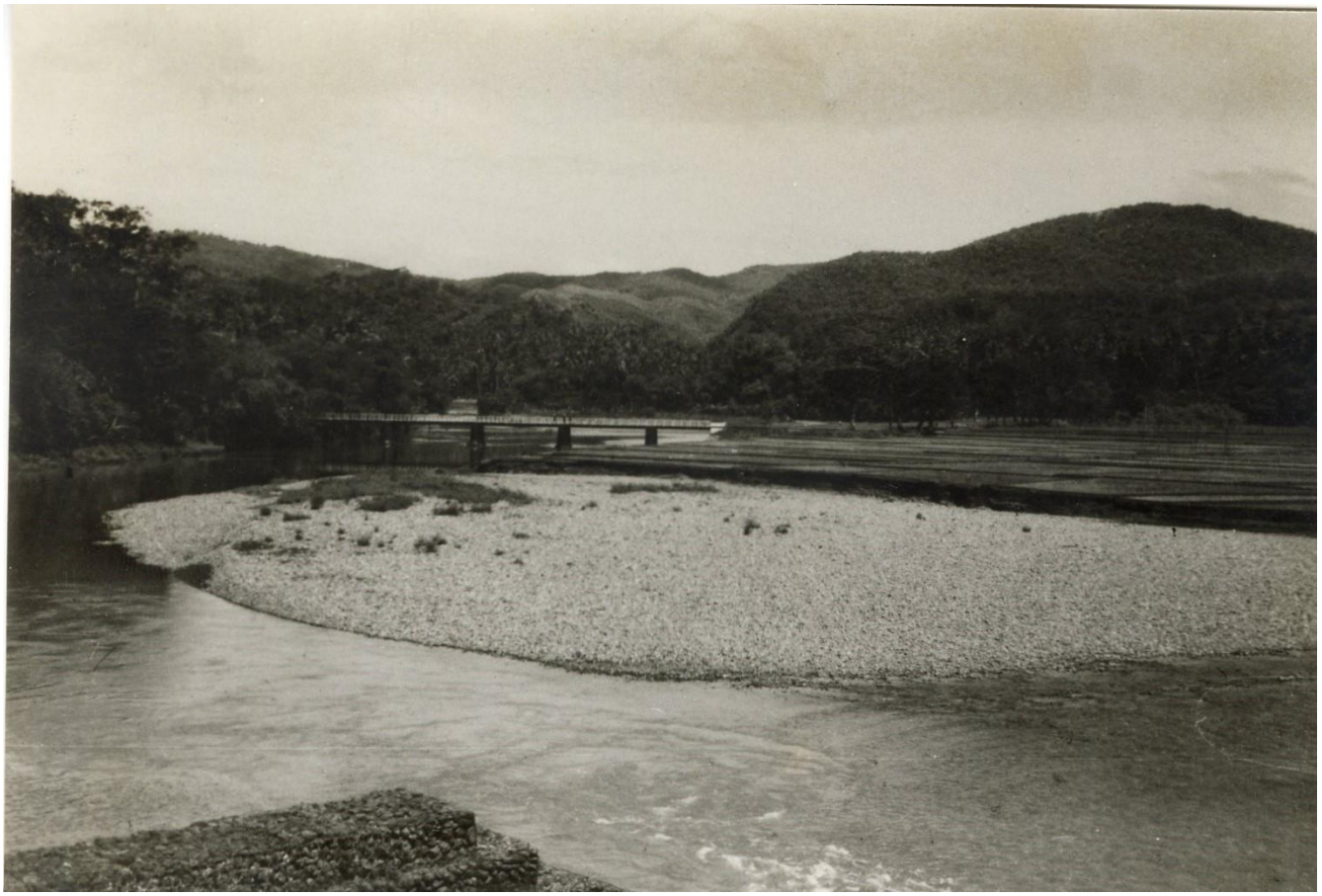

Jembatan diatas sungai Logawa di Patikraja Banyumas yang menghubungkan Kota Patikraja dan Desa Notog, Jawa Tengah. [1930]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 169-82

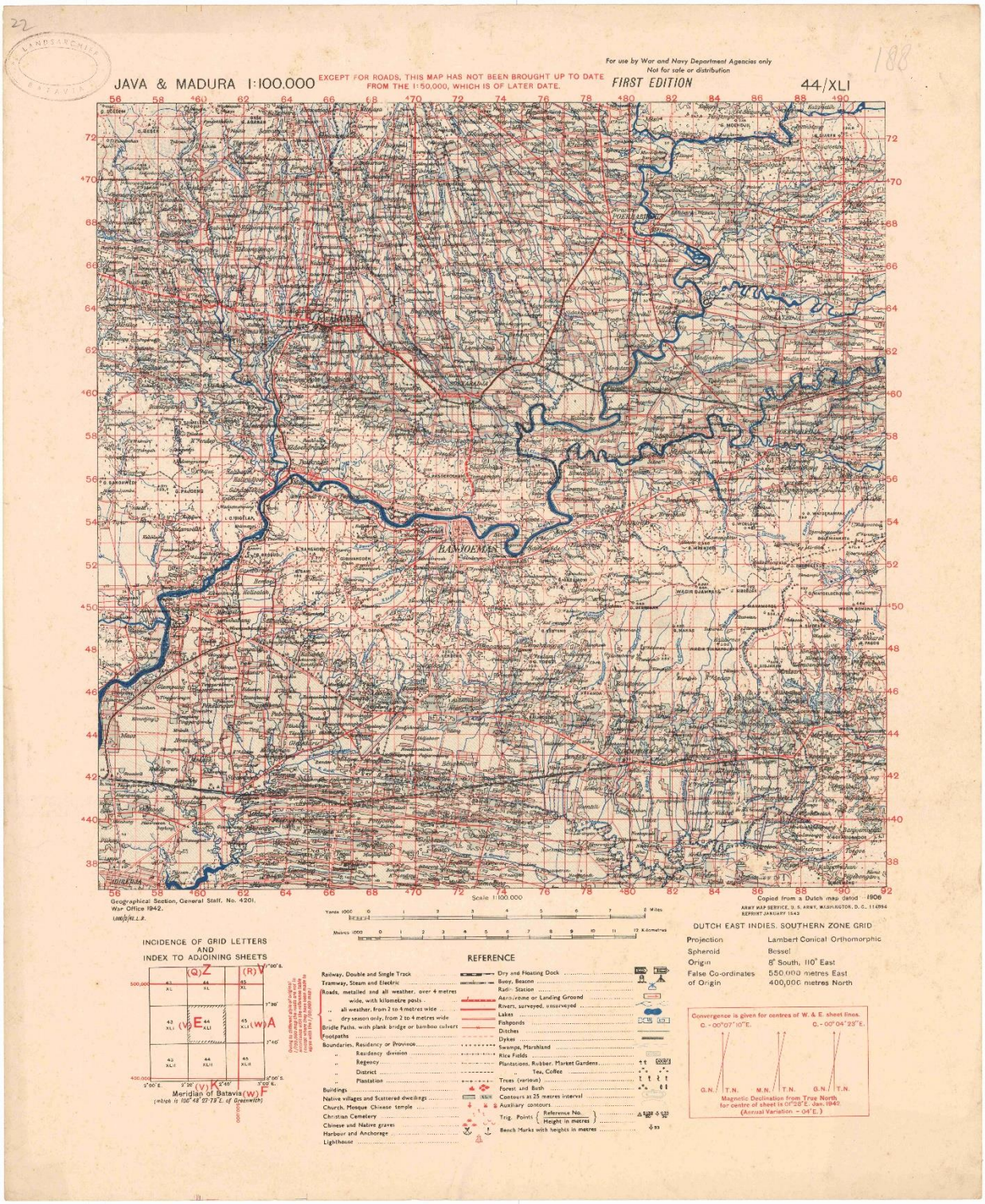

Peta topografi Kabupaten Banjoemas. 1942
Aliran Sungai Serayu dan Sungai Klawing yang melewati Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjoemas. 1942

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 188

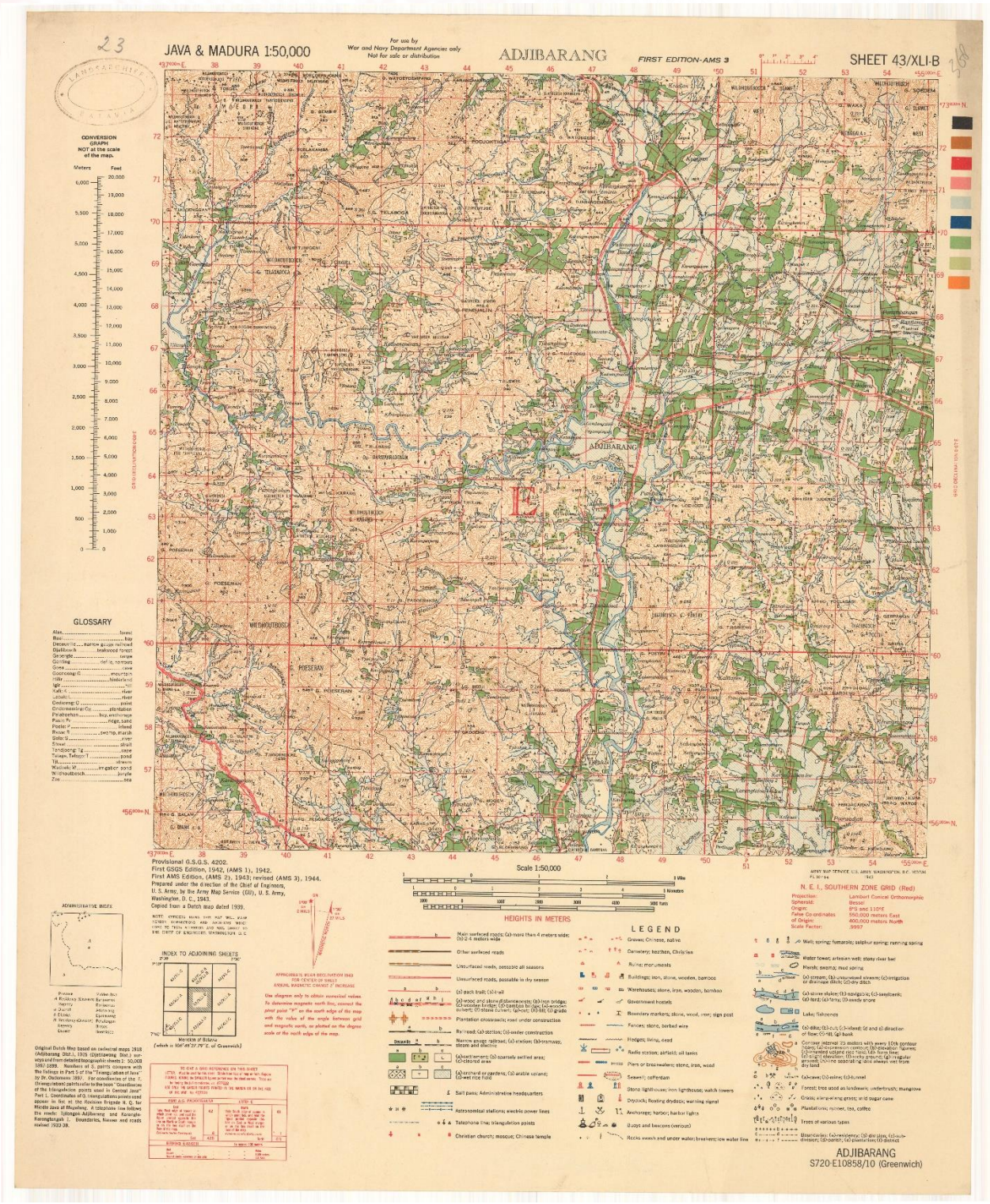

Peta topografi Ajibarang, 1942

Ajibarang merupakan wilayah paling barat dari Kabupaten Banyumas, Ajibarang adalah ibukota pertama sebelum menjadi Kabupaten Purwokerto

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 368

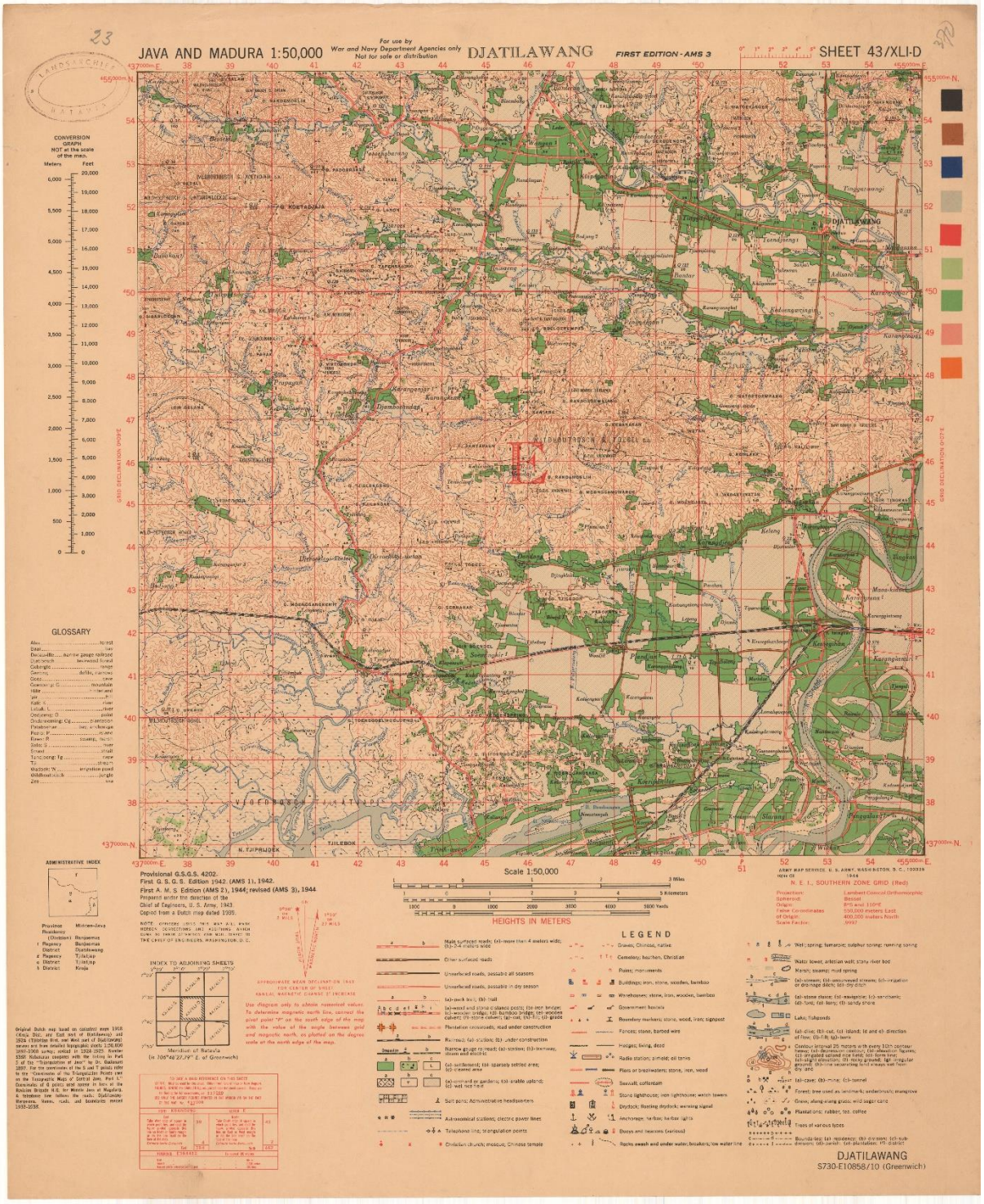

Peta topografi Jatilawang. 1942

Jatilawang masuk wilayah Kabupaten Banyumas sebelah barat selatan

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 370

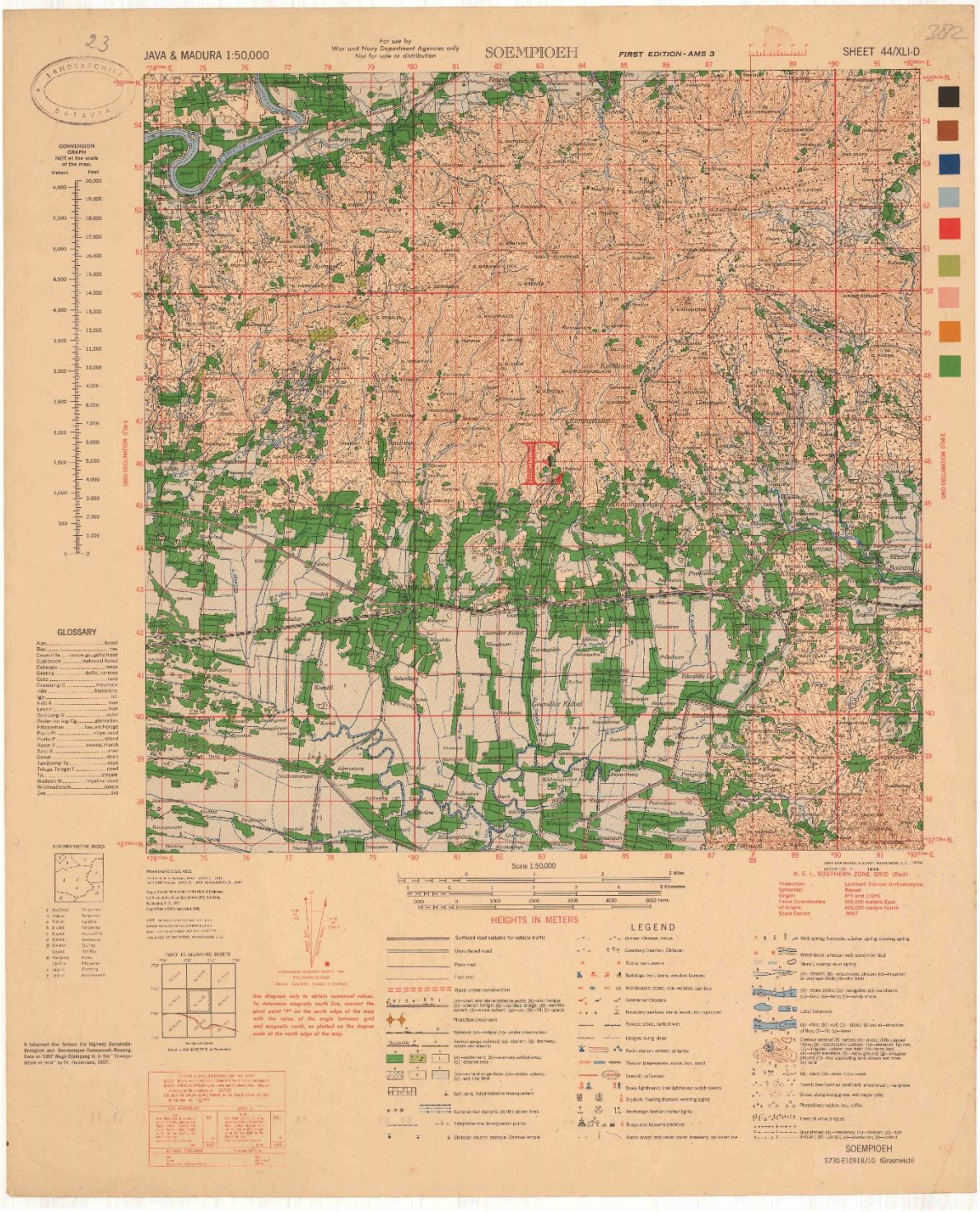

Peta topografi Sumpiuh. 1910

Peta daerah Sumpyuh dan Tambak sebelum berdiri pabrik gula Kaliredjo pada tahun 1912, wilayah ini merupakan wilayah kabupaten Banyumas yang paling timur.

Sumber : ANRI, Kartografi Indonesia 1913-1946 No. 382

Politik dan Pemerintahan

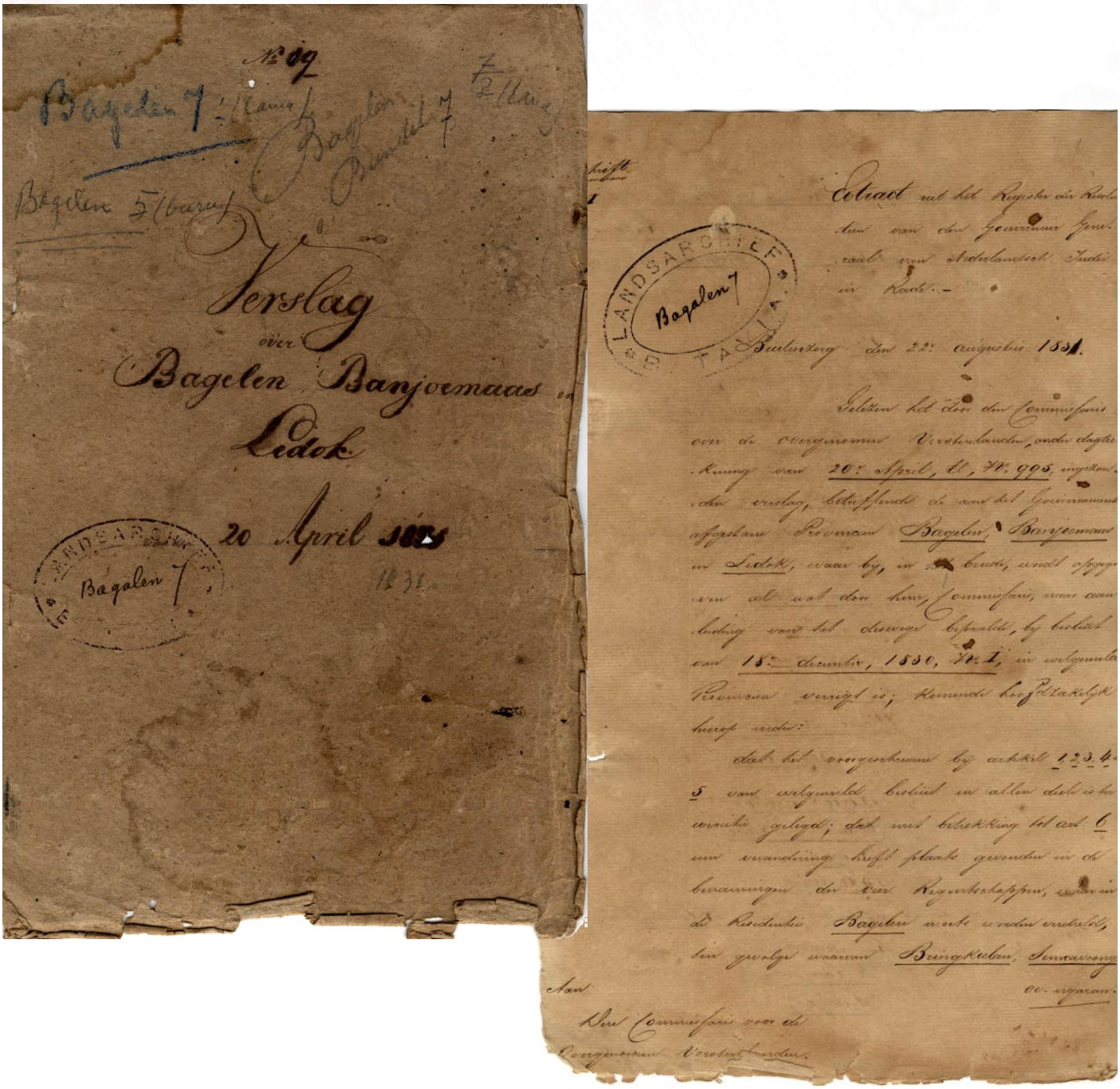

Laporan mengenai Bagelen, Banyumas dan Ledok (Wonosobo) sebagai pelaksanaan tugas yang dinyatakan dalam Resolusi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 22 Agustus 1831 No. 1.

Sumber : ANRI, BAGELEN NO. 7/1

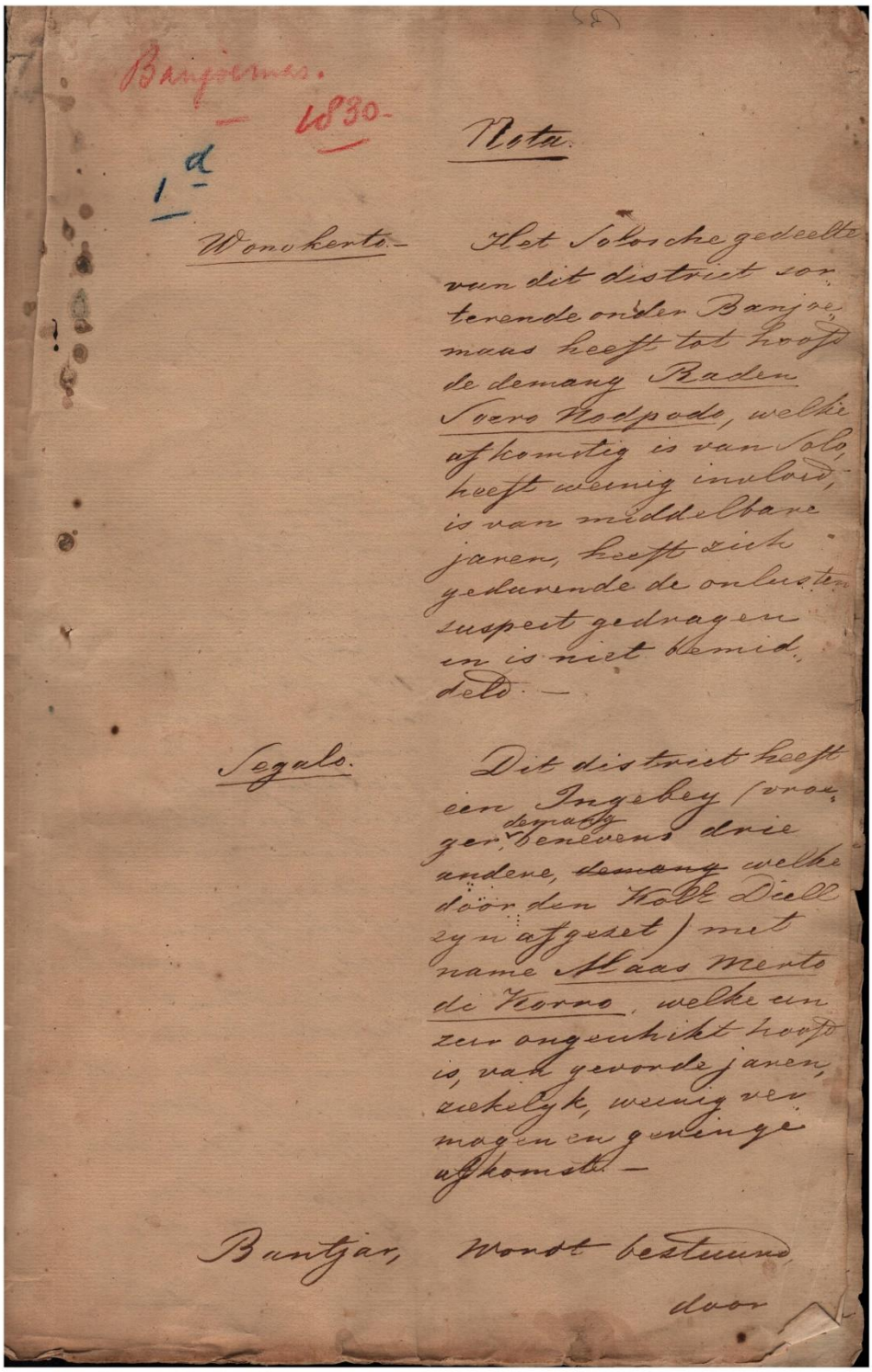

Banjoemas.
1830.
1d

Nota.

Wonokerto. Het Solosche gedeelte van dit district sortenende onder Banjoemaas heeft tot hoofd de demang Raden Soero Kodjodo, welke afkomstig is van Solo, heeft weinig invloed, is van middelbare jaren, heeft zich gedurende de onlusten suspect gedragen en is niet dienstdelig.

Segalo. Dit district heeft een Ingebey (oroeger dynastie) benevens drie andere, ~~demang~~ welke door den Kolk Diellzyn afgezet) met name Maas Merto de Koroo, welke een zeer ongeschikt hoofd is, vad gevorde jaren, ziekelijk, weinig vermogen en geringe afkomst.

Bantjar, Wordt bestuurd door

Catatan dari Asisten Residen Banyumas tentang daerah Wanakerta, Segalo, Mandiraja, Banyumas, dengan nama-nama penguasa daerah itu. 1830

Sumber : : ANRI, Banjoemas No. 1d

Raden Adipati Aria Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata dan istrinya Raden Ayu Siti Subijei. Beliau dikenal sebagai bupati 3 jaman yang menjabat dari tahun 1933 hingga tahun 1950, yang mengalami masa Hindia Belanda (masa Normal 1933-1942), masa Jepang (1942-1945) dan masa revolusi kemerekaan (1945-1950)

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 331/28

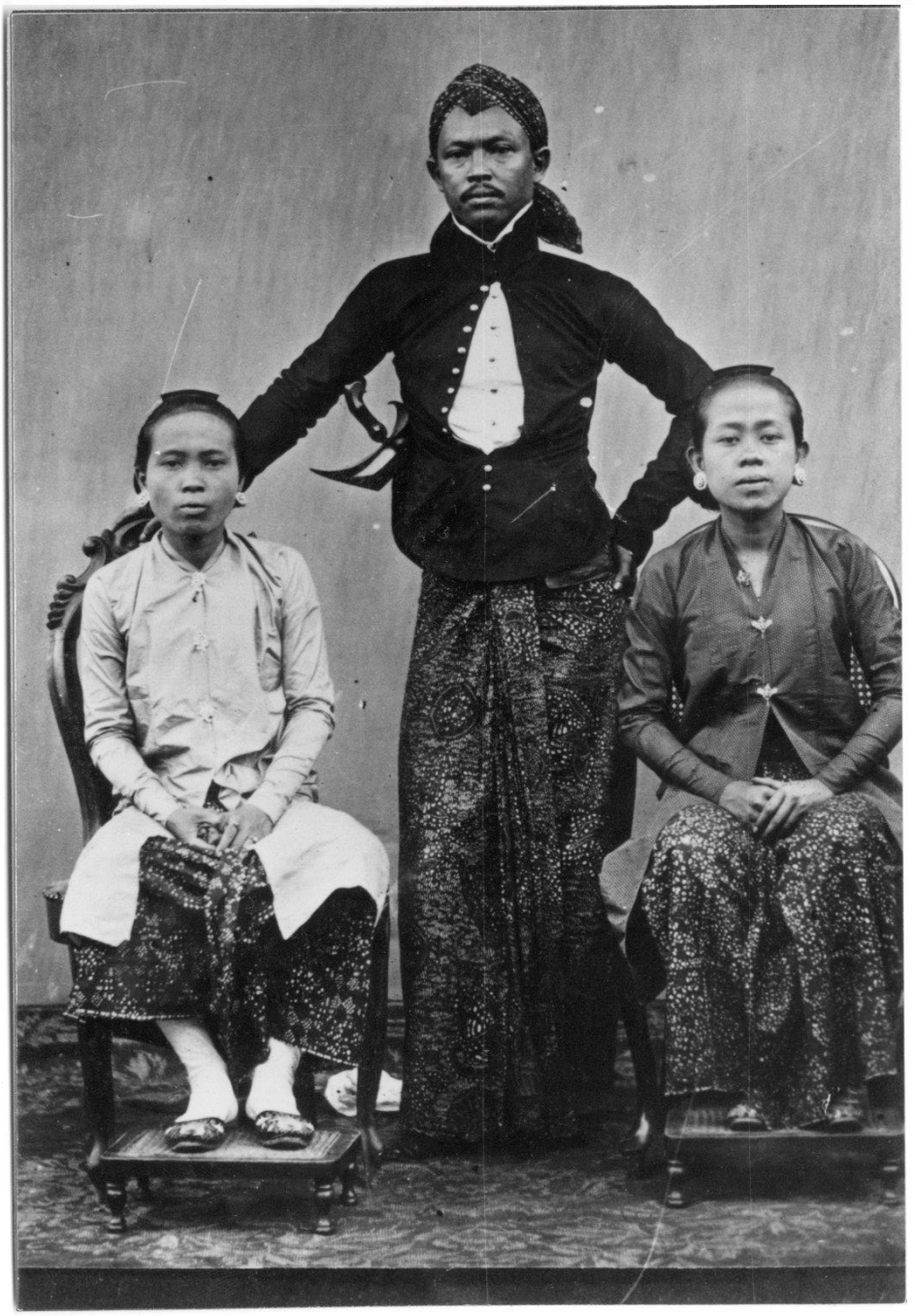

Bupati Banyumas Raden Adipati Tjokronegoro II dan kedua istrinya, Bupati Gendayakan ini menjabat sebagai Bupati Banyumas Kasepuhan antara tahun 1864 sampai 1979

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 332/06

Pertemuan pangereh praja untuk Jawa Tengah di gedung Residen Banyumas 1905 Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Banyumas P. A. Mertadiredja III, Bupati Purbalingga R. Ad. Dipakusuma IV, Bupati Banjarnegara Rm Jayamisena, Bupati Purwokerto Rm. Tmg.Tjokrokusumo, Residen T.J. Halbertsma, wedana Sokaraja Raden Atmo di Wirio, wedana Poerworedjo(Klampok) Mas Kartawiredja, Wedana Kaliredja Mas Soemowerdojo dan lainnya

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

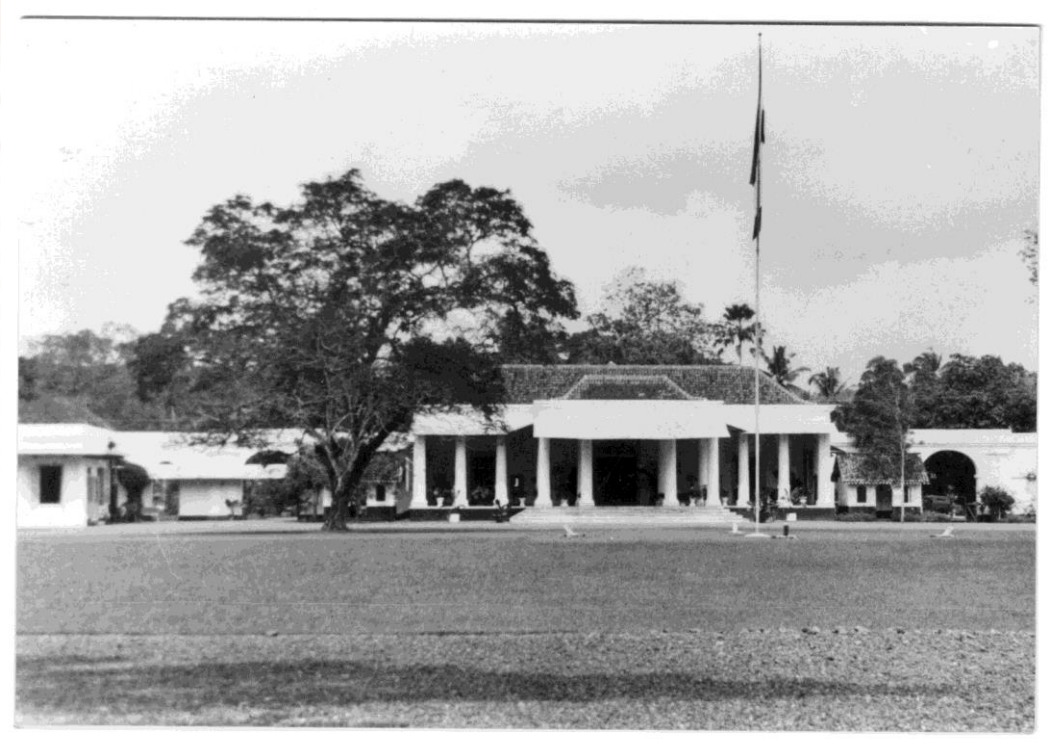

Gedung Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. 1930. Sekarang menjadi SMKN 1 Banyumas

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 169/80

Gedung Karesidenan Banyumas pada masa Residen T.J. Halbertsma, Jawa Tengah. [1905]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 249/78

Interior pendopo Sipanji di Kota Purwokerto setelah penggabungan dengan Kabupaten Banyumas, Maret 1937

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Konfrensi Lurah di Asistenan (Kawedanan) Cimanggu Cilacap pada tahun 1930

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

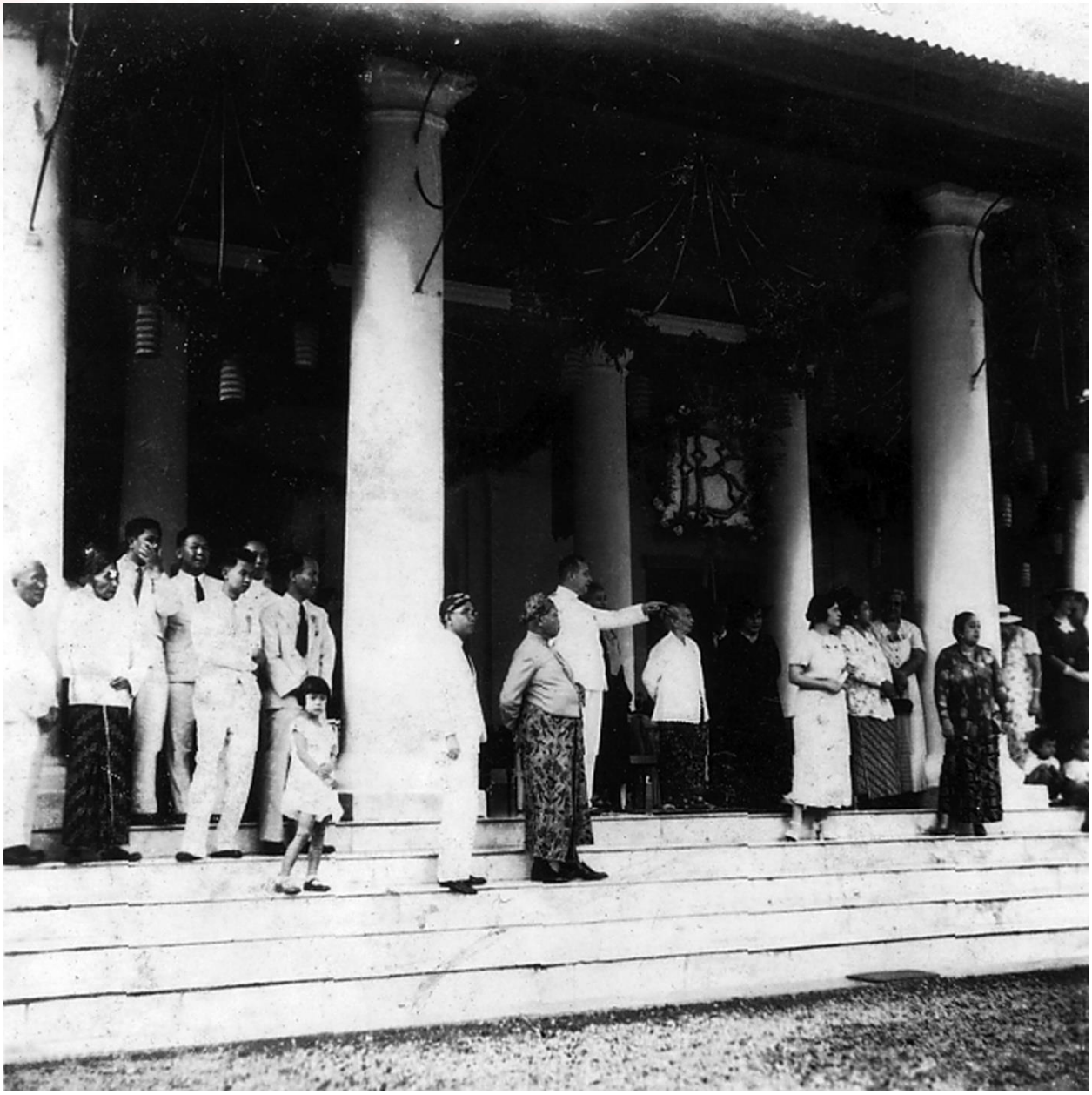

Perayaan pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard di gedung Karesidenan Banyumas pada 7 Januari 1937. Perayaan ini adalah wujud suka cita masyarakat Hindia Belanda yang dilaksanakan di daerah. Tampak dalam gambar beberapa tokoh Tionghoa Banyumas, Bupati R.A.A. Sudjiman Mertadiredja Gandasoebrata, P.A. Gandasoebrata, Residen Banyumas G. de Serière dan para ibu-ibu pejabat pribumi dan Eropa

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Rombongan boyongan Bupati RAA Sujiman Mertadireja Gandasubrata dan keluarga 5 Maret 1937 pada saat "boyongan" keluarga Bupati dari Kota Banyumas ke pendopo yang baru Kota Purwokerto.
Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Upacara penyambutan rombongan boyongan Bupati RAA Sujiman Mertadireja Gandasubrata dan keluarga 5 Maret 1937 pada saat "boyongan" keluarga Bupati dari Kota Banyumas ke pendopo yang baru Kota Purwokerto.
Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Upacara penyambutan rombongan boyongan Bupati RAA Sujiman Mertadireja Gandasubrata dan keluarga pada oleh Residen Banyumas di pendopo Sipanji di kota Purwokerto. 5 Maret 1937

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Persatuan wanita Eropa dan Pribumi COVIM (Commissie tot Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd) atau Komisi Organisasi Buruh Perempuan pada masa Mobilisasi di Purwokerto yang diketuai oleh Ibu Sujiman Mertadiredja Gandasoebrata pada sekitar tahun 1942

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Pegawai Pemerintah otonom Kabupaten Banyumas tahun 1947 foto bersama diruang salon Pendopo Si Pandji Poerwokerto. 1947

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Kunjungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan rombongan ke Wonosobo sekitarnya dan Purwokerto mendapat sambutan meriah dari rakyat. Agustus 1949

Sumber : ANRI, IPPHOS No. 1364, 1365

Kunjungan Presiden Soekarno di Banyumas dan Kedu tanggal 12 September hingga 21 September 1952 Presiden berkunjung ke Banyumas, Banjarnegara dan Wonosobo.
21 September 1952
Sumber : ANRI, SKR 193

Wakil-wakil rayon yang hadir pada Sidang Konferensi Kantor Urusan Demobilisan Pelajar Seluruh Indonesia. (tampak rayon Makassar, Denpasar, Magelang, Purwokerto, dan Jawa Tengah). 19 September 1952

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta 1952 No. 9970

Para pemuda pejuang dengan persenjataanya bersiap melawan Tentara Sekutu dari luar kota di Banyumas Jawa Tengah setelah Belanda menduduki kota-kota di Jawa Tengah pada clash II. Tahun 1948. 03 Desember 1952 (Perjuangan Kemerdekaan RI (diambil dari album Sdr. Pieter de Queljoe))

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta 1952 No. 11065

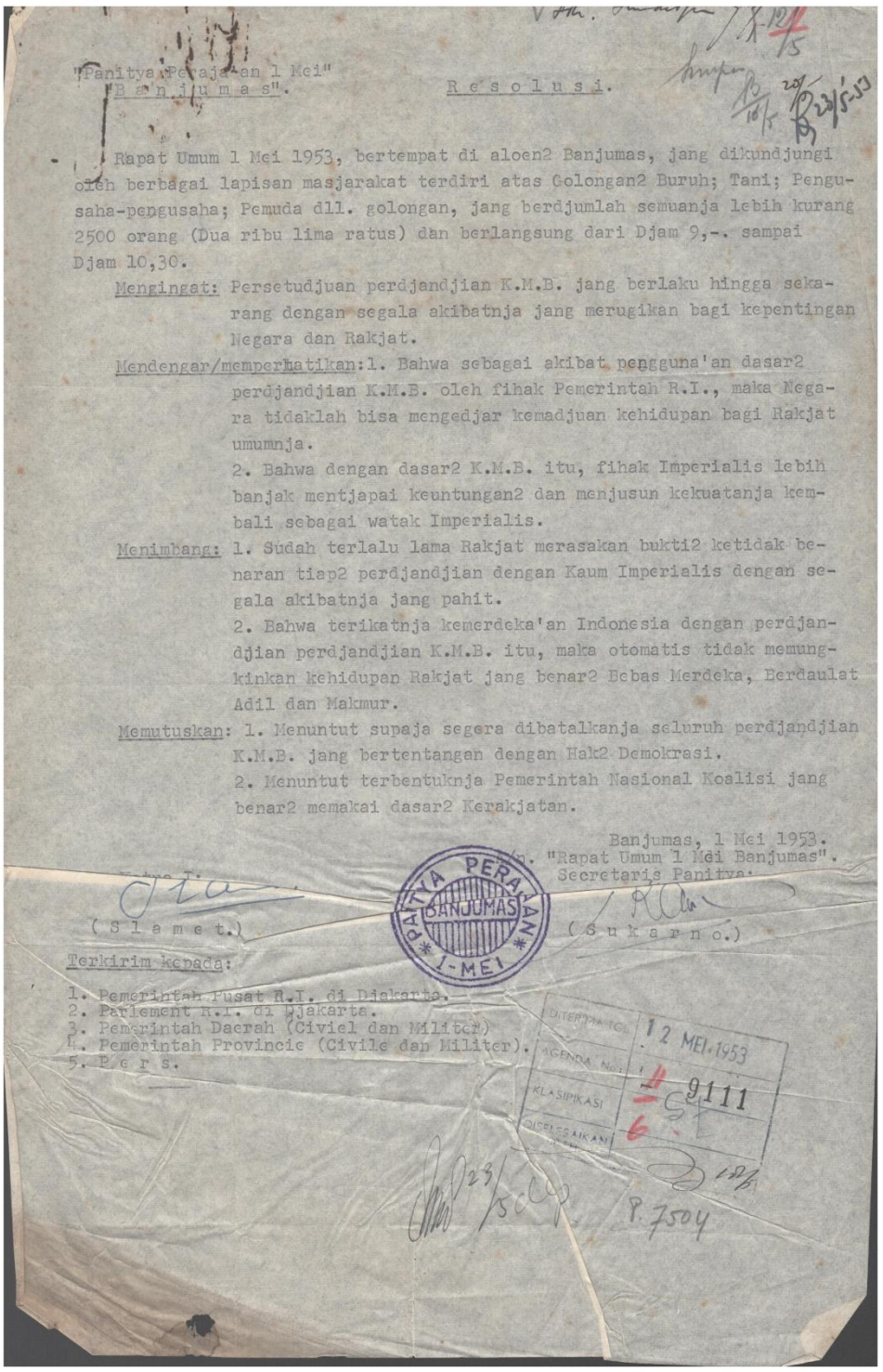

"Panitya Perajaan 1 Mei"
"B a n j u m a s".

R e s o l u s i.

Rapat Umum 1 Mei 1953, bertempat di aloen2 Banjumas, jang dikundjungi oleh berbagai lapisan masjarakat terdiri atas Golongan2 Buruh; Tani; Pengusaha-pengusaha; Pemuda dll. golongan, jang berdjumlah semuanja lebih kurang 2500 orang (Dua ribu lima ratus) dan berlangsung dari Djam 9,-. sampai Djam 10,30.

Mengingat: Persetudjuan perdjandjian K.M.B. jang berlaku hingga sekarang dengan segala akibatnja jang merugikan bagi kepentingan Negara dan Rakjat.

Mendengar/memperhatikan: 1. Bahwa sebagai akibat pengguna'an dasar2 perdjandjian K.M.B. oleh fihak Pemerintah R.I., maka Negara tidaklah bisa mengedjar kemadjuan kehidupan bagi Rakjat umumnja.
2. Bahwa dengan dasar2 K.M.B. itu, fihak Imperialis lebih banjak mentjapai keuntungan2 dan menjusun kekuatanja kembali sebagai watak Imperialis.

Menimbang: 1. Sudah terlalu lama Rakjat merasakan bukti2 ketidak benaran tiap2 perdjandjian dengan Kaum Imperialis dengan segala akibatnja jang pahit.
2. Bahwa terikatnja kemerdeka'an Indonesia dengan perdjandjian perdjandjian K.M.B. itu, maka otomatis tidak memungkinkan kehidupan Rakjat jang benar2 Bebas Merdeka, Berdaulat Adil dan Makmur.

Memutuskan: 1. Menuntut supaja segera dibatalkanja seluruh perdjandjian K.M.B. jang bertentangan dengan Hak2 Demokrasi.
2. Menuntut terbentuknja Pemerintah Nasional Koalisi jang benar2 memakai dasar2 Kerakjatan.

Banjumas, 1 Mei 1953.
Ketua "Rapat Umum 1 Mei Banjumas".
Secretaris Panitya:

(S l a m e t.)

(S u k a r n o.)

PANITYA PERAJAAN BANJUMAS 1-MEI

Terkirim kepada:
1. Pemerintah Pusat R.I. di Djakarta.
2. Parlement R.I. di Djakarta.
3. Pemerintah Daerah (Civiel dan Militer)
4. Pemerintah Provincie (Civile dan Militer).
5. P e r s.

DITERIMA TGL. 12 MEI 1953
AGENDA No. 9111
KLASIFIKASI
DISELESAIKAN

Resolusi dari Pimpinan Rapat Raksasa 1 Mei 1953 di Madiun dan Banyumas mengenai tuntutan pembatalan perjanjian KMB. 01 Mei 1953

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta 1952 No. 11065

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Banjumas tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Padjak Penerangan Djalan Daerah tingkat ke II Banjumas", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Djuli 1961;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Desember 1961 No.Des.9/85/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Banjumas tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Padjak Penerangan Djalan Daerah tingkat ke II Banjumas", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Djuli 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Banjumas di Purwokerto (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djanuari 1962.
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1962 tentang Mengesahkan Peraturan Daerah tingkat ke II Banyumas tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Pajak Penerangan Jalan Daerah tingkat ke II Banyumas yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23 Januari 1962

Sumber : ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No 7203

1

62

BELUM DIKOREKSI

nst.635/63-.

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA RAPAT RAKSASA
DI PURWOKERTO PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 1963.

Saudara-Saudara sekalian,

Saja tahu di Purwokerto banjak sekali rakjat Muslimin dan Muslimat, maka lebih dahulu saja menjampaikan salam Islam:

Assalamu'alaikum Warachmatulahi Wabarakatuh!

Mu'alaikum salam! (sahut hadirin - red).

Kemudian pekik merdeka: "Merdeka!"

Saudara-Saudara mengetahui saja sedjak kembali dari Manila agak kurang sehat badan, sakit. Sakit, kataku didalam pidato Maulid Nabi, kemrekes badan dan batuk, jang kemrekes badan dan batuk itu sampai sekarang belum hilang sama sekali. Karena itu djuga sebagai jang saja katakan pada tanggal 17 Agustus jang lalu, saja akan berpidato alon-alon asal kelakon. Ja do'akan sadja kepada Tuhan Jang Maha Esa supaja saja lekas sembuh saudara-saudara.

Saudara-Saudara, saja datang di Purwokerto untuk menghadiri resepsi Pembukaan dari Kongres ke-X PNI. Dihadapan resepsi Kongres PNI itulah nanti malam Insja Allah saja akan menjampaikan amanat saja. Djadi amanat kepada Kongres PNI, amanat kepada orang-orang PNI.

Sekarang ini saja berdiri di-alun-alun Purwokerto. Dan saja berbitjara bukan hanja kepada orang-orang PNI sadja. Saja tahu, disana itu ada anggota-anggota dari PKI. Saja tahu diantara saudara-saudara banjak sekali anggota dari Nahdatul Ulama. Saja tahu ada anggota dari Partindo. Saja tahu ada anggota-anggota dari Partai Katholik. Saja tahu ada anggota-anggota dari PSII. Pendek kata, massa jang sekarang berkumpul dialun-alun Purwokerto ini adalah massa rakjat. Oleh karena itu maka saja berpidato disini bukan hanja, dan bukan terutama kepada anggota-anggota PNI, tetapi saja berpidato terhadap kepada seluruh rakjat Indonesia.

Dan djikalau saja sudah berpidato terhadap kepada seluruh rakjat Indonesia, maka sebagai jang sudah saja katakan pada waktu 17 Agustus tahun '63 jang lalu, saja merasa diri saja seperti mengadakan satu dialoog. Dialoog itu apa? Ha, saja senang, saudara-saudara mendjawab, tahu Pak! Dialoog, jaitu kalau ada dua orang bitjara satu sama lain timbal balik, bitjara timbal-balik, timbal-balik, timbal-balik, timbal-balik, timbal-balik, itu namanja dialoog. Kalau bitjara sendiri, - ada orang bitjara sendiri - , itu namanja monoloog.

Saja ini mengadakan dialoog, dialoog dengan siapa? Dengan rakjat. Tetapi pada tanggal 17 Agustus jang lalu saja katakan, dialoog saja itu kok djuga seperti Sukarno bitjara kepada Sukarno.

Oleh karena

4

- 4 -

Lha sasaran Revolusi kita itu apa? Singkatnja jaitu jang dinamakan Trikerangka daripada Revolusi Indonesia, kerangka jang tiga daripada Revolusi Indonesia.

Kesatu, negara Kesatuan Republik Indonesia berwilajah kekuasaan antara Sabang dan Merauke. Itu salah satu kerangka.

Kedua, satu masjarakat jang adil dan makmur didalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu, atau dengan perkataan lain, satu masjarakat sosialisme. Satu masjarakat jang adil dan makmur tanpa, kataku selalu, exploitation de l'homme par l'homme, penghisapan manusia kepada manusia tidak ada. Satu masjarakat jang bahagia bagi semua orang. Bukan masjarakat bahagia tjuma buat ndoro-ndoro sadja saudara-saudara, tapi satu masjarakat bahagia bagi semua orang. Dua.

Ketiga, Indonesia berada ditengah-tengah persahabatan daripada semua bangsa-bangsa didunia ini. Mengadakan persahabatan unnat manusia didunia ini.

Ini adalah tiga kerangka Revolusi Indonesia, tiga tudjuan daripada Revolusi.

Nah, sekarang ini saudara-saudara kita sudah menudju kepada sasaran ini, kita sudah menudju kepada tiga kerangka ini, kepada penjelenggaraan pelaksanaan daripada tiga kerangka ini. Tadinja tidak kober kita berdjalan menudju kepada tiga kerangka ini. Seperti tidak kober saudara-saudara, kita tjuma bersilat untuk mempertahankan diri sadja.

Ada, tentu sadja musuh kita dari luar negeri jang selalu mengatakan, kerangka jang nonsens, nonsens, nonsens. Apalagi kerangka jang nomor dua, sosialisme. Wah itu nonsens! Itu kan Sukarno sadja jang selalu sosialis, sosialis, sosialis! Kalau rakjat Indonesia tidak tahu menahu tentang sosialis, itu kan tjekokannja Sukarno. Seperti dikatakan, katanja Irian Barat itu kan Sukarno sadja jang gembar-gembor tentang Irian Barat!

Nah, saja bilang bukan Sukarno, seluruh rakjat Indonesia menghendaki agar supaja Irian Barat masuk kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik.

Buktinja apa? Pada waktu diadakan Trikora, 6 djuta pemuda dan pemudi mentjatatkan diri saudara-saudara, untuk mendjadi sukarelawan dikirim ke Irian Barat.

Na itu sosialisme pun demikian.

Saja pernah pidato di Istana Negara, saja berkata bahwa tjita-tjita sosialisme itu bukan tjita-tjita Sukarno sadja, tjita-tjita rakjat djelata Indonesia, tjita-tjitanja mbok Sarinem, tjita-tjitanja Pak Kromodongso, tjita-tjita Marhaen, tjita-tjita seluruh bangsa Indonesia, dan bukan dari djaman sekarang sadja, tapi dari djaman dulu saudara-saudara. Lantas didalam pidato di Istana Negara itu saja tjeritakan, saja ini waktu saja masih ketjil, pada waktu saja masih ketjil, pada waktu saja masih umur 8 tahun, - kalau sekarang

ini saja

Pidato presiden pada rapat raksasa di Purwokerto.
28 Agustus 1963
Sumber : ANRI, Pidato Presiden Sukarno 1958-1967 No. 517

61

BELUM DIKOREKSI

nstl 669/63-.

AMANAT PJM PRESIDEN SUKARNO PADA RESEPSI PEMBUKAAN KONGRES KE-X PNI DI PURWOKERTO PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 1963.

Saudara-Saudara sekalian,

Saja diminta untuk memberi amanat kepada resepsi Kongres jang ke-X PNI. Apa jang hendak saja katakan? Baiklah kita lebih dahulu mentjamkan, Indonesia pada waktu sekarang ini duduk dalam alam apa?

Tatkala saja 36, 37 tahun jang lalu buat pertama kali mentjetuskan Marhaenisme keadaan kita adalah berlainan dengan keadaan kita sekarang ini. Keadaan dunia adalah berlainan dengan keadaan dunia sekarang ini. Bahkan keadaan saja adalah berlainan dengan keadaan saja sekarang ini.

Kalau mengenai diri saja dulu itu saja masih muda, sekarang sudah tua. Dulu saja, katakanlah, pemimpin biasa, sekarang saja Presiden Republik Indonesia, Republik jang besar dan terhormat diseluruh dunia.

Indonesia bagaimana? Dulu itu Indonesia belum merdeka. Indonesia masih didjadjah, bahkan sedang didjadjah sehebat-hebatnja oleh kaum pendjadjah. Sekarang kita telah merdeka, telah mempunjai negara jang sebagai tadi saja katakan di rapat raksasa di alun-alun, katjeluk ka-awun-awun diseluruh dunia. Dunia djuga lain. Dunia dulu lain daripada dunia sekarang. Dunia dulu adalah dunia djaja-djajanja imperialisme. Djaja-djajanja kapital monopol, sekarang dunia ini adalah dunia jang ummat manusia bergerak, jang ummat manusia berada didalam satu revolusi jang maha besar jang saja namakan revolution of mankind. Bahkan saja berkata, bahwa sekarang ini 3/4 daripada ummat manusia sedang mendjalankan revolusi jang maha besar, revolusi kemerdekaan, revolusi kebebasan, revolusi mentjari hidup jang lajak, revolusi untuk mendjadi manusia jang benar-benar insan al kamil.

Djadi saudara-saudara, baik pribadiku berobah, artinja djikalau dibandingkan dulu dengan sekarang, Indonesia berobah, djikalau dibandingkan dulu dengan sekarang. Dunia ummat manusia berobah djikalau dibandingkan dulu dengan sekarang.

Tetapi sebagai tadi dikatakan oleh Pak Ali, Ketua Umum PNI, adalah satu kebenaran, satu kenjataan, bahwa lagunja, harusnja Marhaenisme sebagai dasar paham perdjoangan kita tidak berobah, tetap! Bukan Pak Ali tadi berkata, ada orang jang mengatakan, bahwa Marhaenisme itu baik buat djaman itu, djaman tatkala Sukarno masih muda, djaman tatkala Indonesia belum merdeka, djaman tatkala dunia belum seperti sekarang ini. Saja berkata, keadaan rakjat kita berobah, Indonesia berobah, Sukarno berobah, dunia berobah, tetapi dasar jang harus dipakai dalam Revolusi Indonesia ini untuk menudju kepada tertjapainja Trikerangka Revolusi, untuk terlaksananja Amanat Penderitaan Rakjat,

tetap tidak

Pidato presiden pada resepsi pembukaan Konggres X PNI di Purwokerto. 28 Agustus 1963

Sumber : ANRI, Pidato Presiden Sukarno 1958-1967 No. 518

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan dalam wilayah Kecamatan Purwokerto pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Purwokerto;

b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Purwokerto telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Purwokerto perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN : ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, dihapuskan.

(2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 61.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto. 2 Desember 1982

Sumber : ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No 2974 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Administratif yang tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom dapat dihapuskan;

b. bahwa Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone ternyata tidak dapat ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom, sehingga perlu dilakukan penghapusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, penghapusan Kota-kota Administratif tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur;

3. Undang ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 73

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone. 8 Juli 2003

Sumber : ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No 4249 A

Keagamaan, Sosial dan Budaya

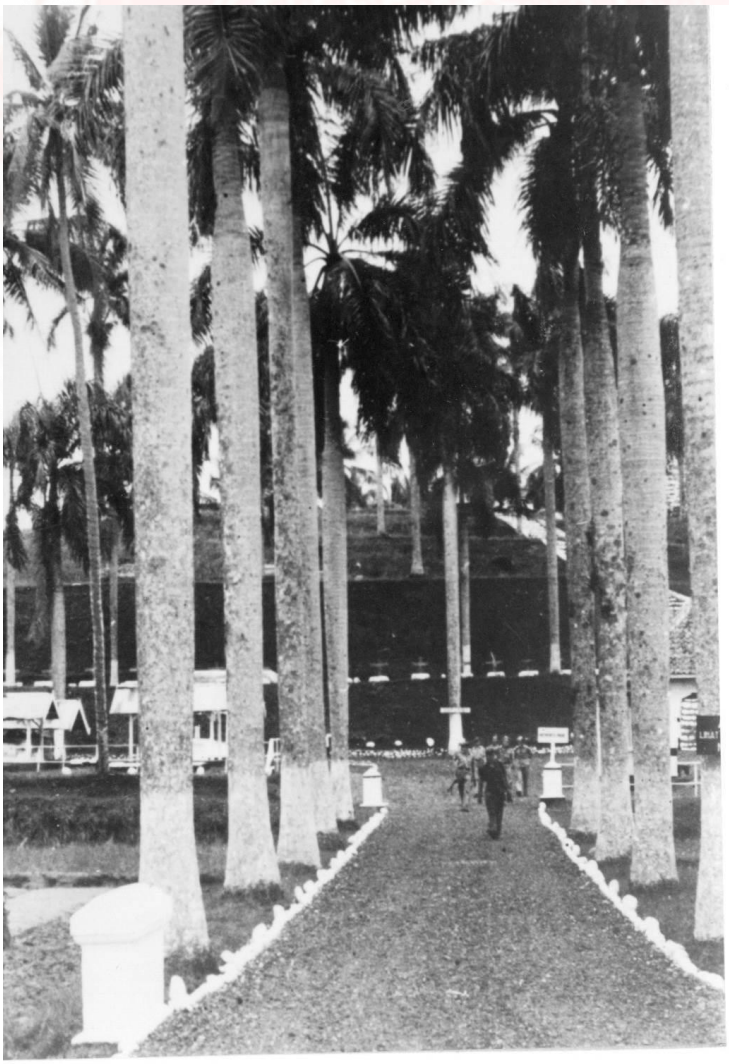

Pintu masuk ke kuburan Belanda di Kota Banyumas, Jawa Tengah. [1930]
Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 813/76

Kuburan Belanda di bukit Kebokuning, Banyumas, Jawa Tengah. [1930]
Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 813/86

Masjid Besar Purwokerto tampak dari tenggara masjid, Purwokerto, Jawa Tengah. [1930]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 806-34

Masjid Besar Purwokerto pada masa Agresi Militer Belanda 1947

Sumber : Dinas Arsip dan Perpusatakaan Daerah Kabupaten Banyumas

Masjid Besar Purwokerto tahun 1949

Sumber : Dinas Arsip dan Perpusatakaan Daerah Kabupaten Banyumas

Hasan Satir, S.H., menyampaikan sambutan dalam kegiatan pemutaran film 'Njanjian di Lereng Dieng' di Purwokerto. Di kiri belakang adalah sutradara 'Njanjian di Lereng Dieng', Bachtiar Siagian. 20-24 Februari 1965

Sumber : ANRI, PT BNI 1946-1972 No. 884

Seorang pria berdiri sambil memegang secarik kertas didampingi oleh perwakilan dari BNI dan kru film 'Njanjian di Lereng Dieng'. Di sebelahnya adalah Hasan Satir, S.H., dan sutradara film 'Njanjian di Lereng Dieng', Bachtiar Siagian. 20-24 Februari 1965

Sumber : ANRI, PT BNI 1946-1972 No. 887

Para siswa-siswi dan perwakilan BNI berfoto bersama di depan sumur hasil kerja sama antara BNI, Saudara Radikun, Fa A. Sinaga, CV Banyumas, Saudara Tjung, dan siswa SMA II Purwokerto. 20-24 Februari 1965.

Sumber : ANRI, PT BNI 1946-1972 No. 910 dan 911

Arca Garuda dai batu ditemukan di Karang Wangkal, Banyumas. Sekarang koleksi disempan di Museum Nasional Jakarta

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 1150/86

Suasana pasar malam di Purwokerto masa Hindia Belanda, Tahun 1940-an

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

CALUNG BANYUMAS DAN JAWA BARAT

Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA

Sertifikat Sertifikat Calung Banyumas dan Jawa Barat sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 16 Desember 2013

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Sertifikat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya

BEGALAN BANYUMAS

dari Provinsi Jawa Tengah

sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy

Sertifikat Begalan Banyumas sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 10 Oktober 2018

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Nomor : 103616/MPK.E/KB/2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Menetapkan Karya Budaya

LENGGER BANYUMAS

dari Provinsi Jawa Tengah
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 8 Oktober 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy

Sertifikat Lengger Banyumas sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 8 Oktober 2019

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Pendidikan

Sekolah Tionghoa yang dibangun oleh Tiong Hoa Hwee Koan Purrokerto berbahasa Belanda tahun 1925. Sekarang bangunan menjadi Polsek Purwokerto Lor

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Murid sekolah rakyat di Purwokerto tahun 1930an

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Murid Sekolah Rakyat Susteran Purwokerto tahun 1930an

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

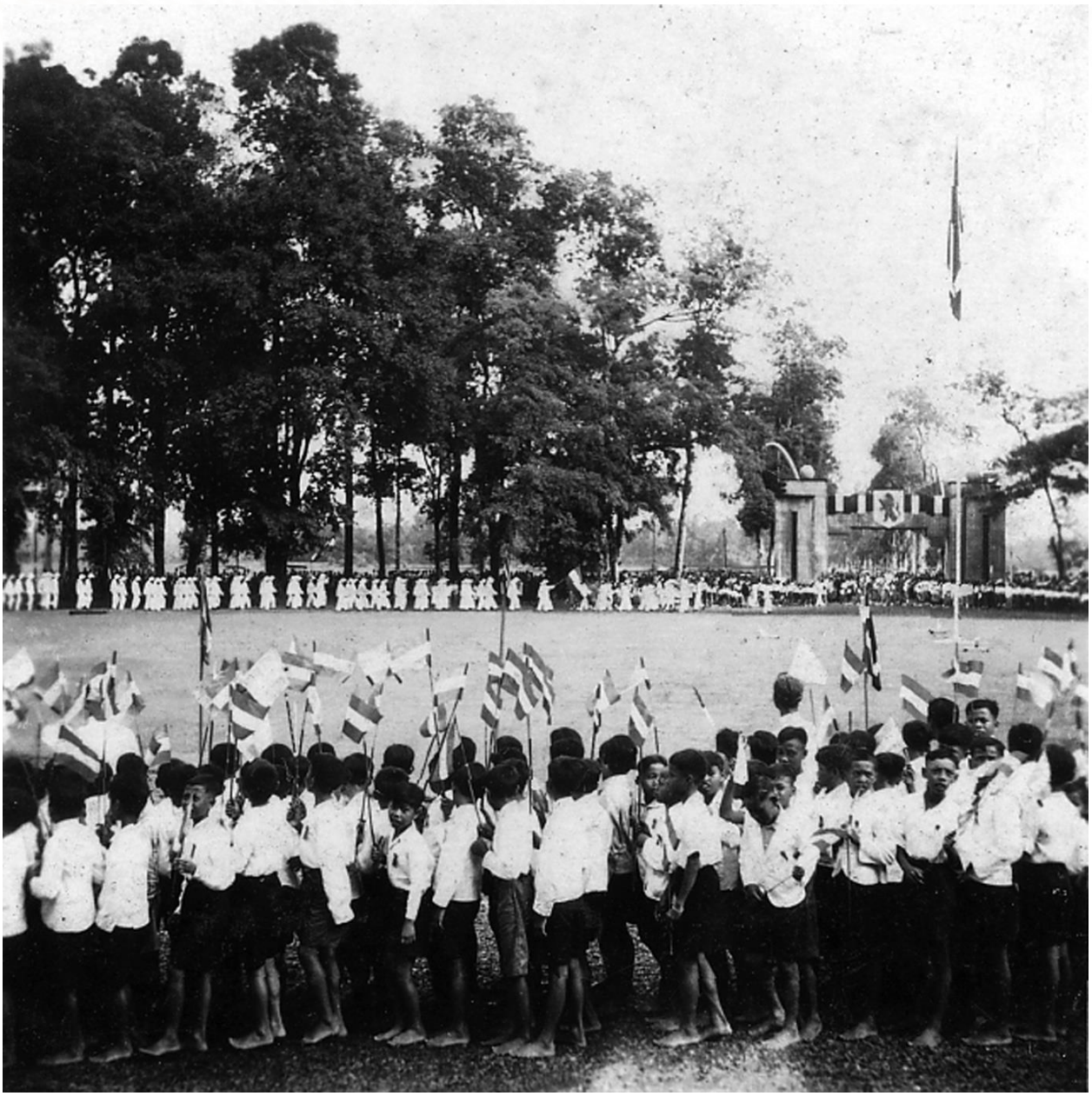

Anak-anak sekolah wajib mengikuti karnaval perayaan Jubileum Koningen Wilhelmina di lapangan Prins Bernhard Glempang Purwokerto 1938

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

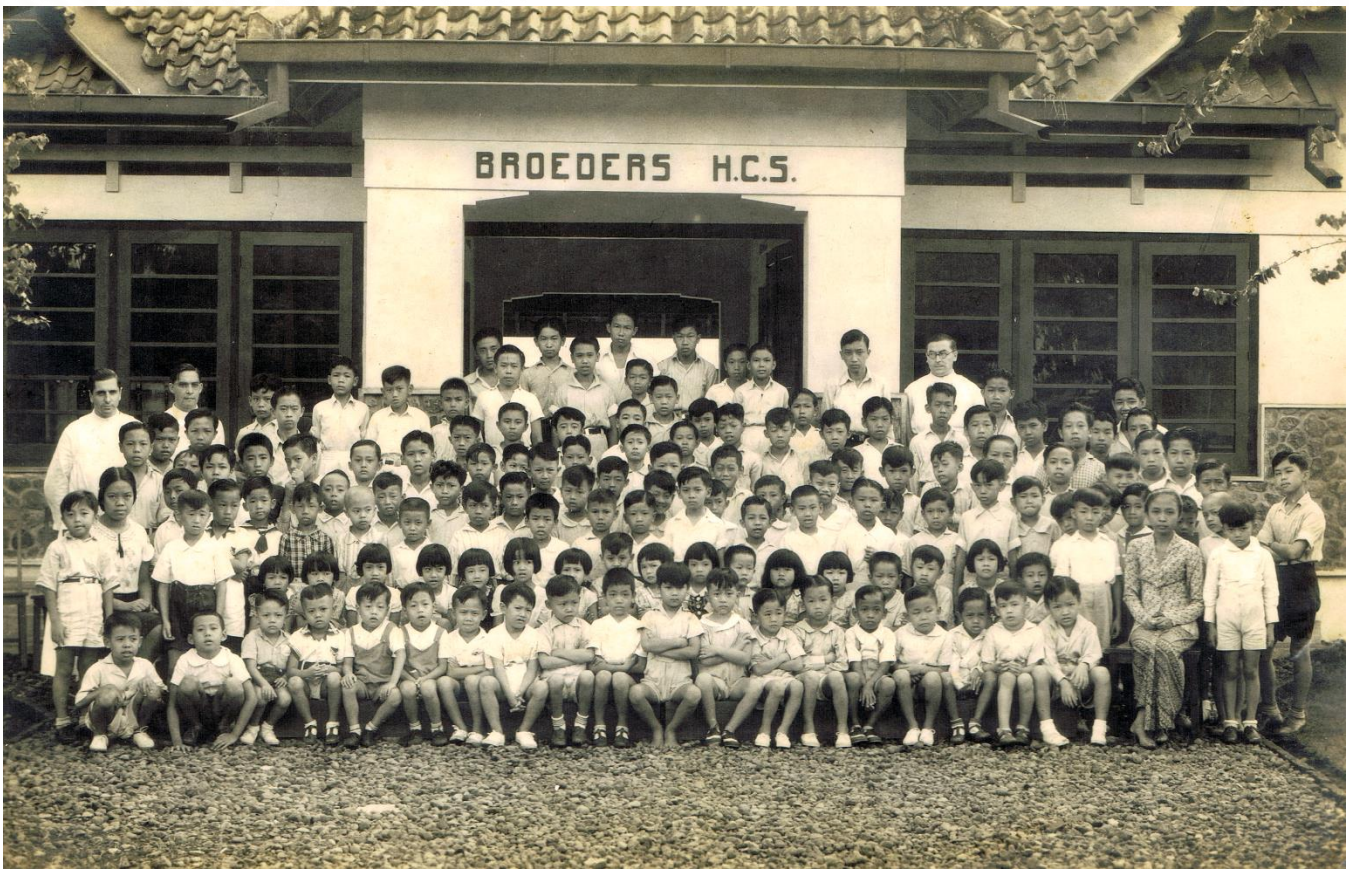

Broeders Europeesche Lagere School Poerwokerto tahun 1953

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0109 /0/1974
tentang

Mengubah Status SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas Menjadi SKKP Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Maret 1974 No. 2.1.0236.74.

Menimbang : a. bahwa SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;

b. bahwa di Wilayah Kecamatan Sumpyuh sampai saat ini belum ada SKKP Negeri ;

c. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Sumpyuh sehingga calon-calon yang masuk SKKP tersebut cukup banyak ;

d. bahwa adanya kesediaan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SKKP tersebut ;

e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas menjadi SKKP Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah telah dipenuhi ;

f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas menjadi SKKP Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;

b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 11 tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
Pertama : Mengubah Status SKKP Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas menjadi SKKP Negeri Sumpyuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga : .....

- 2 -

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.03.210
2202.02.2303.03.220
2202.02.2303.03.231
2202.02.2303.03.232
2202.02.2303.03.233
2202.02.2303.03.250
2202.02.2303.03.260
2202.02.2303.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973/1974 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu,
dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1974.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1974.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jendral,

(T. Umar Ali).-

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0109/O/1974 tentang Mengubah Status SKKP Persiapan Negeri Sumpyuh, Kabupaten Banyumas menjadi SKKP Negeri Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, disertai berkas pendukung.

6 Mei 1974

Sumber : ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 1169

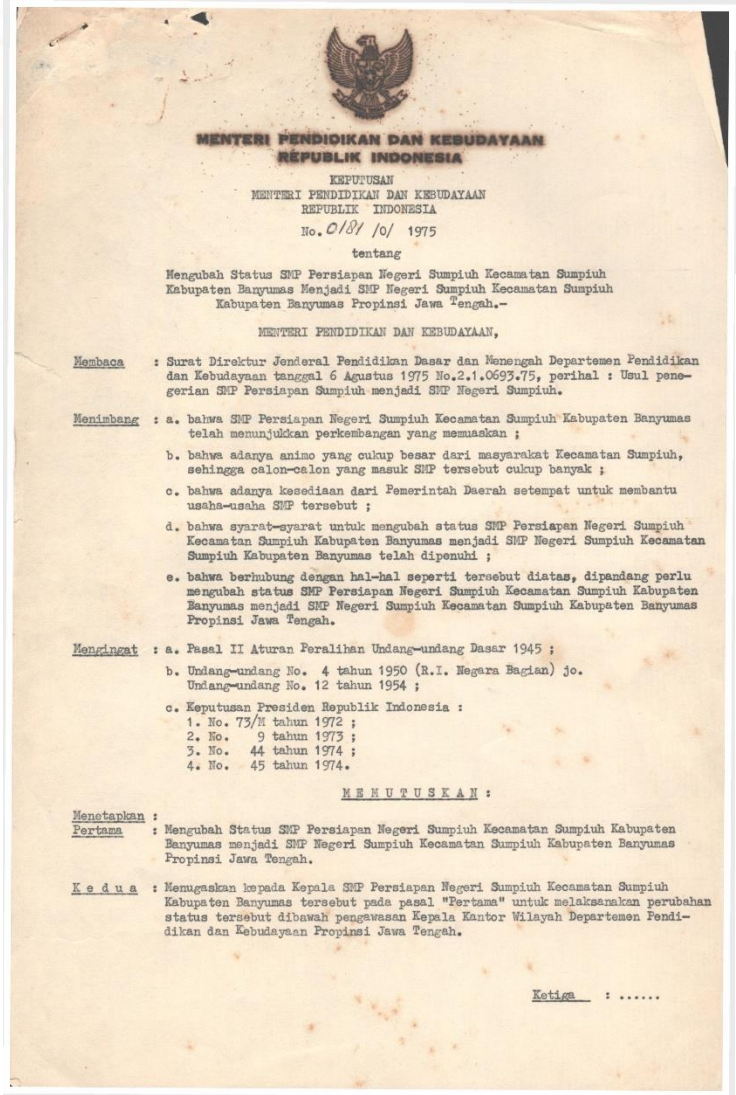

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0181 /0/ 1975

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Menjadi SMP Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Agustus 1975 No.2.1.0693.75, perihal : Usul penegerian SMP Persiapan Sumpiuh menjadi SMP Negeri Sumpiuh.

Menimbang : a. bahwa SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Sumpiuh, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;

c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;

d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah dipenuhi ;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;

b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga : .....

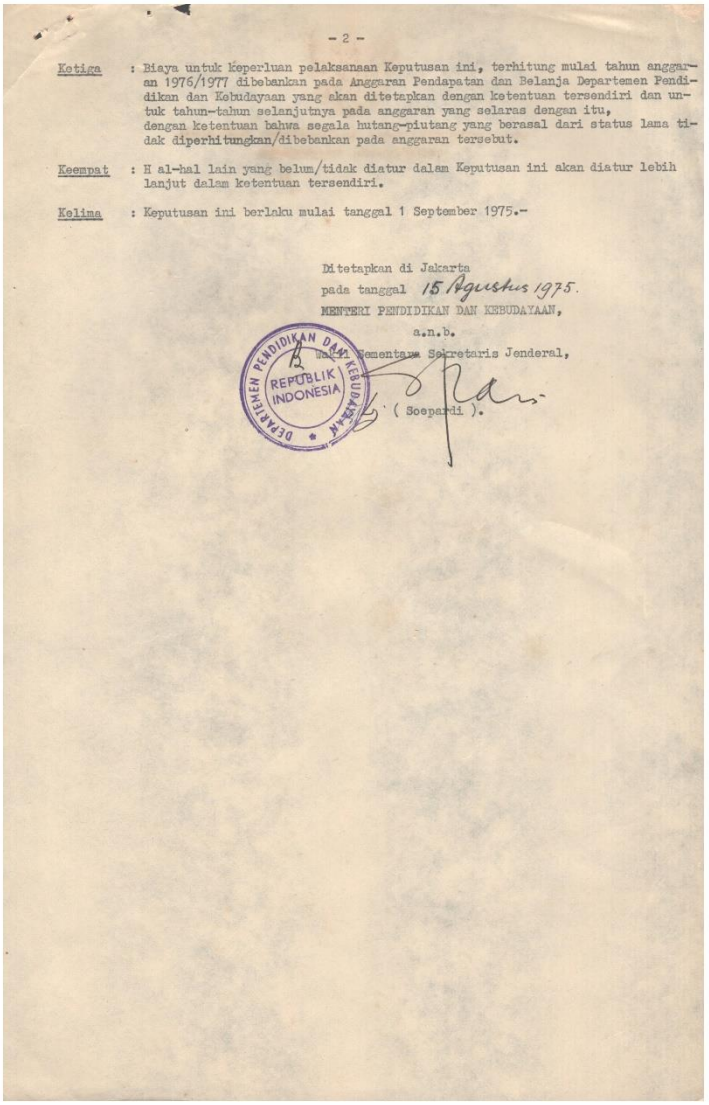

- 2 -

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini, terhitung mulai tahun anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : H al-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 1975.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1975.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

(Soepardi).

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0181/O/1975 tentang Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, disertai berkas pendukung. 15 Agustus 1975.

Sumber : ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 1513

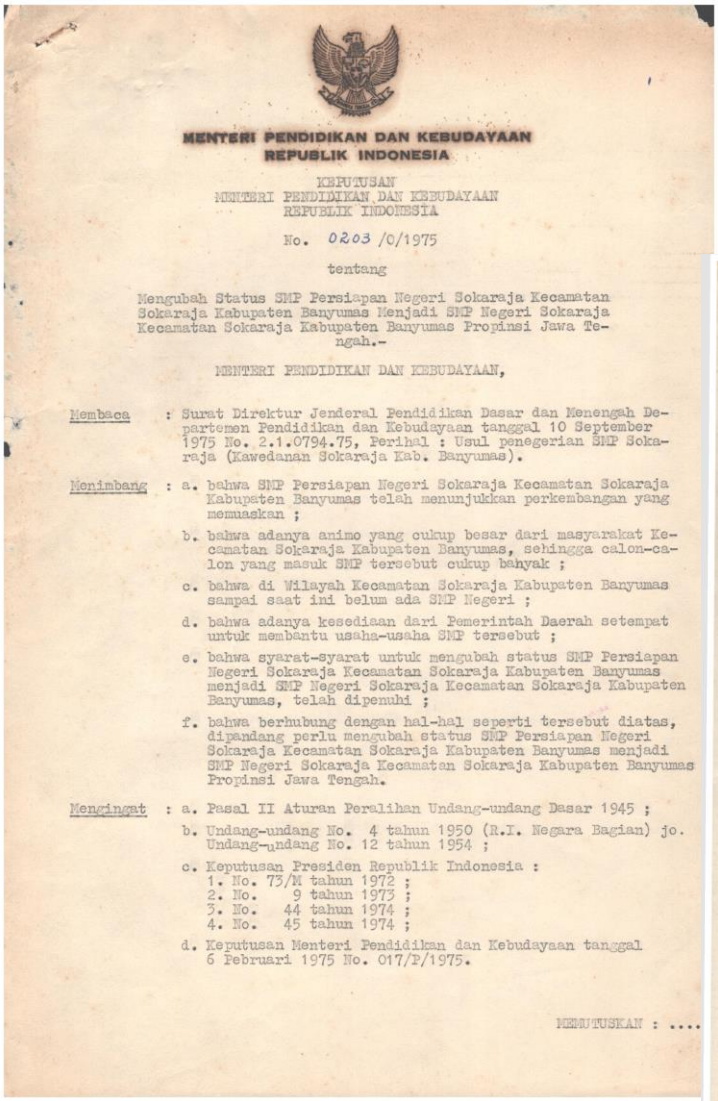

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0203 /O/1975

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menjadi SMP Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1975 No. 2.1.0794.75, Perihal : Usul penegerian SMP Sokaraja (Kawedanan Sokaraja Kab. Banyumas).

Menimbang : a. bahwa SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;

c. bahwa di Wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;

d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;

e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, telah dipenuhi ;

f. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;

b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Pebruari 1975 No. 017/P/1975.

MENUTUSKAN : ....

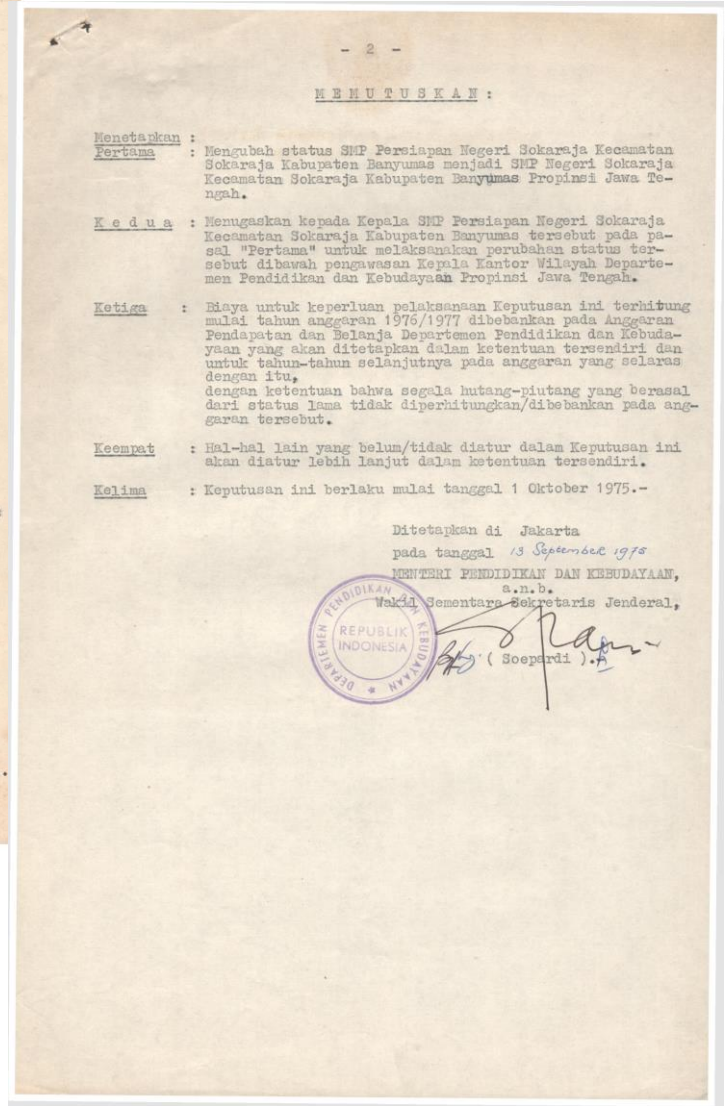

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menjadi SMP Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini terhitung mulai tahun anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu,
dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1975
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

(Soeparti).

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0203/O/1975 tentang Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menjadi SMP Negeri Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, disertai berkas pendukung. 13 September 1975

Sumber : ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 1534

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 195 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi keperluan akan tenaga-tenaga ahli dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan melihat alat-alat jang tersedia, perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Purwokerto;

Mengingat : Pasal 18 ajat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;

Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1963, mendirikan Universitas Negeri di Purwokerto jang untuk pertama kalinja terdiri atas :

1. Fakultas Pertanian;
2. Fakultas Biologi;
3. Fakultas Ekonomi.

KEDUA : Memisahkan Fakultas Pertanian di Purwokerto dari Universitas Diponegoro dan memasukkannja kedalam lingkungan Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama".

KETIGA : Kepada Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama" diberi nama "Universitas Djenderal Sudirman".

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Para Sekretaris Negara,
5. Sekretariat Negara,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perantjang Nasional,
8. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
9. Lembaga Administrasi Negara,
10. Biro Pusat Statistik,
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
12. Para Rektor/Ketua Presidium Universitas/ Institut Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno.

S U K A R N O.

Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Purwokerto, Dan Memisahkan Fakultas Pertanian Di Purwokerto Dari Universitas Diponegoro. 23 September 1963

Sumber : ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No.7618

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0311 /M/1983

tentang

Penghapusan Gedung Lama Sekolah Teknik Negeri I Jalan Pramuka No. 42 Banyumas.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : a. Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1983 No. S.291/MK.011/1983 Perihal: Permohonan izin penghapusan/pembongkaran bangunan lama Sekolah Teknik Negeri I di Jalan Pramuka No. 42 Banyumas;

b. Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Juni 1983 No.164/Bipan/5/83, Hal Permohonan SK Penghapusan/pembongkaran bangunan lama Sekolah Teknik Negeri I Jalan Pramuka No.42 Banyumas.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Juni 1972 No.096/M/1972 dan No.097/M/1972 dipandang perlu menghapuskan gedung lama Sekolah Teknik Negeri I di Jalan Pramuka No.42 Banyumas dari daftar inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1970;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1982;
3. No. 47 tahun 1979;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;
6. No. 18 tahun 1981;
7. No. 45/M tahun 1983;

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1970;

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juni 1972 No. 096/M/1972;
2. tanggal 17 Juni 1972 No. 097/M/1972;
3. tanggal 11 September 1980 No.0222h/0/1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menghapuskan gedung lama Sekolah Teknik Negeri I Jalan Pramuka No.42 Banyumas dari daftar inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara.

K e d u a : a. Pelaksanaan penghapusan gedung lama seperti tersebut pada pasal "Pertama", mengingat kondisi fisik bangunan sudah lapuk supaya dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam;

b. Berita Acara Pemusnahan dan dokumentasi yang diperlukan agar segera dikirimkan ke Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Kepala Biro Perlengkapan dalam rangka 3 (tiga).

Ketiga : .....

2

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 juli 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

S. (Soetanto Wirjoprasonto).-

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0311/M/1983 tentang Penghapusan Gedung Lama Sekolah Teknik Negeri 1 Jalan Pramuka Nomor 42 Banyumas. 9 Juli 1983

Sumber : ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 4645

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0529 /O/1986
tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN AKADEMI PERTANIAN HKTI
DI BANYUMAS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi di lingkungan Akademi Pertanian HKTI di Banyumas untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;

b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program D III ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 40/M Tahun 1980 ;
c. No. 45/M Tahun 1983 ;
d. No. 15 Tahun 1984 ;
e. No. 138/M Tahun 1985 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/O/1981 ;
d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/O/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
f. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/O/1982 ;
g. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/O/1986 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan : .....

- 2 -

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang dengan surat tanggal 18 Juni 1986 No. 1178/K/04.04/Kop.VI/1986 ;

2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta tanggal 4 - 5 Juli 1986 di Jakarta

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberi status Terdaftar kepada jurusan/program studi di lingkungan Akademi Pertanian HKTI di Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia, yang meliputi :

1. Jurusan/Program Studi Budidaya Pertanian ;
2. Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian ;

untuk Program D III, dengan ketentuan :

a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa jurusan/program studi di lingkungan Akademi Pertanian HKTI di Banyumas tersebut di atas diwajibkan menempuh ujian negara ;

b. untuk mempunyai efek sebagai dimaksud di atas ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditandasahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

K e d u a : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa jurusan/program studi di lingkungan Akademi Pertanian HKTI di Banyumas sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1986
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

(Soetarto Wirjoprasonto)

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0529/O/1986 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Akademi Pertanian HKTI di Banyumas. 4 Agustus 198

Sumber : ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 6759

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PADA UPACARA PERINGATAN
HARI PRAMUKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 1980,
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 1980, DI BUMI
PERKEMAHAN KENDALISADA, BANYUMAS,
JAWA TENGAH

Para hadirin yang saya hormati;
Anak-anakku Pramuka Putera-Puteri;
Salam Pramuka !

Hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-19. Karena itu pertama-tama dari tempat ini saya sampaikan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya kepada Pramuka Indonesia di seluruh wilayah Tanah Air ini.

Hari Pramuka sebenarnya jatuh pada tanggal 14 Agustus. Namun karena tahun ini hari itu

bertepatan....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kita percaya bahwa Gerakan Pramuka akan dapat menjawab tantangan zaman tadi. Pengalaman 19 tahun usia Pramuka tentu meninggalkan pelajaran yang sangat banyak dan berharga, baik yang pahit maupun yang manis. Pengalaman-pengalaman itu perlu kita kaji bersama dan kita nilai untuk kita kembangkan dan kita sempurnakan bagi pelaksanaan tugas di masa datang.

Dalam tahun-tahun mendatang Gerakan Pramuka perlu menyusun program yang lebih mantap lagi dalam ikut serta melaksanakan dan mengamankan pembangunan masyarakat Indonesia yang moderen. Gejala kenakalan remaja misalnya, tidak dapat hanya kita atasi dengan menyalahkan anak-anak dan remaja kita tanpa langkah-langkah nyata dari orang tua dan masyarakat untuk menunjukkan jalan yang benar bagi anak-anak kita sendiri itu.

Dengan .....

Naskah amanat pada upacara peringatan hari Pramuka Tingkat Nasional Tahun 1980, di Bumi Perkemahan Kendalisada, Banyumas, Jawa Tengah. 17 September 1980

Sumber : ANRI, Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 No 1011.11

Kesehatan

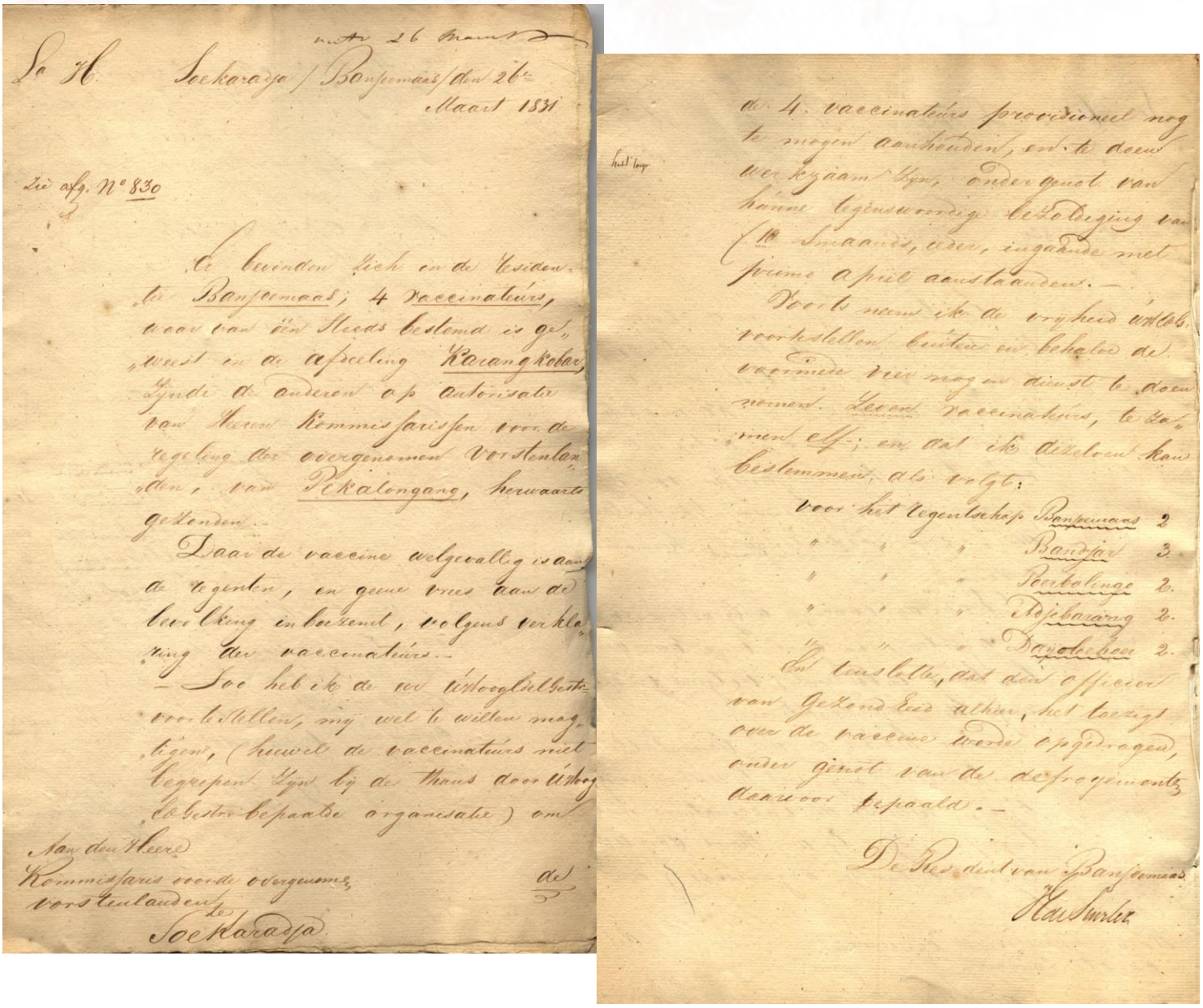

Surat dari Residen Banyumas kepada komisaris pengambil alihan wilayah vorstenlanden tentang ada 4 orang wanita cacat di Banyumas dan masih diminta 7 orang lagi sehingga seluruhnya ada 11 orang ditugaskan di Kabupaten Banyumas, Banjar, Purbolinggo, Ajibarang, Daijoluhur, Maret 1831.

Sumber : ANRI, Banjoemas No. 16.2

Malaise menyebabkan penyakit hongeroedeem (busunglapar) di Kabupaten Banyumas pada tahun 1933

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Jawa Tengah No. 5603-1271

Pemeriksaan masyarakat oleh dokter Tionghoa untuk mengatasi masalah Hongeroedeem (busung lapar) di Kabupaten Banyumas pada tahun 1933

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Jawa Tengah No. 5603-1272

Rumah Sakit Joeliana satu-satunya rumah sakit milik pemerintah di kota Banyumas pada masa agresi militer 1947

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Para murid Sekolah Rakyat dalam peringatan hari ulang tahun Palang Merah Remaja ke 11 di Purwokerto 12 Mei 1958

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

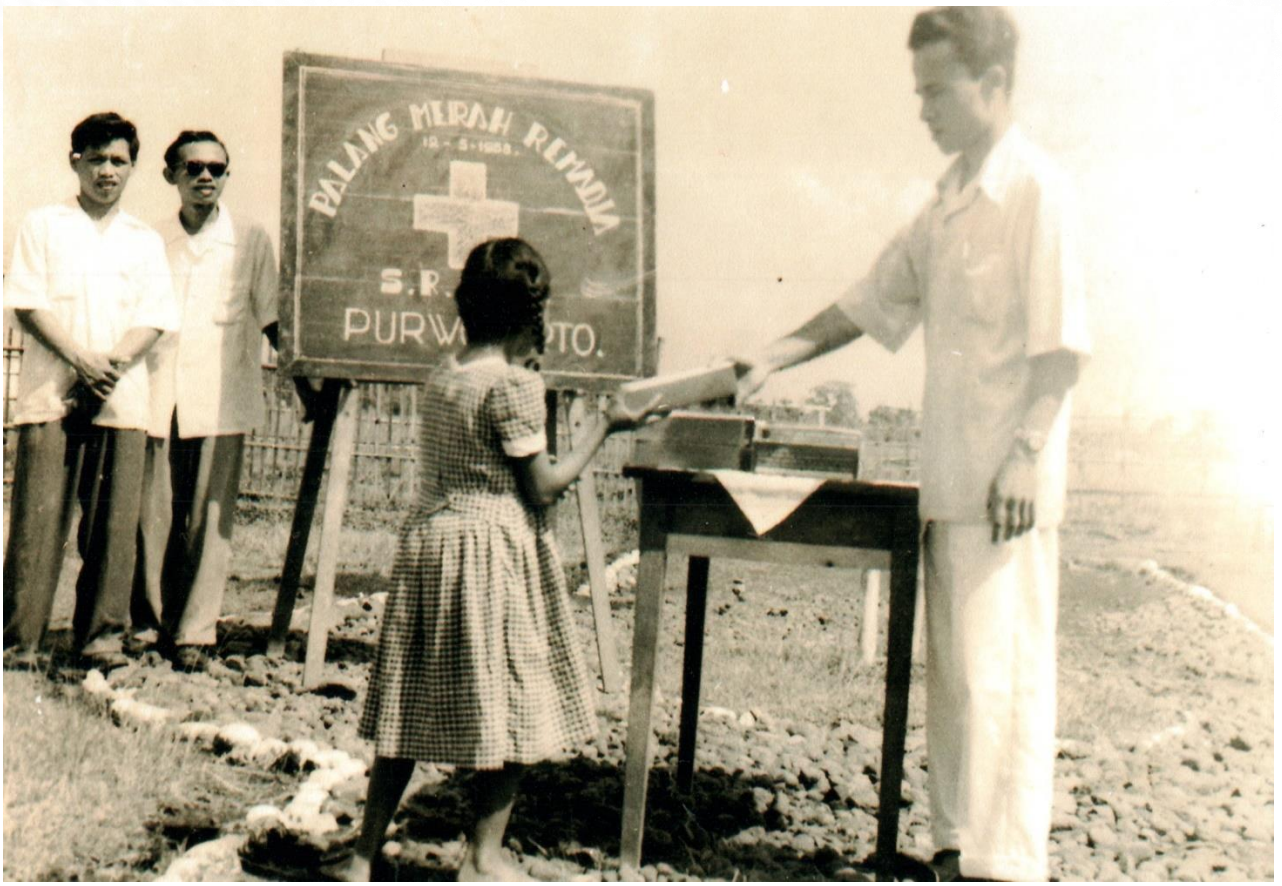

Seorang murid Sekolah Rakyat menerima bingkisan hadiah pada acara ulang tahun Palang Merah Remaja 12 Mei 1958

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Perekonomian

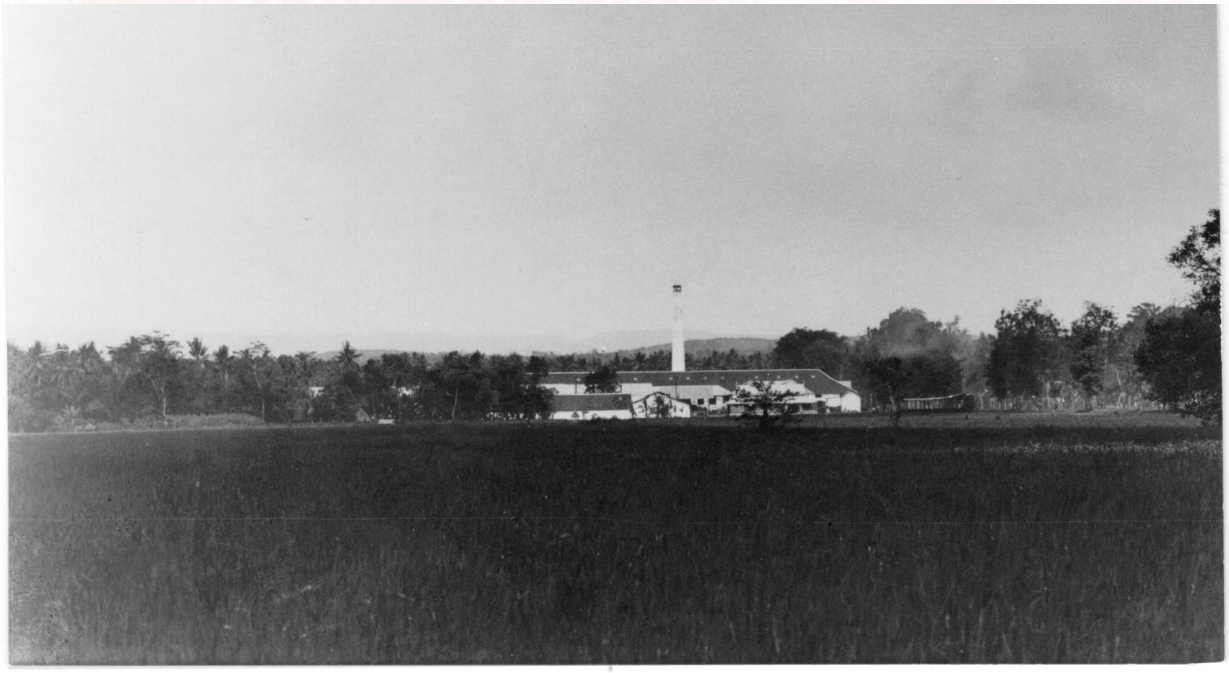

Pabrik Gula Kalibagor dilihat dari Sokaraja Banyumas Jawa Tengah. Tahun 1910

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 250/50

Pegawai pribumi di pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. [1930]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 579/57A

Jenis gula Lontar dari Madura, gula Kelapa dari Banyumas dan Gula Aren dari Banten kemungkinan tahun 1920

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 586/30

Gedung De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank Poerwokerto 1922-1930

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Deretan toko mas di kompleks pasar Wage dan Standplaats Pasar Wage Purwokerto tahun 1960

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Beberapa toko milik Tionghoa di pasar Wage Purwokerto, tampak jalur kereta api milik Serajoedal Stoomtram Maatschappij dan gardu listrik milik Electrict Maatschappij Banjoemas tahun 1928

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Pasar malam yang menggabungkan antara hiburan, pasar murah, promosi produk dan pameran lokal dilaksanakan pada masa perang tahun 1947

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Pariwisata

Hotel Besar Purwokerto Milik The Han Kei

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Lokawisata Baturraden, Tahun 2020

Sumber : Dinporbudpar Kabupaten Banyumas

Nomor : 60091/MPK.E/KB/2017

Sertifikat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya

GETHUK GORENG SOKARAJA

dari Provinsi Jawa Tengah

sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 4 Oktober 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy

Sertifikat Gethuk Goreng Sokaraja sebgai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

4 Oktober 2017

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Pertanian

Pembukaan hutan untuk perluasan lahan perkebunan Krumput yang terletak antara kota Banyumas dan Buntu tahun 1909

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Foto bersama pejabat perkebunan dan pekerja pembukaan lahan untuk perkebunan Krumput tahun 1909

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Kompleks perumahan pegawai perkebunan karet Krumput, Banyumas, Jawa Tengah. 1920

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 153/64

Rumah administratur perkebunan karet, Krumput, Banyumas, Jawa Tengah 1920

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 639/37

Pohon kelapa desa Ketenger daerah utara Purwokerto, Jawa Tengah, 1949.
Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 961/27

IRO PUSAT STATISTIK
IK TANAMAN PERDAGANGAN
KOTAK POS 3
A K A R T A

LAPORAN PERKEBUNAN
BULAN : NOPEMBER 1977.

LUAS TANAMAN, PRODUKSI DAN PERSEDIAAN

AN HARAP DIKIRIM SEBELUM TGL. 10 PADA BULAN BERIKUTNYA!

Perlu dijelaskan bahwa pemberian bahan2 keterangan yang diminta dalam dafta ini diwajibkan dalam Undang2 No. 7 tahun 1960 tentang statistik.(Lembaran Negara No. 109 tahun 1960)

Nama Perkebunan : PTP.XVIII(Persero) Keb.Krumput. Alamat pos : Banyumas Telp No.2
" Pemilik : PTP.XVIII(Persero) Semarang. " " :Jl.Mugas Dalam Atas, di Semarang
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama pengusaha : Soedadijo " " :Banyumas Telp. No.2
Lokasi Daerah tingkat I : Jawa-Tengah,
Daerah tingkat II : Banyumas. Kecamatan : Banyumas.

A. LUAS TANAMAN

Harap diberikan keteranga tentang perubahan luas ta

1. Yang sudah dapat disadap : 1.240,26 Ha.
2. Yang belum dapat disadap : 296,30 "
3. Kebun2 pesemaian/induk dsb.: 0,90 "
4. Kebun2 yang tidak berguna : lagi(tanaman tua/rusak) : ..... "
Jumlah(1+2+3+4) : 1.537,46 ha.
5. Yang ada dalam penyadapan : 1.240,26 ha.

B. PRODUKSI Target tahun takwim 1977 : 1.000.000 kg. karet ker

P r o d u k s i t e r h i t u n g kg k a r e t k e r i n g

Berasal dari	Dalam bulan pemberitaan Nopember 1977						Dalam tah takwim ini sampai akh bulan pembe 1)
	Sheets	Pale Crepe	Brown Crepe	Mutu *) lainnya	Latex **)	Jumlah	
1. Perkebunan sendiri	58.985	-	-	4.194	-	63.179	1.116.349
2. Pembelian dari rakyat	-	-	-	-	-	-	-
3. Perkebunan lain, ialah:	-	-	-	-	-	-	-
perk.	-	-	-	-	-	-	-
"	-	-	-	-	-	-	-
"	-	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah (1+2+ 3)	58.985	-	-	4.194	-	63.179	1.116.349

*) Seperti thin brown/thick brown remilled crepe, unsmoked sheets, flat bark c pe, centrifuged/cream latex, slabs, lumps, scraps getah tanah, S.I.R., dll.
**) Hanya hasil latex murni yang tidak diolah lebih lanjut.

C. PERSEDIAAN DI PERKEBUNAN (terhitung karet kering 2).

1. Persediaan pada akhir bulan yang lalu 1) ..... : 23.256
2. Produksi dalam bulan pemberitaan 2) ..... : 63.179
Jumlah : 86.435
3. Yang diangkut dalam bulan pemberitaan:
a. untuk ekspor P.T.Yala Githa Dwi Tegal : 53.330 kg.
b. untuk pemakaian dalam negeri Rem./Pros. 1.354 " : 54.684
4. Persediaan pada akhir bulan pemberitaan (1+2 - 3) ..... : 31.751

1) Termasuk kelebihan/kekurangan timbangan yang [illegible] dicatat kemudian.
2) Hanya diisi oleh perkebunan yang mengolah [illegible] untuk menjadi karet keri

PENJELASAN:
Hasil afv.product dalam bulan ini ± :
a. 2.840 kg.diolah dikebun

DIISI DENGAN SEBENARNYA:
Krumput, 5 Desember 1977.
Administratur,
(SOEDADIJO).

Laporan perkebunan bulanan tentang luas tanaman, produksi, persediaan karet kering dari PT Perkebunan XVIII (Persero) di Banyumas, Jawa Tengah. 5 Desember 1977

Sumber : ANRI, Kementerian Pertanian RI 1950-2009 No. 6082

BIRO PUSAT STATISTIK
STATISTIK TANAMAN PERDAGANGAN
JL.DR.SUTOMO 8
J A K A R T A

KARET

LAPORAN STATISTIK TANAMAN PERDAGANGAN
BULAN : JANUARI 1979

LUAS TANAMAN , PRODUKSI DAN PERSEDIAAN

LAPORAN HARAP DIKIRIM SEBELUM TGL.10 PADA BULAN BERIKUTNYA

Perlu dijelaskan bahwa pemberian bahan2 keterangan yang diminta dalam daftar ini diwajibkan dalam Undang2 No. 7 tahun 1960 tentang statistik.(Lembaran Negara No.109 th.1960)

Nama Perkebunan : PTP.XVIII (Persero) Kb.Krumput/Kubak. Alamat Pos : Banyumas Tilp.Bms.28
" Pemilik : PTP.XVIII (Persero) Semarang . " " :Jln.Hugas Dalam(Atas) Semarang.
Kewarganegaraan : Indonesia " " :Banyumas Tilp.Bms.28
Nama Pengusaha : Soedadijo
Lokasi Daerah tingkat I: Jawa Tengah
Daerah tingkat II: Banyumas Kecamatan : Banyumas

A. LUAS TANAMAN — Harap diberikan keterangan tentang perubahan luas tanaman

1. Yang sudah dapat disadap : 1293,26 ha .....
2. Yang belum dapat disadap : 221,- " .....
3. Kebun2 pesemaian/induk dsb.: 0,90 " .....
4. Kebun2 yang tidak berguna lagi(tanaman tua/rusak) : 25.- " .....
Jumlah(1+2+3+4) : 1540,16 ha
. Yang ada dalam penyadapan : 1069,50 ha

B.PRODUKSI

Target tahun takwin 1979 : 1.400.000 kg karet kering

Produksi terhitung kg karet kering

Berasal dari	Dalam bulan pemberitaan : Januari 1979						Dalam tahun takwin sampai akhir bln pemberitaan
	Sheets	Pale Crepe	Brown Crepe	Mutu *) lainnya	Latex **)	Jumlah	
1.Perkebunan sendiri	115.404			6.099		121.503	121.503
2.Pembelian dari rakyat	-			-		-	-
3.Perkebunan2 lain ialah : perk. ..... "							
4.Jumlah (1+2+3)	115.404			6.099		121.503	121.503

). Seperti thin brown/thick brown remilled crepe,unsmoked sheets,flat bark crepe,centrifuged/ cream latex,slabs,lumps,scraps getah tanah,S.I.R. dll.
*). Hanya hasil latex murni yang tidak diolah lebih lanjut.

C. PERSEDIAAN DI PERKEBUNAN (terhitung karet kering)

1. Persediaan pada akhir bulan yang lalu 1) ..... : 27.017 kg
2. Produksi dalam bulan pemberitaan 2) ..... :121.503 kg
Jumlah :148.520 kg
3. Yang diangkut dalam bulan pemberitaan :
a.untuk ekspor P.T.Yala Githa Dwi Tegal..... : 111.870 kg
b.untuk pemakaian dalam negeri C.V.Asia Mojokerto
C.V.Jadi Jaya MakmurSmg.: 6.099 kg :117.969 kg
4. Persediaan pada akhir bulan pemberitaan (1+2-3) ..... : 30.551 kg

1)Termasuk kelebihan/kekurangan timbangan yang tercatat kemudian.
2)Hanya diisi oleh perkebunan yang mengolah karet mentah menjadi karet kering.

PENJELASAN :
Hasil afd.produk dalam bulan ini ± 6.099 kg (Remilling/Prosus) dikirim ke C.V.Asia Mojokerto dan P.T.Jadi Jaya Makmur Semarang.

DIISI DENGAN SEBENARNYA :
Krumput, 21 Februari 1979
Administratur
SOEDADIJO

Surat pengantar dari PT Perkebunan XVIII (Persero) kepada Kepala Biro Pusat Statistik mengenai penyampaian laporan luas tanaman, produksi dan persediaan karet pada Kebun Krumput/Kb. Kangkung bulan Januari 1979. 21 Februari 1979

Sumber : ANRI, Kementerian Pertanian RI 1950-2009 No. 6143

DEPARTEMEN PERTANIAN R.I.
DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN
MAKANAN TERNAK
BATURRADEN - PURWOKERTO.
Telp.716-Kotak Pos 13.
—=oSKMO=—

BATURRADEN, 24 April . . .-. 1979.-

Kepada Yth.:
Kepala Biro.Perencanaan . . . .
. . Departemen Pertanian . . . .
Jalan Imam Bonjol .29 . . . . .
di . . J A K A R.T.A..

Nomor : 469/KIVUm/PT&HM/E/IV/79.

SURAT - PENGANTAR :

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Tahunan Tahun: 1977/1978 dari Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Baturraden - Purwokerto.	1 (satu) buku.	Dikirimkan dengan hormat untuk dapat di pergunakan seperlunya.
2.	Laporan Tahunan Tahun:1976/1977 dari Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Baturraden - Purwokerto.	1 (satu) buku.	

Lembar Ke-II ini setelah ditanda tangani harap kembalikan pada Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak Baturraden - Purwokerto.

Tanda - Terima,

(. . . . .).-

BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN
MAKANAN TERNAK
BATURRADEN - PURWOKERTO,
Kepala,

DEPARTEMEN PERTANIAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK BATURRADEN DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN

(Drh. SOEDIJONO).-
NIP.080015573.-

Laporan Progres Tahunan Proyek Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Baturaden Purwokerto Tahun Anggaran 1976/1977-1977/1978. 24 April 1979

Sumber : ANRI, Kementerian Pertanian RI 1950-2009 No. 1534

Infrastruktur

Tempat tinggal Wilkenson di Purwokerto yang asri dan berhalaman luas, Jawa Tengah. [1900]

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 216/90

Rumah tuan van Delden di Ajibarang, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 250/42

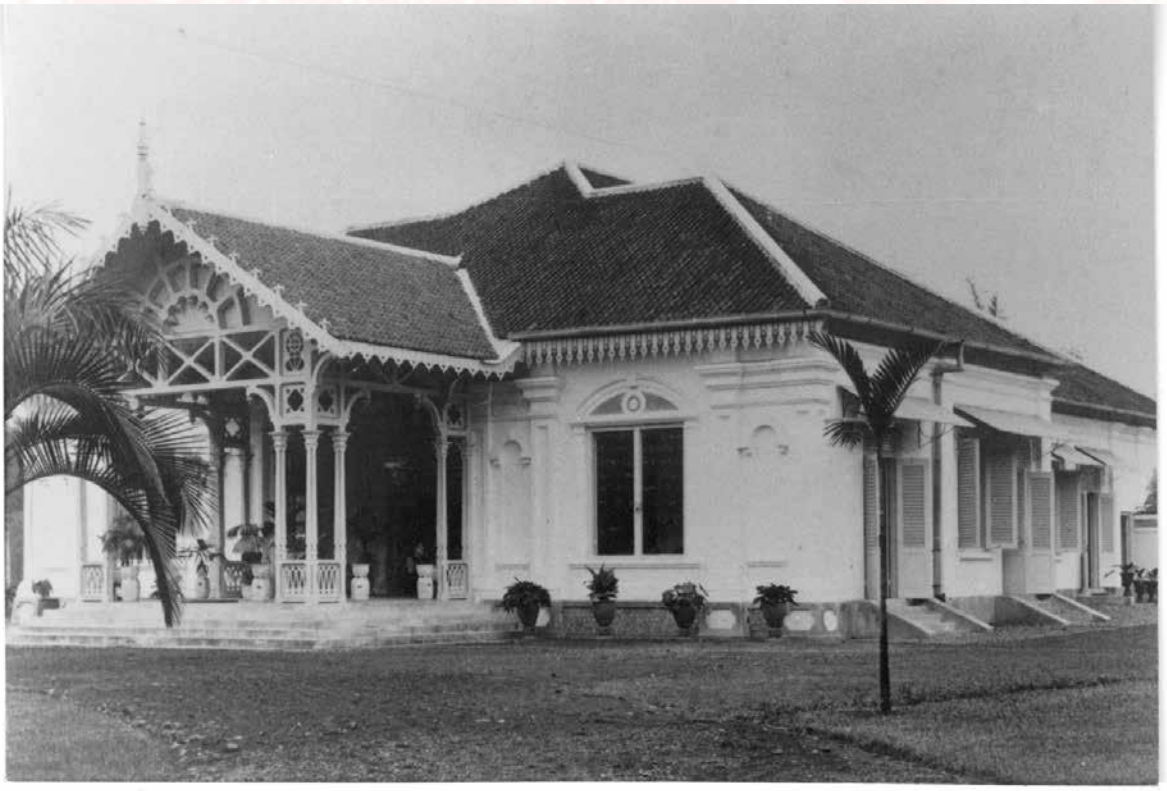

Rumah administratur pabrik gula Purwokerto yang dibangun pada tahun 1894, Purwokerto Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 250/72

Kantor administrasi Deli Planters ver, Purwokerto, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 781/40

Stasiun Purwokerto Timur milik Serajoedal Stoomtram Maatscappij yang dibangun pada tahun 1895 Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 250/46

Stasiun Purwokerto milik Staats Spoorwegen yang dibangun pada tahun 1915 Bantarsoka Purwokerto

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

Gedung Issola (gedung olah raga) yang menggunakan bekas pabrik gula Purwokerto yang tutup pada tahun 1936

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

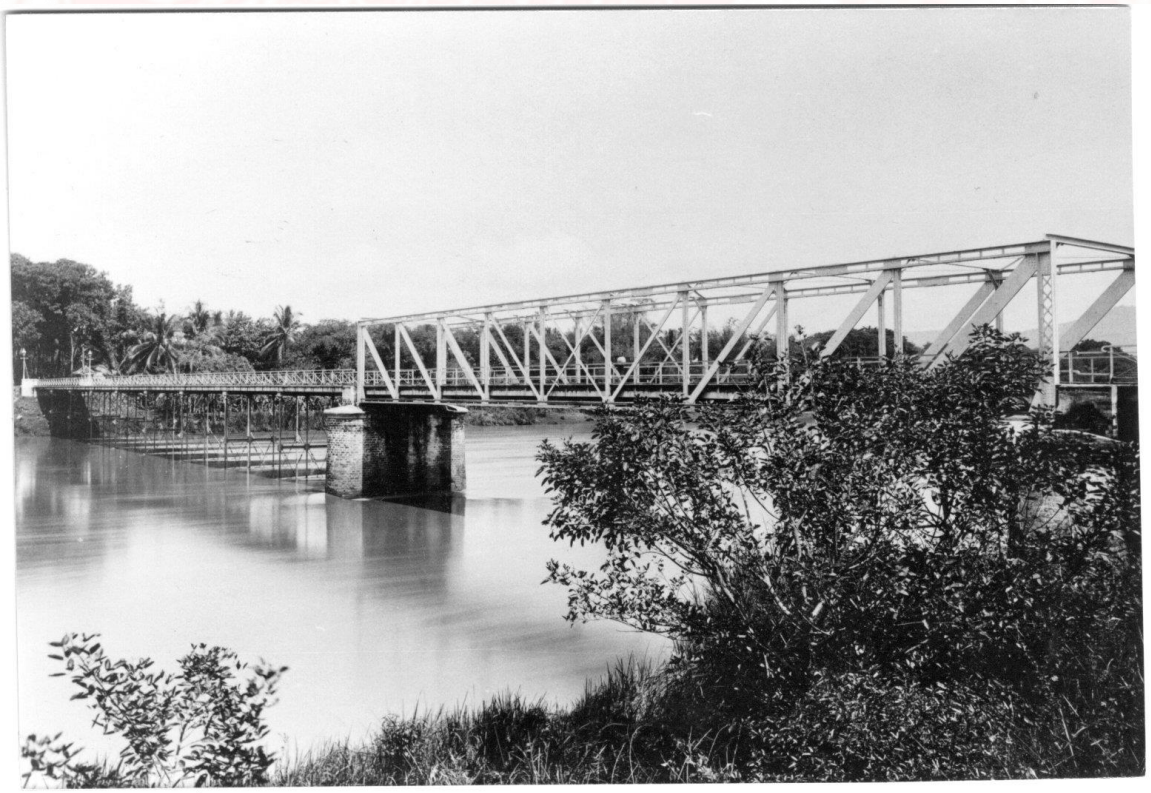

Jembatan di atas sungai Serayu yang menghubungkan Kota Banyumas dan Kota Sokaraja, dibangun pada tahun 1890

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 250/24

Jembatan di atas sungai Serayu yang menghubungkan Kota Banyumas dan Kota Sokaraja, dibangun pada tahun 1890

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 251/78

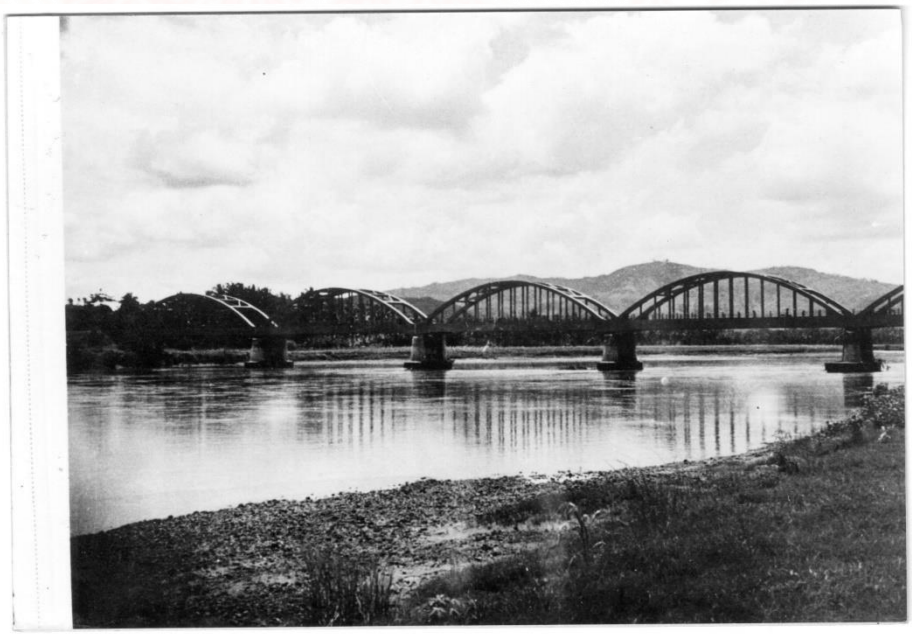

Pemandangan jembatan Rawalo di atas Kali Serayu yang dibangun oleh Ir. Soekarno Banyumas, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 515/40

Jembatan Rawalo yang dirancang oleh Ir. Soekarno diatas sungai Serayu Banyumas, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 515/10

Jembatan Kali Tajun yang diatasnya terdapat jalan menuju Ajibarang dekat Jambu, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 216/86

Jembatan lengkung di atas Kali Datar dekat Ajibarang dengan air terjun di utara Banyumas, Jawa Tengah.

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 960/43

Peresmian Jembatan Kereta baru diatas sungai Serayu, menggantikan jembatan lama yang dibangun tahun 1915 oleh Staats Spoorwegen.
20 September 1972

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas

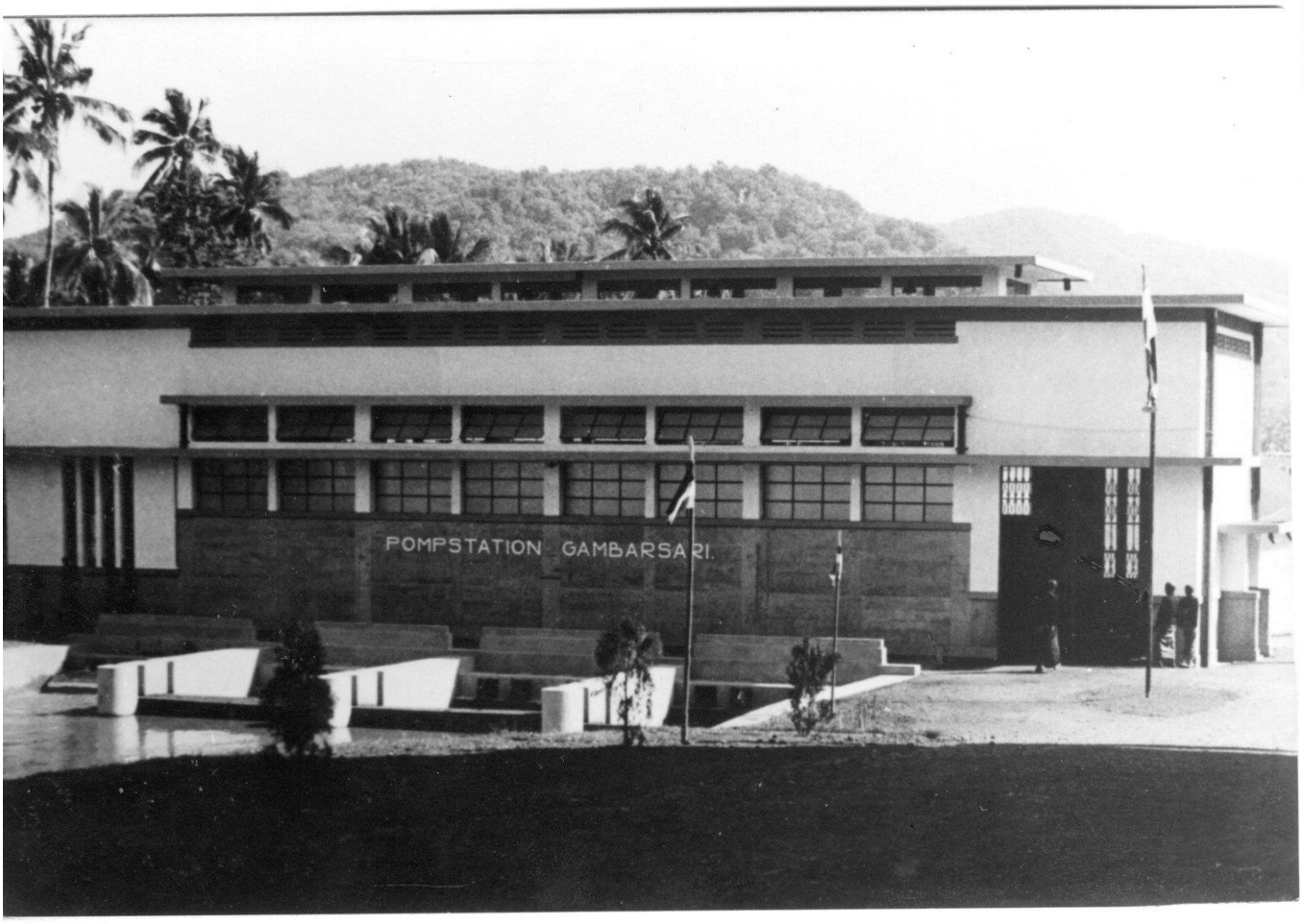

Stasiun pompa Gambarsari yang mengambil ari sungai Serayu di Banyumas tahun 1959

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah No. 1084/08

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PADA
PERESMIAN BENDUNG GERAK SERAYU, JARINGAN IRIGASI KECIL, JARINGAN IRIGASI PERDESAAN, JARINGAN IRIGASI AIR TANAH DI JAWA TENGAH, PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA CILACAP DAN WADUK SERMO PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 1996 DI DESA GAMBAR SARI, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara;

Saya merasa berbahagia hari ini saya dapat kembali berkunjung ke Jawa Tengah. Kedatangan saya ke Jawa Tengah kali ini adalah untuk meresmikan selesainya pembangunan berbagai proyek yang penting. Proyek-proyek yang akan saya resmikan itu adalah: Bendung Gerak Serayu, sejumlah jaringan irigasi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap dan Waduk Sermo.

Dengan selesainya Bendung Gerak Serayu dan sejumlah jaringan irigasi serta Waduk Sermo, maka air Sungai Serayu dan Kali Ngrancah,

anak Kali Serang ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18

Akhirnya, dengan ini saya nyatakan Bendung Gerak Serayu, Jaringan Irigasi Kecil, Jaringan Irigasi Perdesaan, Jaringan Irigasi Air Tanah di Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap, dan Waduk Sermo, secara resmi digunakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Desa Gambar Sari, 20 November 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Naskah sambutan pada peresmian Bend ung Gerak Serayu jaringan irigasi kecil, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi air tanah di Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap dan Waduk Ser mo di Desa Gambir Sari, Banyumas, Jawa Tengah. 20 November 1996

Sumber : ANRI, Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 No. 944.5

Jalan Inpres Silado Purwokerto tahun 1973

Sumber : Arsip bersama Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas dan Pusat Arsip Banjoemas History Heritage Community

Bencana Alam

Gunung Slamet di Banyumas 30 November 1953

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Jawa Tengah No. 5303-1461

Gunung Slamet di Banyumas 30 November 1953

Sumber : ANRI, Kementerian Penerangan Jawa Tengah No. 5303-1463

Letusan Gunung Slamet pada masa Revolusi Kemerdekaan.
20 September 1949
Sumber : Dinas Arsip dan Perpusatakaan Daerah Kabupaten Banyumas

DAFTAR PUSTAKA

Almanak en Naamregister van Nederlandsch Indie 1836 - 1867

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indie 1865 - 1935

Atmodikoesoemo, R. Soeyadi (1988) Babad Banyumas dan Sekitarnya,-

Basundoro, Purnawan., (2019). Arkeologi transportasi: Perspektif ekonomi dan kewilayahan keresidenan banyumas 1830-1940an, Surabaya : Airlangga Uninivesity PRESS

Brotodiredjo, R.M.S; Darmosuwondo, R. Ngatidjo (1967). Inti Silsilah dan Sedjarah Banjumas, .

De Graaf, H. J. (1987). Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat. Jakarta: Pustaka Grafitipers.

De Graaf, H. J. (1987). Runtuhnya Istana Mataram. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

De Graaf, H.J. (1985). Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati. terj. Grafiti Press dan KITLV. Jakarta: PT Grafiti Perss.

De Graff, H.J.; Pigeaud, TH. G. TH. (2019). Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI, cetakan V edisi revisi. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Hatmoko, Dwi., (2022) Purbalingga Berjuang 1942-1949: Merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Satria Indra Prasta Publishing.

Sumarmo Iwa., (1985). Indonesia Merdeka Atau Mati: Sejarah Pasukan Pelajar IMAM Selama Perang kemerdekaan 1945 - 1949, Keluarga Besar IMAM

Keluarga Ex Anggota BE XVII Tentara Pelajar CIE Purwokerto., (1979). Sejarah Perjuangan Tentara pelajar Purwokerto, PT INALTU

Megaranto, Budi (2011). Trah Secodiningrat : Setangkai Sinergi Bangsa Indonesia

Gandasubrata, Sujiman M., (1952). Kenang Kenangan 1933 - 1950: Bagian I, Percetkan Seraju

Gandasubrata, Sujiman M., (1952). Kenang Kenangan 1933 - 1950: Bagian II, Percetkan Seraju

Werdoyo, T.S., (1990). Tan Jin Sing: Dari Kapiten Cina Sampai Bupati Yogyakarta, Grafiti

Zuhdi, Susanto., (2002). Cilacap 1830-1942 : Bangkit dan Runtuhnya Pelabuhan di Jawa. Kepustakaan Populer Gramedia.

Website

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/

"Sistem Multi partai, Presidensial, da Persoaalan Evektivitas Pemerintah"

https://www.indonesia-investments.com/

"Sejarah Indonesia: Politik dan Ekonomi di Bawah Sukarno"